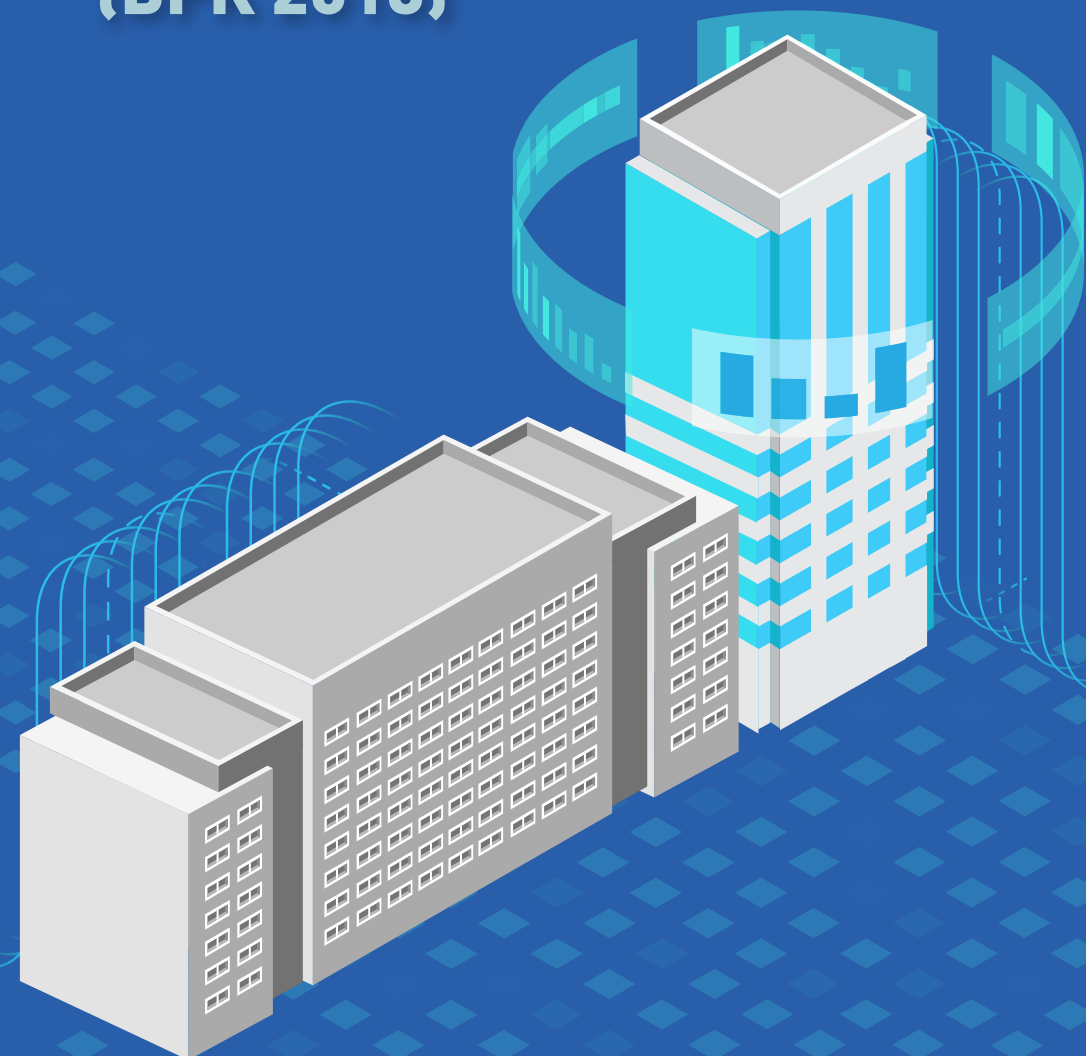
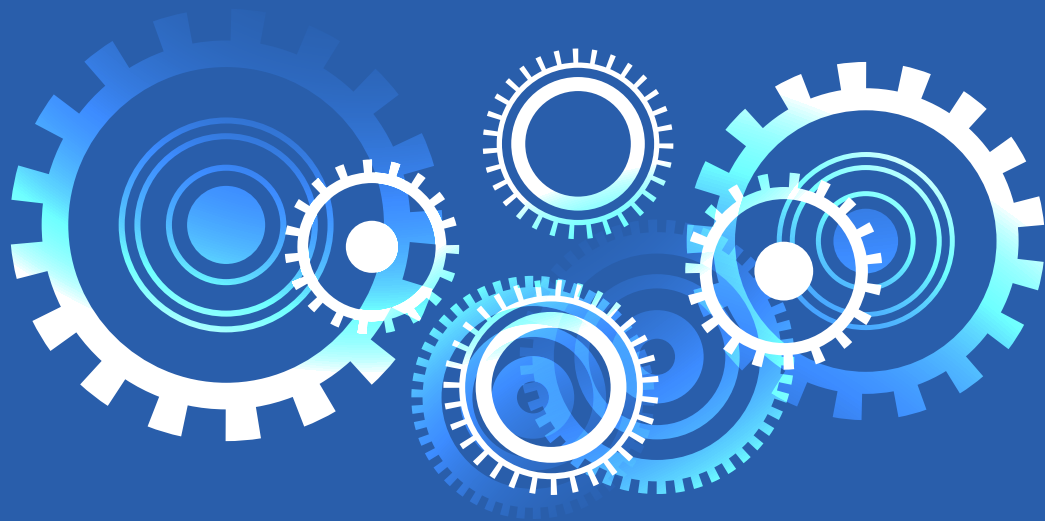




LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK 2018)

LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK 2018)



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210

www.bpk.go.id



LAPORAN TAHUNAN

BADAN PEMERIKSA

KEUANGAN

(BPK 2018)

Copyright

Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK 2018)

Cetakan pertama,
Juli 2019

Diterbitkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jalan Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp: (021) 255 49000
Faks: (021) 570 5376
www.bpk.go.id

Ilustrasi: [macrovector/freepik.com](https://www.freepik.com)

Sekapur Sirih Sambutan Sekretaris Jenderal BPK



Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun dan merampungkan Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2018. Laporan Tahunan ini memuat semua pencapaian BPK selama tahun 2018, baik dalam bidang pemeriksaan maupun non pemeriksaan.

Laporan Tahunan ini juga sebagai wujud komitmen transparansi BPK sebagai Badan Publik, yang berkewajiban memberikan informasi akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sehingga pencapaian BPK dapat menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di mata publik.

Di bidang pemeriksaan, pada semester I 2018 BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp4,13 triliun, yang berasal antara lain dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah, koreksi subsidi, serta koreksi cost recovery senilai Rp561,6 miliar.

BPK juga berhasil mengungkap 15.773 permasalahan senilai Rp11,55 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2018. Permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Di bidang non-pemeriksaan, BPK pada tahun 2018 kembali menggelar sejumlah pelatihan kepada ASN dan profesional, pengenalan tugas BPK ke Generasi Milenial dengan acara BPK Goes to Campus dan BPK Goes to School, serta penyelenggaraan Festival Film Kawal Harta Negara 2018.

Kabar gembira lain adalah terus meningkatnya jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika pada tahun 2006 hanya 3 LKPD (0,65%) yang mendapat Opini WTP, maka pada tahun 2017, sudah ada 411 LKPD (76%) yang mendapat Opini WTP. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari intensitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan BPK untuk mendorong terciptanya pengelolaan anggaran yang baik dan transparan.

Di tingkat internasional, BPK terus berperan aktif menjalin kerja sama dengan badan pemeriksa negara sahabat untuk bersama-sama meningkatkan kinerja dan kemampuan di bidang pemeriksaan. Upaya itu antara lain dilakukan BPK dengan menjadi tuan rumah pertemuan anggota Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Sedunia (INTOSAI) di Bandung pada bulan Juli untuk membahas pemeriksaan terhadap masalah yang berkaitan dengan lingkungan.

Tahun 2018 juga ditandai dengan berita duka gugurnya 10 pahlawan pemeriksa BPK dalam kecelakaan pesawat Lion Air penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang, 29 Oktober 2018. Mereka adalah staf dan pejabat struktural di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung.

Akhirnya, kami berharap Laporan Tahunan BPK Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi publik dalam memperoleh pemahaman tentang cara kerja BPK beserta hasil pemeriksaan keuangan negara bagi kesejahteraan rakyat.

Jakarta, Juli 2019
Bahtiar Arif
Sekretaris Jenderal BPK



Daftar Isi

Sekapur Sirih Sambutan Sekretaris Jenderal BPK	III
Pendahuluan	9
Ketua BPK dari Masa ke Masa	10
A. Visi BPK	12
B. Misi BPK	12
C. Tujuan Strategis BPK	12
D. Nilai-Nilai Dasar BPK	13
E. Tugas Pokok dan Fungsi BPK	14
F. Wewenang BPK	16
G. Profil Pimpinan BPK	18
H. Struktur Organisasi BPK	28
Bab 1	
BPK Dalam Angka	33
Laporan Hasil Pemeriksaan 2011-2018	34
Penyelamatan Uang Negara 2018	34
Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005–2018	35
HASIL PEMERIKSAAN BPK	35
1. Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik atas	
A. Laporan Keuangan BPK Tahun 2018	35
B. Penyerapan Anggaran Meningkat	36
2. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2017 yang Dilakukan Tahun 2018	37
A. Penyelamatan Uang Negara	38
B. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Mendapat Opini WTP	39
C. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)	41
D. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	45
E. Hasil Pemeriksaan BUMN dan BUMD	47
F. Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar	48
3. Pemeriksaan atas Kinerja Tahun Anggaran 2017 yang Dilakukan Tahun 2018	49

4. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2017 yang Dilaksanakan Tahun 2018	59
5. Pemeriksaan Investigatif yang Dilaksanakan Tahun 2018	67
6. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	70

Bab 2

Akses Terhadap Keterbukaan Informasi Publik 73

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di BPK	74
2. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik	76
3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik	80
4. E-PPID dan SIPADU	83
5. Pengelolaan Website dan Media Sosial	84
6. Instagram BPK RI	85
7. Penyebarluasan Informasi	86

Bab 3

Penguatan Organisasi dan kelembagaan 91

1. Majelis Kehormatan Kode Etik BPK	92
2. Inspektorat Utama BPK	94
A. Pemeriksaan Inspektorat PKMP	94
B. Pemeriksaan Inspektorat PIMK	99
C. Inspektorat Penegakan Integritas	104
D. Persiapan Peer Review 2019	105
3. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	106
4. Rapat Koordinasi BPK Tahun 2018	109
5. Produk Hukum BPK Tahun 2018	111
6. Sosialisasi Peraturan terkait Pemeriksaan	113
7. Sinergi dengan Stakeholder	114
8. Tantangan Masa Depan	116

Bab 4
Manajemen SDM, Sarana dan Prasarana,
& Teknologi Informasi di BPK **119**

1. Profil SDM BPK	120
2. Pengembangan SDM	122
3. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM)	124
4. Rekrutmen CPNS BPK	126
5. Asesmen Kompetensi Individu Pejabat BPK	128
6. Sarana dan Prasarana Baru di BPK 2018	129
7. Pengembangan Teknologi Informasi 2018	132

Bab 5
Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan
Keuangan Negara **135**

1. Perkembangan Sarana dan Prasarana Pusdiklat	137
2. Program Diklat Pemeriksaan	139
3. Program Diklat Non-Pemeriksaan	142
4. Kegiatan Diklat Tahun 2018	144

Bab 6
Pencapaian Institusi **147**

1. BPK Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	148
2. BPK Perwakilan Terima Penghargaan pada HAKORDIA 2018	149
3. BPK Terima Penghargaan Terbaik JDIH 2018	151
4. Penghargaan dari Media	153

Bab 7
Peran Serta BPK dalam Kancah Internasional 155

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Hubungan Multinasional | 156 |
| 2. Kerjasama Lingkup Asia / ASEAN | 162 |
| 3. Kerjasama Bilateral | 164 |

BAB 8
Peningkatan Pemahaman Publik tentang BPK 173

- | | |
|--|-----|
| 1. Festival Film Kawal Harta Negara | 174 |
| 2. Kuliah Umum dan <i>Talkshow</i> tentang BPK | 176 |
| 3. BPK <i>Goes To School/ Campus</i> | 177 |
| 4. Pameran di Ruang Publik | 179 |

BAB 9
Galeri foto kegiatan 181-194



Bab **Pendahuluan**

KETUA BPK DARI MASA KE MASA



R. Soerasno
1946-1957



K. Pringgodigdo
1957-1961



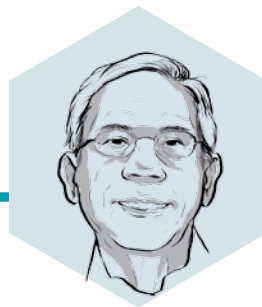
I Gusti Ketut Pudja
1961-1964



**Muhammad
Jusuf**
1983-1993



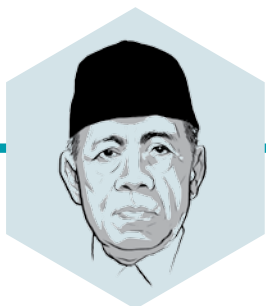
J.B. Sumarlin
1993-1998



**Satrio Budihardjo
Joedono**
1998-2004



**Harry
Azhar Azis**
2014-2017



**Hamengku
Buwono IX**
1964-1966



**Dadang
Suprayogi**
1966-1973



**Umar
Wirahadikusumah**
1973-1983



Anwar Nasution
2004-2009



Hadi Poernomo
2009-2014



Rizal Djalil
2014-2014



**Moermahadi
Soerja Djanegara**
21 April 2017 – sekarang



VISI BPK

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan

MISI BPK

Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

TUJUAN STRATEGIS BPK

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu:

Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan

Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

NILAI-NILAI DASAR BPK

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPK

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kesemuanya dilakukan dengan standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan.

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang. Sesuai ketentuan perundang-undangan, laporan diajukan paling lama satu bulan sejak diketahui ada unsur pidana untuk dijadikan dasar penyidikan .

Undang- Undang Dasar 1945 memberikan amanat bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas mandiri. Pemeriksaan itu mulai dari pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Hasil pemeriksaan BPK juga disampaikan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal penyelesaian kerugian negara/ daerah, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Baik hal itu dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, atau lembaga/ badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga akan memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.



**Berdasarkan
Undang-Undang
Republik Indonesia
Nomor 15/2006
tentang Badan
Pemeriksa
Keuangan,
wewenang
BPK
adalah:**

Menetapkan
jenis dokumen, data,
serta informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara yang
wajib disampaikan
kepada BPK;

Melakukan
pemeriksaan di tempat
penyimpanan uang dan barang
milik negara, di tempat pelaksanaan
kegiatan, pembukuan dan tata usaha
keuangan negara, serta pemeriksaan
terhadap perhitungan-perhitungan,
surat-surat, bukti-bukti, rekening
koran, pertanggungjawaban, dan
daftar lainnya yang berkaitan
dengan pengelolaan
keuangan negara;

Memberi
pertimbangan atas
rancangan sistem
pengendalian intern
Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah sebelum ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat/
Pemerintah
Daerah.

Menetapkan
kode etik
pemeriksaan
pengelolaan dan
tanggung jawab
keuangan
negara;

Membina
jabatan
fungsional
Pemeriksa;

G. PROFIL PIMPINAN BPK RI



**Prof. Dr. H.
Rizal Djalil**

ANGGOTA IV
BPK RI

**Dr. Achsanul
Qosasi**

ANGGOTA III
BPK RI

**Dr. Agung Firman
Sampurna,
S.E., M.Si.**

ANGGOTA I
BPK RI

**Dr. Agus Joko
Pramono,
M.Acc., Ak., CA.**

ANGGOTA II
BPK RI

**Prof. Dr.
Moermahadi Soerja
Djanegara, CA., CPA.**

KETUA
BPK RI



**Prof. Dr.
Bahrullah Akbar,
M.B.A., C.M.P.M**

WAKIL KETUA
BPK RI

**Ir. Isma
Yatun, M.T**

ANGGOTA V
BPK RI

**Prof. Dr. H.
Harry Azhar
Azis, M.A.**

ANGGOTA VI
BPK RI

**Prof. Dr. Eddy Mulyadi
Soepardi,
CFr.A., CA.**

ANGGOTA VII
BPK RI

**Prof. Dr. Moermahadi
Soerja Djanegara, CA., CPA.**

KETUA BPK RI



**Bidang
Tugas:**

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama Wakil Ketua;

Hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;

Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;

Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif; dan

Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

**PROFIL
PIMPINAN
BPK**

**Prof. Dr. Bahrullah Akbar,
M.B.A., C.M.P.M**

WAKIL KETUA BPK RI



**Bidang
Tugas:**

Sesuai dengan UU Nomor 15 / 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 anggota yang dipilih DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan.

Proses
Majelis Tuntutan
Perbendaharaan;

Pemeriksaan
pengelolaan dan
tanggung jawab
keuangan negara
secara umum bersama
dengan Ketua;

Pengarahan
pemeriksaan
investigatif;
dan

Pembinaan tugas
Sekretariat Jenderal,
Direktorat Utama Perencanaan,
Evaluasi, dan Pengembangan
Pemeriksaan Keuangan Negara,
Direktorat Utama Pembinaan dan
Pengembangan Hukum Pemeriksaan
Keuangan Negara, Inspektorat Utama,
dan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Pemeriksaan
Keuangan Negara bersama
dengan Ketua.

**Dr. Agung Firman
Sampurna, S.E., M.Si.**

ANGGOTA I BPK RI

**Bidang
Tugas:**

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, luar negeri, perhubungan, Polri, HAM, Pemilu

Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

**PROFIL
PIMPINAN
BPK**



**Dr. Agus Joko Pramono,
M.Acc., Ak., CA.**

ANGGOTA II BPK RI

**Bidang
Tugas:**

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional, Bank Indonesia, perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif



Dr. Achsanul Qosasi

ANGGOTA III BPK RI



Bidang Tugas:

Sesuai dengan UU Nomor 15 / 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 anggota yang dipilih DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan.

Melaksanakan koordinasi pemeriksaan investigatif

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset dan teknologi

Prof. Dr. H. Rizal Djali

ANGGOTA IV BPK RI



Bidang Tugas:

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam dan infrastruktur

Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif

Ir. Isma Yatun, M.T

ANGGOTA V BPK RI



Bidang Tugas:

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang agama, dan urusan dalam negeri, perusahaan kawasan.

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah Wilayah I (Sumatera dan Jawa)

PROFIL PIMPINAN BPK

Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif

Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.

ANGGOTA VI BPK RI



Bidang Tugas:

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang kesehatan dan pendidikan



**Prof. Dr. Eddy Mulyadi
Soepardi, CFr.A., CA.**

ANGGOTA VII BPK RI

**Bidang
Tugas:**

Sesuai dengan UU Nomor 15 / 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 anggota yang dipilih DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan.

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Badan Usaha Milik Negara dan lembaga lain yang dibentuk dan terkait dengan BUMN

Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Papua)

Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA, DAN 7 ANGGOTA**

STAF AHLI

**KADITAMA
REVBANG PKN**

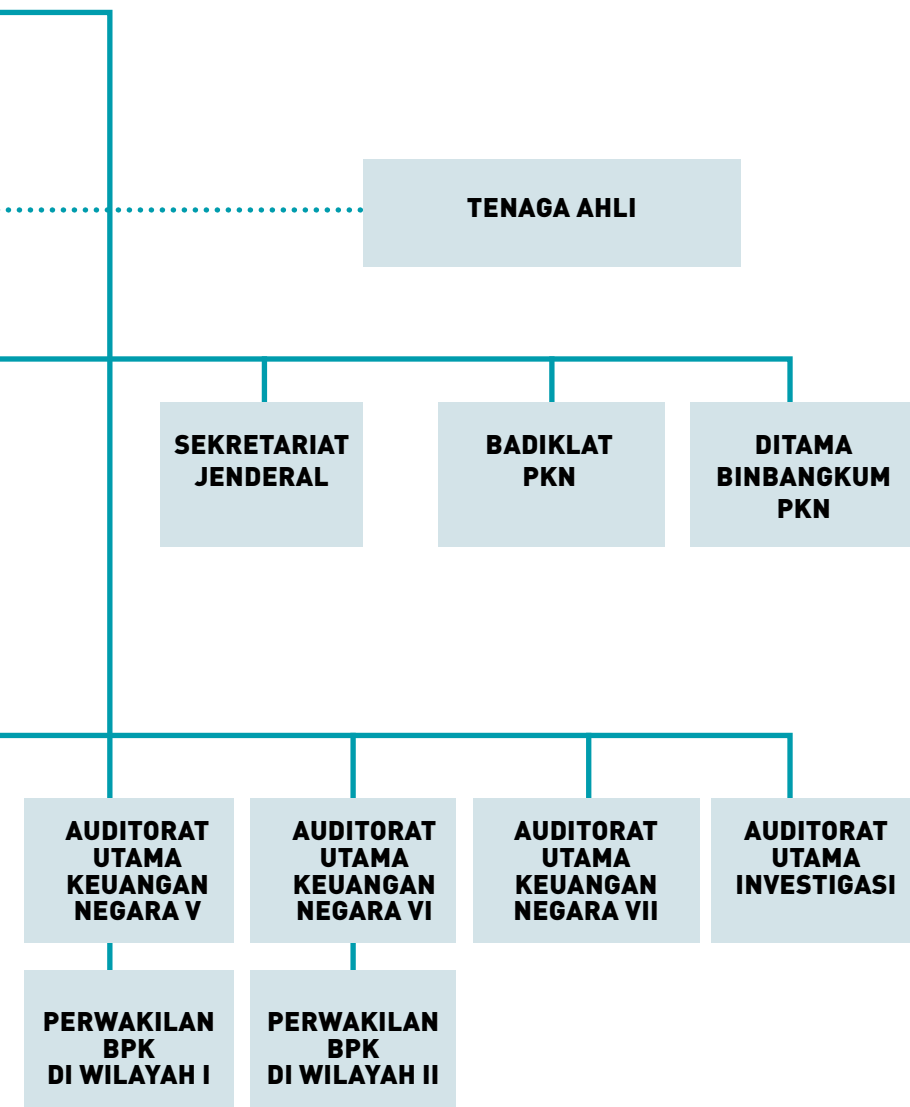
**INSPEKTORAT
UTAMA**

**AUDITORAT
UTAMA
KEUANGAN
NEGARA I**

**AUDITORAT
UTAMA
KEUANGAN
NEGARA II**

**AUDITORAT
UTAMA
KEUANGAN
NEGARA III**

**AUDITORAT
UTAMA
KEUANGAN
NEGARA IV**



H. STRUKTUR ORGANISASI BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipimpin sembilan anggota dengan kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Pimpinan BPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota. Masing-masing anggota BPK mempunyai tugas, yang telah diatur secara terperinci. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, pimpinan BPK dibantu Pelaksana BPK, yang masing-masing dipimpin pejabat eselon I.

Staf Ahli

Staf Ahli bertugas membantu dan bertanggung jawab pada pimpinan BPK. Staf Ahli terdiri atas:

1. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat
2. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah
3. Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya
4. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
5. Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko

Inspektorat Utama

Pelaksana ini bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh pelaksana BPK. Inspektorat Utama dibantu satuan kerja eselon II, yaitu:

- Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
- Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan
- Inspektorat Penegakan Integritas

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang)

Terdiri atas:

- Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
- Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Sekretariat Jendral

Pelaksana ini bertugas mengkoordinasikan dukungan administrasi sertasumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta pelaksana BPK. Kesenjangan dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen), yang membawahi satuan kerja eselon II:

- Biro Sekretariat Pimpinan
- Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
- Biro Sumber Daya Manusia
- Biro Keuangan
- Biro Teknologi Informasi
- Biro Umum

STRUKTUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pimpinan BPK

terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota.

Tenaga Ahli

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK

Badiklat bertugas merancang, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan diklat dan pembimbingan bagi pelaksana BPK dan pihak luar BPK, menyelenggarakan sertifikasi serta akreditasi unit penyelenggara diklat. Badiklat terdiri atas:

- Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
- Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
- Sekretariat Badiklat PKN
- Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dilingkungan Badiklat PKN
- Kelompok Jabatan Fungsional

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Tugas Ditama Binbangkum memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada Anggota dan pelaksana BPK, legislasi, pelayanan informasi hukum, penelitian dan pengembangan hukum serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/ daerah. Ditama Binbangkum terdiri atas:

- Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah
- Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum

**Auditorat Utama
Keuangan Negara
I**

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

**Auditorat Utama
Keuangan Negara
III**

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, serta riset dan teknologi.

**Auditorat Utama
Keuangan Negara
II**

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

**Auditorat Utama
Keuangan Negara
IV**

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur.

**STRUKTUR
BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN**

**Auditorat Utama
Keuangan Negara V**

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada kementerian dalam negeri, kementerian agama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, serta keuangan dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.

**Auditorat Utama
Keuangan Negara
VII**

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara)

**Auditorat Utama
Keuangan Negara
VI**

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada kementerian kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Termasuk juga keuangan dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

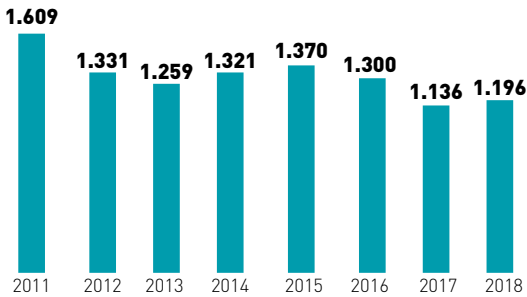
**Auditorat Utama
Investigasi**

Unit ini mempunyai tugas melakukan pemeriksaan investigatif, atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/ daerah, dan pemberian keterangan ahli.



BAB 1 **BPK** **DALAM** **ANGKA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 2011-2018

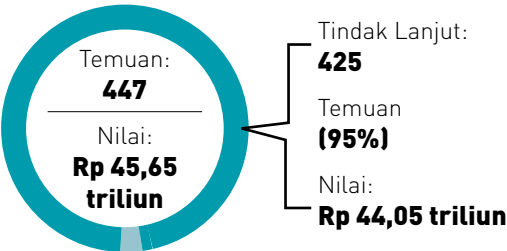
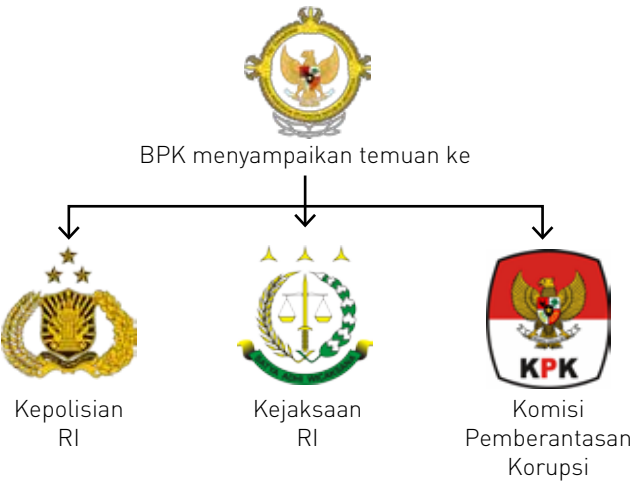


Penyelamatan Uang Negara 2018

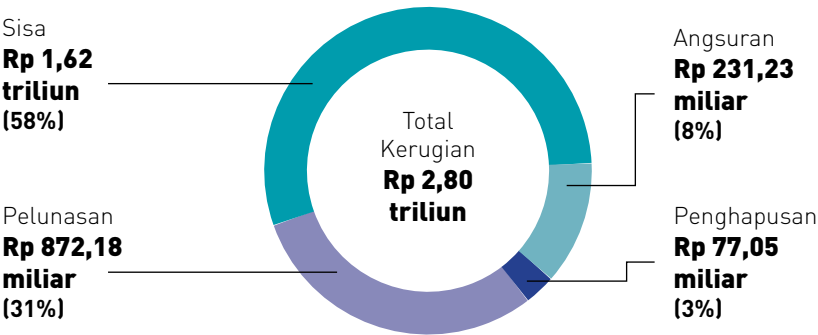
Jumlah LHP	Jumlah temuan	Jumlah rekomendasi	Uang Negara yang diselamatkan
1.196	14.184	38.880	Rp 17,85 triliun

Temuan Diteruskan ke Penegak Hukum

Periode 2003 s.d. 30 Juni 2017



GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005–2018



HASIL PEMERIKSAAN BPK

1. Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2018

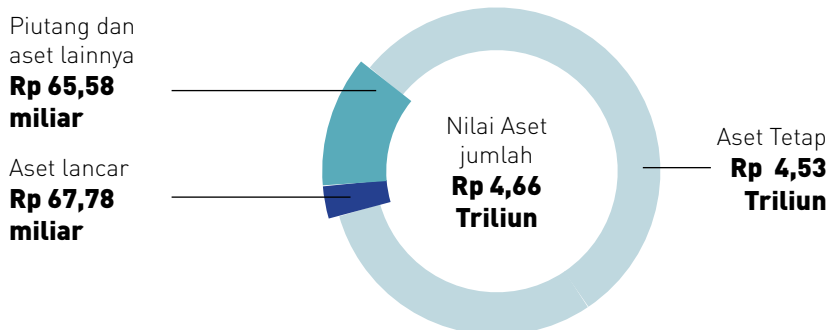
A. 10 WTP Berturut-turut

Hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara ini, juga disiplin dalam pengelolaan keuangan yang diamanatkan negara padanya.

Hal ini terlihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebanyak 10 kali berturut-turut atas transparansi dan akuntabilitas BPK dalam penggunaan uang negara. Pada tahun anggaran 2018 ini, KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan, menyatakan opini WTP terhadap laporan keuangan BPK.

“Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hat yang material, posisi keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2018, realisasi anggaran serta kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia,” demikian pernyataan KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan.

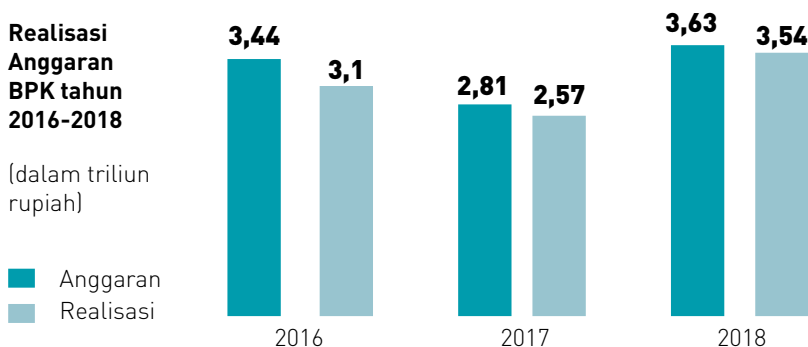
Nilai Aset BPK per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 4,66 triliun, terdiri dari aset Aset Lancar Rp67,78 miliar, Aset Tetap Rp4,53 triliun, serta piutang dan aset lainnya Rp69,58 miliar.



B. Penyerapan Anggaran Meningkat

Pada tahun 2018, anggaran belanja BPK sebesar Rp 3,63 triliun dan terealisasi Rp 3,54 triliun atau sebesar 98 persen. Angka penyerapan anggaran ini lebih baik daripada tahun sebelumnya yang mencapai 95 persen atau Rp 2,67 triliun dari pagu anggaran Rp 2,81 triliun.

Peningkatan penyerapan anggaran karena BPK telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Analisis kebutuhan akan dilakukan pada perencanaan di tahun-tahun berikutnya, agar perencanaan anggaran benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan berikutnya.



2. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2017 yang Dilakukan Tahun 2018

Badan Pemeriksa Keuangan selama Semester I tahun 2018 melakukan pemeriksaan terhadap 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 652 LHP keuangan (93%), 12 LHP kinerja (2%) dan 36 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%).

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK sepanjang Semester I Tahun 2018 menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 512 (79%) dari 652 laporan keuangan yang diperiksa. Hasil pemeriksaan atas kinerja secara umum memuat kesimpulan belum sepenuhnya efektif pada 5 (42%) dari 12 objek yang diperiksa.

Hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan secara umum pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada 24 (67%) dari 36 objek.

Tabel jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2018

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	120	1.439	3.637
Pemeriksaan Keuangan	106	1.307	3.307
Pemeriksaan Kinerja	7	78	206
PDTT	7	54	124
Pemerintah Daerah	542	7.913	22.114
Pemeriksaan Keuangan	542	7.913	22.114
BUMN dan Badan Lainnya	38	456	1.120
Pemeriksaan Keuangan	4	35	64
Pemeriksaan Kinerja	5	71	145
PDTT	29	350	911
Total	700	9.808	26.871
Pemeriksaan Keuangan	652	9.255	25.485
Pemeriksaan Kinerja	12	149	351
Pemeriksaan DTT	36	404	1.035

A. Penyelamatan Uang Negara

Dalam pemeriksaan sepanjang Semester I Tahun 2018, BPK berhasil mengungkap 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan, meliputi 7.539 (48%) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.030 (51%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun, serta 204 (1%) ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,49 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 8.030 permasalahan, di antaranya sebanyak 5.172 (64%) permasalahan senilai Rp10,06 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 3.557 (69%) permasalahan senilai Rp2,34

Tabel Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2018

Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN & Badan Lainnya		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	998	-	6.222	-	319	-	7.539	-
■ Kelemahan SPI	998	-	6.222	-	319	-	7.539	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1.233	4.855.825,83	6.558	2.544.963,84	239	2.668.184,48	8.030	10.068.974,15
■ Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan								
▶ Kerugian	603	505.518,47	2.903	1.540.604,52	51	299.608,83	3.557	2.345.731,82
▶ Potensi Kerugian	53	566.840,94	426	317.869,22	34	145.025,34	513	1.029.735,50
▶ Kekurangan Penerimaan	177	3.783.466,42	898	686.490,10	57	2.223.550,31	1.102	6.693.506,83
Subtotal-berdampak finansial	833	4.855.825,83	4.197	2.544.963,84	142	2.668.184,48	5.172	10.068.974,15
● Penyimpangan Administrasi	400	-	2.361	-	97	-	2.858	-
C. Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	87	267,21	-	-	117	1.490.520,41	204	1.490.787,62
● Ketidakhematan	1	267,21	-	-	28	1.205.071,93	29	1.205.339,14
● Ketidakefisienan	-	-	-	-	5	237.263,25	5	237.263,25
● Ketidakefektifan	86	-	-	-	84	48.185,23	170	48.185,23
Total (A+B+C)	2.318	4.856.093,04	12.780	2.544.963,84	675	4.158.704,89	15.773	11.559.761,77
Nilai penyerahan aset/ penyeroran ke kas negara/ daerah/ perusahaan		186.382,35		476.640,08		13.127,82		676.150,05

triliun. Selain itu terdapat potensi kerugian sebanyak 513 (10%) permasalahan senilai Rp1,03 triliun, serta kekurangan penerimaan sebanyak 1.102 (21%) permasalahan senilai Rp6,69 triliun.

Selain itu, terdapat 2.858 (36%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Dari 204 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,49 triliun, terdapat 29 (14%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp1,20 triliun, 5 (3%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp237,26 miliar, dan 170 (83%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp48,18 miliar.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyeteror ke kas negara/ daerah/ perusahaan senilai Rp676,15 miliar (7%).

B. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Mendapat Opini WTP

Hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat terdiri atas 106 laporan keuangan, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dan 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Tahun 2017, 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2017, serta 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2017.

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 meliputi pemeriksaan atas Neraca per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan-laporan tersebut menyajikan di antaranya nilai pendapatan, belanja, defisit, pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), aset, kewajiban, dan ekuitas.

Tabel Nilai Akun LRA dan Neraca LKPP Tahun 2017
(Nilai dalam Rp Triliun)

Uraian	Nilai
LRA	
Pendapatan	1.666,37
Belanja	2.007,35
Defisit Anggaran	340,98
Pembiayaan	366,62
SILPA	25,64
NERACA	
Aset	5.947,83
Kewajiban	4.407,05
Ekuitas	1.540,78

LKPP Tahun 2017 mendapatkan **opini Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam opini atas LKPP Tahun 2017, BPK memberikan penekanan atas mekanisme pelaksanaan anggaran pada Kementerian Pertahanan. Selain memberikan opini, BPK menyampaikan LHP atas SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal. LHP tersebut mengungkapkan 13 temuan pengendalian intern dan 5 temuan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2017. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

BPK juga memberikan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2017 yang menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal secara memadai. Tiga pilar transparansi fiskal yang diukur adalah pelaporan fiskal, perkiraan fiskal dan penganggaran, serta analisis dan manajemen risiko fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50%, level *Good* sebanyak 13 kriteria atau 36%, level *Basic* sebanyak 3 kriteria atau 8% dan *Not Met* sebanyak 2

kriteria atau 6%. Reviu dilakukan berdasarkan The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC) Tahun 2014.

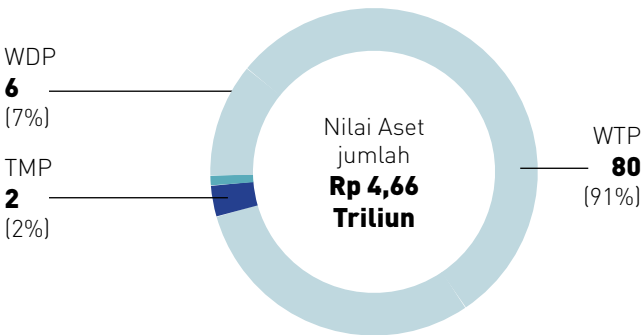
Tabel Capaian KriteriaPilar Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2017

Pilar	Level				Total
	Not Met	Basic	Good	Advanced	
Pelaporan Fiskal	0	1	5	6	12
Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	1	1	4	6	12
Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	1	1	4	6	12
Total	2	3	13	18	36
Persentase	6%	8%	36%	50%	100%

C. Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL)

BPK memeriksa 86 LKKL dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2017 (LK BPK Tahun 2017 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik). Hasil pemeriksaan menunjukkan 79 LKKL (termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Grafik Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017



Pencapaian opini WTP sebesar 91% masih di bawah target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sebesar 95% tahun 2019. Indeks opini atas capaian tersebut adalah sebesar 3,86 atau 0,02 poin di bawah target bidang Reformasi Keuangan Negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 3,88.

Meskipun capaian indeks opini LKKL di bawah target, opini WTP mengalami peningkatan sebesar 7 % dari 84% pada tahun 2016 menjadi 91%. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan opini WDP dan TMP, yaitu dari 9% menjadi 7% pada tahun 2017 untuk opini WDP, dan dari 7% menjadi 2% pada tahun 2017 untuk opini TMP.

Daftar Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2013-2017

No	BA	Kementerian/ Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	2	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	4	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	5	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	6	Kejaksaan Republik Indonesia	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
6	7	Sekretariat Negara	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
7	10	Kementerian Dalam Negeri	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
8	11	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
9	12	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP	WDP
10	13	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
11	15	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	18	Kementerian Pertanian	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
13	19	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	20	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
15	22	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
16	23	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	24	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	25	Kementerian Agama	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
19	26	Kementerian Ketenagakerjaan (sebelumnya: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP
20	27	Kementerian Sosial	WTP-DPP	WDP	TMP	WTP	WTP
21	29	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3) (sebelumnya: Kementerian Kehutanan)	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
22	32	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	TMP	TMP
23	33	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (3) (sebelumnya: Kementerian Pekerjaan Umum)	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
24	34	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	35	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	36	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2)	WTP	WTP	2)	2)	2)
27	36	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (1)	1)	1)	WTP	WTP	WTP
28	40	Kementerian Pariwisata (sebelumnya: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	TMP	TMP	WTP	WTP	WTP
29	41	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
30	42	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (3) (sebelumnya: Kementerian Riset dan Teknologi)	WDP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
31	43	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP	WTP	2)	2)	2)
32	44	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
33	47	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP

No	DA	Kementerian/ Lembaga	Opini BPK atas UUKL dan LKBUH				
			2013	2014	2015	2016	2017
34	48	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
35	50	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36	51	Lembaga Sandi Negara	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	WTP
37	52	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38	54	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
39	55	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40	56	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
41	57	Perpustakaan Nasional RI	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
42	59	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP
43	60	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44	63	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
45	64	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	WTP
46	65	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47	66	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
48	67	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sebelumnya: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal)	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
49	68	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
50	74	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	TMP	TMP	WDP
51	75	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
52	76	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
53	77	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54	78	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55	79	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56	80	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57	81	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
58	82	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
59	83	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
60	84	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
64	88	Badan Kepegawalan Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65	89	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66	90	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67	91	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP-DPP	WTP	2j	2j	2j
68	92	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
69	93	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70	95	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
73	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
74	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
75	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
76	107	Badan SAR Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
79	110	Ombudsman RI	WTP	TMP	WDP	WTP	WTP

No	BA	Kementerian/ Lembaga	Opini BPK atas LKGL dan LKBLU				
			2013	2014	2015	2016	2017
72	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
73	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
74	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
75	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
76	107	Badan SAR Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78	109	Badan Petakana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
79	110	Ombudsman RI	WTP	TMP	WDP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

1) : Nomenklatur Kementerian/ Lembaga Baru mulai Tahun 2015

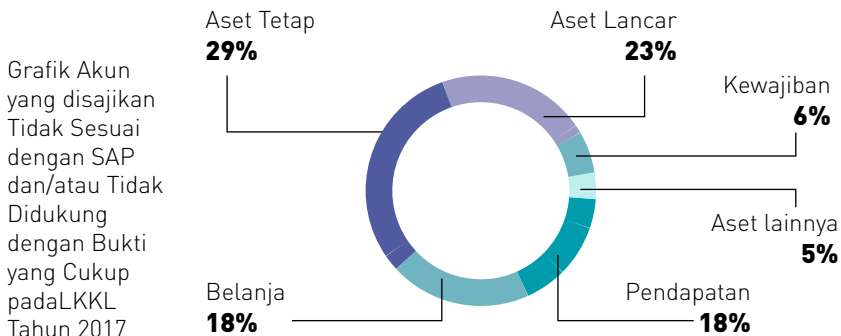
2) : Kementerian/ Lembaga dilikuidasi mulai Tahun 2015

3) : Nomenklatur Kementerian/ Lembaga Baru hasil gabungan Kementerian/ Lembaga Likuidasi mulai Tahun 2015

4) : Nomenklatur Kementerian/ Lembaga Baru mulai Tahun 2016

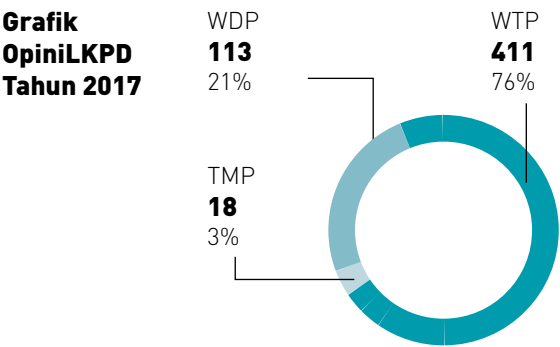
Enam LKKLyang memperoleh opini WDP,yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut memperoleh opini TMP.

Kedelapan LKKL ini belum mendapat opini WDP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup.



**D. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)**

IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD Tahun 2017 yang wajib diserahkan. Terhadap 542 LKPD Tahun 2017 tersebut, BPK memberikan 411 opini WTP (76%), 113 opini WDP (21%), dan 18 opini TMP (3%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 33 dari 34 pemerintah provinsi (97%), 298 dari 415 pemerintah kabupaten (72%), dan 80 dari 93 pemerintah kota (86%).



Secara umum, capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/ program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 6 persen dari 70% pada tahun 2016 menjadi 76% pada tahun 2017. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan kenaikan kualitas LKPD.

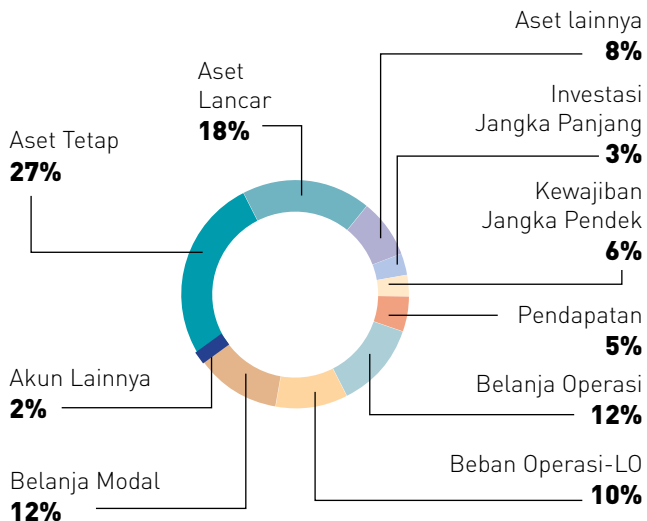
Kenaikan kualitas LKPD tersebut didukung oleh upaya-upaya pemda dalam melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun 2016, antara lain:

- Memverifikasi dan/ atau memvalidasi seluruh piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

- Memutakhirkan data aset tetap dan menilai aset tetap tanah dengan menggunakan nilai wajar atau nilai jual objek pajak sesuai dengan tahun perolehan.
- Memperbaiki pencatatan aset tetap dengan memerinci per unit aset, jenis, dan lokasi aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
- Melakukan inventarisasi ulang secara menyeluruh atas aset tetap tanah dan gedung dan bangunan.
- Melakukan atribusi dan/ atau kapitalisasi nilai belanja ke dalam aset tetap induknya.
- Mencatat aset kemitraan sesuai dengan SAP.
- Menyetorkan dan memulihkan nilai pertanggungjawaban belanja barang dan jasa ke kas daerah.
- Melakukan perbaikan atas pencatatan beban dalam Laporan Operasional (LO).
- Melakukan penataan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Sebanyak 131 LKPD belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup.

Grafik Akun yang disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2017



E. Hasil Pemeriksaan BUMN dan BUMD

IHPS I Tahun 2018 memuat ringkasan atas 38 hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BUMN dan badan lainnya, terdiri atas 4 hasil pemeriksaan keuangan, 5 hasil pemeriksaan kinerja, dan 29 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Hasil pemeriksaan keuangan pada badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 4 laporan keuangan tahun 2017, yaitu: (1) Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKT BI), (2) LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (3) LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan (4) LK Penutup Penyelenggaraan Ibadah Haji per 31 Desember 2017.

Tabel Opini LK Badan Lainnya Tahun 2013-2017

No	Entitas	Opini				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Otoritas Jasa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Penyelenggaraan Ibadah Haji	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Dalam opini atas LKT BI Tahun 2017, BPK memberikan penekanan atas tagihan BI kepada Indo Plus B.V sebesar US\$33,29 juta atau setara dengan Rp451,12 miliar sehubungan dengan pengelolaan Non-Performing Loan (NPL) eks Indover Bank yang seluruhnya sudah dijual, dan saat ini masih dalam proses review oleh BI. BPK juga memberikan penekanan atas LK OJK Tahun 2017 terkait dengan sewa gedung yang tidak dimanfaatkan, aset tetap dan aset tak berwujud yang berasal dari dana APBN yang belum ditetapkan statusnya, serta Utang Pajak Badan yang belum dilunasi OJK.

F. Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN)

Pada semester I tahun 2018 BPK melakukan pemeriksaan atas 18 LKPHLN meliputi laporan keuangan pinjaman dan hibah dari *Asian Development Bank* (ADB), *World Bank*, dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD). Hasil pemeriksaan atas 18 LKPHLN mengungkapkan 17 LKPHLN memperoleh opini WTP dan 1 LKPHLN memperoleh opini WDP, yaitu Hibah *Developing Sustainable Alternative Livelihoods* (DSAL) JFPR No.9160.

Tabel LKPHLN Tahun 2017 yang Diperiksa BPK

No.	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Opini
1	Pinjaman World Bank No. TF0A2268 IIFD	WTP
2	Pinjaman IBRD No. 8038-ID STATCAP-CERDAS	WTP
3	Pinjaman ADB No.2927-INO BPKP	WTP
4	Pinjaman ADB No. 2928 INO PEDP	WTP
5	Pinjaman IBRD No. 8425-ID RISET PRO	WTP
6	Pinjaman ADB No. 3123/ 8280-INO MSMIP	WTP
7	Pinjaman ADB No. 3122-INO NUSP-2	WTP
8	Pinjaman ADB No. 3440-INO FMSRBS	WTP
9	Pinjaman ADB No. 2817-INO RRDP	WTP
10	Pinjaman ADB No. 3455-INO AIDBESP	WTP
11	Pinjaman IBRD No. 8121-ID JUFMP/ JEDI	WTP
12	Pinjaman IBRD No. 8043-ID WINRIP	WTP
13	Hibah ADB No. 0501-INO Forest Investment Program - Project I	WTP
14	Hibah World Bank TF 0A2858 dan TF 0A2104 Forest Investment Program - Project II	WTP
15	Hibah ADB JFPR No. 9160 DSAL	WDP
16	Pinjaman ADB No. 3094 dan Hibah ADB No. 0379-INO COREMAP-CTI Project	WTP
17	Pinjaman IBRD No. 8188-ID SMARTD	WTP
18	Hibah ADB No. 8358-INO pada Program PKP-SPM Dikdas	WTP

BPK memberikan opini WDP atas Laporan Keuangan Hibah ADB JFPR No. 9160 DSAL Tahun 2017, karena akun-akun disajikan tidak sesuai dengan standar yang berlaku sehingga memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangannya.

Permasalahan penyajian tersebut adalah:

Equipment and Supplies

Terdapat ketidaksesuaian antara bukti pertanggungjawaban pengeluaran, fisik barang, dan harga pembelian hasil konfirmasi ke supplier.

Consulting Services.

Pengeluaran *Reimbursable Expense* kepada Konsultan PT OII tidak sesuai dengan senyatanya.

Hibah Manajemen

Pertanggungjawaban biaya sewa kantor tidak sesuai dengan senyatanya.



3. Pemeriksaan atas Kinerja Tahun Anggaran 2017 yang Dilakukan Tahun 2018

Pemeriksaan Kinerja dilakukan BPK terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN serta badan lainnya. Pada IHPS Semester 1 2018, terdapat 7 LHP kinerja pada pemerintah pusat dan 5 LHP kinerja pada BUMN dan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja memuat 5 tema yaitu:

- (1) Perekonomian dan Keuangan Negara,
- (2) Pendidikan,
- (3) Ketersediaan Pangan,
- (4) Keamanan dan Ketertiban, dan
- (5) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

A. Pemeriksaan Kinerja Bidang Perekonomian dan Keuangan Negara

Pemeriksaan kinerja dengan tema Perekonomian dan Keuangan Negara dilakukan untuk melihat kesiapan

implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Indonesia tahun 2016-semester I tahun 2018. Pemeriksaan dilakukan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah dalam kesiapan implementasi TPB di Indonesia. BPK menyimpulkan bahwa upaya kesiapan pemerintah dalam implementasi TPB di Indonesia telah cukup efektif, hal ini ditunjukkan dengan:

- Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 sebagai bentuk *institutional arrangement*, serta menyelaraskan 169 target TPB dengan memilih 94 target yang sesuai dengan RPJMN 2015-2019
- Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa anggaran terkait dengan 94 target TPB yang merupakan prioritas RPJMN, dialokasikan dan dilaporkan dengan akuntabel
- Pemerintah telah memiliki rancangan untuk menetapkan pembagian tugas untuk memantau, menindaklanjuti, mereviu, dan melaporkan kemajuan atas implementasi TPB.

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, masih ditemukan hal-hal yang menghambat implementasi TPB di antaranya:

- Kebijakan pemerintah terkait dengan penganggaran dan belanja yang berkualitas belum memadai. Dari sisi efisiensi belanja, pemerintah telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja (PBK). Namun anggaran yang disusun belum memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dengan hasil yang diharapkan (*outcome*) atau penganggaran berbasis program (*money follow program*), sehingga belum dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan inefisiensi dan ketidakhematan belanja.

- Pemerintah belum dapat menghasilkan disagregasi data yang diperlukan pada tingkat kabupaten/ kota. Keberadaan indikator yang valid dan andal, terutama terkait 11 pelayanan dasar, dapat membantu pemerintah memastikan bahwa semua penduduk telah terlayani 11 pelayanan dasar tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS terkait dengan indikator kemiskinan tidak dirancang untuk dapat menyajikan disagregasi 40% penduduk berpendapatan terendah sampai level kabupaten/ kota. Kondisi tersebut mengakibatkan indikator yang dihasilkan tidak dapat dijadikan acuan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam mendorong perbaikan implementasi program pemerintah untuk meningkatkan capaian *sustainable development goals* (SDGs).

B. Pemeriksaan Kinerja Bidang Pendidikan

Pemeriksaan kinerja di bidang pendidikan bertujuan untuk melihat efektivitas pengelolaan biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) tahun 2016 dan 2017. Pemeriksaan kinerja ini dilakukan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Universitas Terbuka (UT), Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Lampung, UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar).

Kemenristekdikti telah melakukan upaya dan capaian dalam usaha mewujudkan pengelolaan BKT dan UKT yang semakin baik sebagai berikut:

- Regulasi untuk pengelolaan BKT-UKT telah ditetapkan sesuai dengan tujuan. Kemenristekdikti telah menetapkan regulasi pengelolaan BKT-UKT untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan melalui penetapan BKT dan UKT. Selain itu, Kemenristekdikti juga menetapkan ketentuan mahasiswa penerima UKT kelompok I dan II serta mahasiswa Bidikmisi diterapkan kepada paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri (PTN).

- Kemenristekdikti telah melakukan sosialisasi regulasi BKT-UKT melalui *jdih.ristekdikti.go.id* dan mengirim materi sosialisasi ke setiap PTN.
- Kemenristekdikti telah memiliki rencana dan jadwal evaluasi secara periodik atas pengelolaan BKT-UKT dan juga telah dilaksanakan evaluasi untuk 20 PTN. Selain itu, Kemenristekdikti juga telah menyusun rencana formal pemeliharaan dan pengembangan aplikasi secara memadai.
- Kemenristekdikti telah memiliki Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) untuk pelaporan realisasi UKT masing-masing PTN. Sejak tahun 2016, Kemenristekdikti telah meminta masing-masing PTN untuk mengisi dan mengunggah data realisasi penerimaan UKT per masing-masing kelompok UKT untuk semester ganjil dan genap.
- Sejak tahun 2016, semua PTN telah melaporkan realisasi penerimaan UKT per semester kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui aplikasi SIMONEV. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan BKT dan UKT tahun 2016 dan 2017 menggunakan 3 kriteria yaitu aspek regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan.

BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan BKT dan UKT tahun 2016 dan 2017 pada Kemenristekdikti dan 10 PTN cukup efektif, karena ada sejumlah kekurangan didasarkan atas hasil pemeriksaan, antara lain:

- Regulasi yang mengatur pengelolaan BKT-UKT pada UT dan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) pada Program Diploma belum tersedia sehingga penetapan tarif UKT untuk PTN BH Program Diploma dan UT berisiko tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- Peraturan dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti dan Kepmenristekdikti) tentang UKT tahun 2016 dan 2017

terlambat diterbitkan dibandingkan dengan jadwal pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam menghitung dan menetapkan besaran kelompok UKT yang harus dibayar oleh mahasiswa.

C. Pemeriksaan Kinerja Bidang Ketersediaan Pangan

Pemeriksaan kinerja atas program peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil hortikultura tahun anggaran 2014-semester I 2017 dilakukan pada Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura khususnya komoditas cabai, bawang, dan buah-buahan untuk mendukung stabilitas harga dan penurunan impor produk hortikultura tahun 2014-semester I 2017. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa program tersebut belum sepenuhnya efektif. Simpulan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan antara lain:

- Perencanaan produksi cabai dan bawang pada Direktorat Jenderal Hortikultura belum memadai. Penetapan angka target produksi dalam Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura belum didukung dengan data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, target perencanaan secara nasional berpotensi tidak dapat tercapai, pelaksanaan kegiatan berpotensi tidak, serta permasalahan nasional terkait dengan komoditas cabai, bawang, dan buah berpotensi tidak dapat diselesaikan.
- Manajemen pola tanam untuk mewujudkan kestabilan produksi cabai dan bawang belum optimal. Produksi aneka cabai dan bawang merah dari tahun 2014-2016 sebagian besar telah mencapai target produksi yang ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal

Hortikultura dan revisinya serta prognosa kebutuhan nasional, tetapi belum stabil sepanjang tahun. Kebijakan manajemen pola tanam yang disusun oleh Direktorat Jenderal Hortikultura untuk menjaga kestabilan produksi belum berhasil dan belum dapat diterapkan di daerah. Akibatnya, terdapat potensi ketidakstabilan harga karena ketidakstabilan produksi.

- Kegiatan pengembangan buah lokal yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Hortikultura belum dapat menggantikan kebutuhan buah impor. Impor buah ke Indonesia cukup besar di antaranya terdapat impor buah jeruk pada waktu yang tidak diperbolehkan yaitu pada masa panen buah lokal. Akibatnya, pencapaian program pemerintah tidak dapat terukur dan berkelanjutan dalam rangka penganekaragaman buah-buahan.

D. Pemeriksaan Kinerja Bidang Keamanan dan Ketertiban

Dalam bidang keamanan dan ketertiban, BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja atas perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri pada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta instansi terkait lainnya pada tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, Johor Bahru, Jeddah, Los Angeles, dan Cape Town. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri dari aspek kelembagaan, dukungan sumber daya, diplomasi dan koordinasi, penanganan kasus, serta pelayanan dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri belum sepenuhnya efektif. Hasil pemeriksaan menunjukkan antara lain:

- Batas tanggung jawab dan wewenang antar kementerian/ lembaga/ instansi (K/L/I) terkait dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri belum sepenuhnya diatur secara jelas. Hasil penelaahan terhadap peraturan perundangan yang mengatur tugas, fungsi, dan wewenang K/L/I serta pihak-pihak terkait perlindungan TKI di luar negeri menunjukkan bahwa baik Kemenlu dan K/L/I terkait yakni Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sama-sama memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk merumuskan dan/ atau melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan TKI di luar negeri. Namun demikian, peraturan yang ada belum memisahkan secara jelas batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing K/L/I tersebut. Hal tersebut mengakibatkan potensi tumpang tindih tugas, fungsi, dan wewenang serta memperpanjang proses birokrasi penanganan kasus WNI di luar negeri.

- Peran Kemenlu dalam penyampaian rekomendasi terkait dengan perlindungan WNI belum dapat diukur secara andal. Kemenlu tidak menetapkan target jumlah rekomendasi yang akan disampaikan dalam isu perlindungan WNI pada forum perundingan internasional dan belum memiliki mekanisme penyampaian rekomendasi/ pendapat/ hasil kajian formal tingkat kementerian terkait dengan isu-isu perlindungan WNI di luar negeri yang dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan/ regulasi nasional.

BPK merekomendasikan Menteri Luar Negeri agar:

- Berkoordinasi dengan K/L/I lain untuk merumuskan mekanisme baku dan formal hubungan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri;
- Menetapkan target dan mekanisme penyampaian rekomendasi/ pendapat/ hasil kajian formal tingkat kementerian terkait dengan penerapan kebijakan, peraturan, dan/ atau isu terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri baik dalam kebijakan/ regulasi nasional maupun forum internasional; dan
- Berkoordinasi dengan Kemendagri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kemenaker, dan BNP2TKI untuk menyempurnakan prosedur pendataan dan pendaftaran WNI yang pindah ke dan datang dari luar negeri.

E. Pemeriksaan Kinerja Bidang Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Pada semester I tahun 2018, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat terkait dengan tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan tersebut meliputi: (1) Pengelolaan konsesi pelabuhan dan (2) Subsidi pelayanan angkutan udara perintis.

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan konsesi pelabuhan dilakukan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Usaha Pelabuhan (BUP), yaitu PT Pelindo II (Persero) dan PT Pelindo III (Persero), dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sejak tahun 2016-semester I tahun 2017. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan konsesi pelabuhan, terkait dengan aspek perencanaan strategis konsesi pelabuhan, penentuan tarif dan jangka waktu konsesi pelabuhan, pelaksanaan tanggung jawab Kemenhub dan Otoritas Pelabuhan (OP) dalam penerapan konsesi, dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas konsesi.

Sasaran pemeriksaan dalam pemeriksaan kinerja ini adalah kegiatan perencanaan konsesi, penyusunan perjanjian konsesi pelabuhan, dan implementasi konsesi. Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Kemenhub dalam pengelolaan konsesi pelabuhan, berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan konsesi pelabuhan di Ditjen Hubla Kemenhub, BUP, dan instansi terkait lainnya, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan konsesi pelabuhan belum efektif ditinjau dari aspek perencanaan strategis, penentuan tarif dan jangka waktu konsesi, pelaksanaan tanggung jawab Kemenhub, dan penatausahaan PNBP konsesi.

Simpulan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan antara lain:

- Penentuan besaran tarif konsesi (concession fee) dan jangka waktu konsesi pelabuhan, baik pada Peraturan

Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 15 Tahun 2015 sebesar 2,5% maupun pada perjanjian konsesi pelabuhan existing tidak melalui kajian dan/ atau dasar pertimbangan lain, dan pada perjanjian konsesi pelabuhan/ terminal nonexisting belum sepenuhnya didukung dengan studi kelayakan yang memadai. Akibatnya, besaran tarif konsesi yang ditetapkan dalam Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2015 belum mencerminkan kelayakan tarif konsesi yang seharusnya. Hal tersebut disebabkan Dirjen Perhubungan Laut tidak membuat studi kelayakan dalam menentukan besaran tarif konsesi pada Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerja Sama Lainnya.

- Penyelenggara pelabuhan belum melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian konsesi di antaranya melakukan pengerukan alur pelayaran dan pengurusan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di area konsesi. Pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan oleh BUP, namun tidak diperhitungkan kompensasinya dalam perjanjian konsesi. Akibatnya, pelayanan jasa kepelabuhanan dan upaya keselamatan pelayaran menjadi terhambat. Hal tersebut terjadi karena Kemenhub tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara pelabuhan dan tidak pernah mengajukan alokasi anggaran dengan menggunakan sebagian dana PNBPN sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK.06/2002 Tahun 2002.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar:

- Meninjau kembali besaran tarif konsesi melalui studi kelayakan untuk memastikan bahwa tarif konsesi sesuai dengan prinsip keadilan, menguntungkan semua pihak, dan mencerminkan persaingan yang sehat.
- Mengajukan penggunaan sebagian dana PNBPN kepada Kemenkeu untuk mendanai kegiatan Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/06.KMK/2002 .

Hal ini perlu dilakukan karena hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan konsesi pelabuhan mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan meliputi 9 permasalahan ketidakefektifan dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp1,48 miliar.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan subsidi pelayanan angkutan udara perintis tahun 2015 dan 2016, dilakukan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub di Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pemberian subsidi pelayanan angkutan udara perintis, dengan sasaran mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian subsidi pelayanan angkutan udara perintis pada TA 2015 dan 2016, capaian Ditjen Hubud Kemenhub pada jumlah penumpang angkutan udara perintis yang diangkut melebihi target dan untuk jumlah rute pelayanan angkutan udara perintis hampir memenuhi target.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan subsidi pelayanan angkutan udara perintis di Ditjen Hubud pada Kemenhub belum sepenuhnya efektif dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, karena penetapan rute penerbangan perintis belum sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Kemenhub dan usulan rute tidak didukung dengan data yang valid, panduan perhitungan biaya operasi pesawat angkutan udara perintis serta penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) belum memadai, dan kebijakan penurunan target penumpang angkutan udara perintis untuk menambah nilai pemberian subsidi pada tahun 2015 tidak tepat.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan antara lain agar meninjau kembali Permen 9 Tahun 2016 terutama terkait dengan pembatasan jenis dan kapasitas pesawat serta frekuensi untuk angkutan udara perintis agar

disesuaikan dengan kebutuhan.

Menhub juga direkomendasikan untuk menginstruksikan Dirjen Hubud untuk menetapkan skala prioritas terhadap 3 kriteria fungsi keperintisan yang telah ditetapkan dalam Permen 9 Tahun 2016 dalam melakukan pemilihan rute perintis yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

4. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2017 yang Dilaksanakan Tahun 2018

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) dilakukan berdasarkan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis pemeriksaan ini dilakukan baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga Badan Usaha Milik Negara.

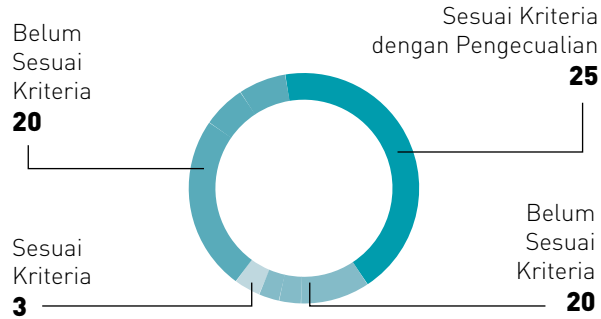
A. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) pada pemerintah pusat dengan tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pendidikan; (3) Mental dan Karakter; (4) Ketersediaan Pangan; (5) Pembangunan Kewilayahan; serta (6) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. Pemeriksaan dilakukan atas 58 objek pemeriksaan pada 25 Kementerian/ Lembaga dan 5 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

Hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat menyimpulkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 3 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 25 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 10 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 20 objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 599 temuan yang memuat 953 permasalahan senilai Rp1,03 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 324 kelemahan sistem pengendalian intern, 578 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp923,22 miliar, dan 51 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas senilai Rp112,74 miliar.

Grafik
Pengelolaan
Keuangan



Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain pengelolaan belanja, pengelolaan anggaran kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) dan persiapan penyelenggaraan Asian Games, serta penilaian kembali aset Barang Milik Negara (BMN).

1. Perekonomian dan Keuangan Negara

Pemeriksaan terhadap 46 objek pada 23 Kementerian/Lembaga menghasilkan 273 temuan yang memuat 425 permasalahan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat, baik pada aspek kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama pada Kementerian Sosial. Saldo di rekening penampungan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) belum disetor ke kas negara sebesar Rp168,82 miliar. Saldo tersebut antara lain karena kartu keluarga sejahtera (KKS) tidak dapat didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), KPM *non-eligible*, KPM tidak melakukan transaksi, bank gagal melakukan multi kredit, dan tidak dapat disalurkan (*hold*).

2. Pendidikan

Pemeriksaan tema pendidikan dengan fokus akses, kualitas, dan relevansi perguruan tinggi, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri pada 2 objek

pemeriksaan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan 5 objek pemeriksaan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH).

Lima PTNBH tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad). Satu kampus BLU adalah Universitas Sriwijaya (Unsri), dan 1 PTN berstatus satker yaitu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ).

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan perguruan tinggi negeri pada 7 objek pemeriksaan mengungkapkan 102 temuan yang memuat 204 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 88 kelemahan sistem pengendalian intern, 110 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp70,68 miliar dan 6 permasalahan 3E senilai Rp8,53 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, PTN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran kas negara sebesar Rp4,72 miliar.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset pada 1 PTN telah sesuai dengan kriteria, pada 4 PTN telah sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material kecuali pada permasalahan tertentu, dan pada 2 PTN belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan PTN, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E).

3. Mental dan Karakter

BPK melakukan pemeriksaan atas tema mental dan karakter dengan fokus penyelenggaraan ibadah haji pada 2 objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian Agama. Penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 1439H/2018M telah sesuai dengan ketentuan tentang penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dalam semua hal

yang material. Pengelolaan keuangan operasional haji tahun 1439/2018M sampai dengan 30 September 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material

Namun BPK menemukan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E.

4. Ketersediaan Pangan

BPK melakukan pemeriksaan atas tema ketersediaan pangan dengan fokus pada pemeriksaan atas perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit, serta pemanfaatan dana pungutan ekspor produk kelapa sawit, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan terkait kehutanan dan perkebunan. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan signifikan terkait perizinan, sertifikasi, dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah terdapat kebun kelapa sawit seluas 2,74 juta ha berada dalam kawasan hutan yang perlu ditetapkan penyelesaian statusnya. Hal ini mengakibatkan kawasan hutan tidak dapat menjalankan fungsi produksi, perlindungan dan pengawetan ekosistem. Untuk itu, Menteri LHK perlu menetapkan mekanisme penyelesaian dan pengendalian penggunaan kawasan hutan terutama yang digunakan untuk kebun sawit.

5. Pembangunan Kewilayahan

Pemeriksaan atas tema pembangunan kewilayahan dengan

fokus perumahan, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan rumah susun sewa (rusunawa) pada 1 objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian PUPR. Pemerintah memiliki program pembangunan sejuta rumah setahun pada tahun 2015-2019, salah satunya dalam bentuk Rusunawa atau Rumah Susun Sewa.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pembangunan rusunawa tahun anggaran 2014–2016 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang diatur dalam kontrak. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan rusunawa, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut di antaranya, lokasi pembangunan untuk 3 rusunawa Sulawesi 2 harus dimatangkan sehingga perlu anggaran tambahan, 14 unit rusunawa di Sumbar dan NTB telah dimanfaatkan penerima, namun Kementerian PUPR masih menanggung biaya pemeliharannya.

6. Tata Kelola Reformasi Birokrasi

Pemeriksaan atas tema tata kelola dan reformasi birokrasi berfokus pada kualitas pelayanan publik, yaitu pemeriksaan atas perizinan dan pengawasan tenaga kerja asing di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Kesimpulan hasil pemeriksaan BPK adalah pelaksanaan perizinan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sudah sesuai dengan peraturan-peraturan Menteri Ketenagakerjaan, namun pelaksanaan pemberian izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) tidak sesuai dengan peraturan Menaker. Secara keseluruhan hasil pemeriksaan perizinan dan pengawasan TKA mengungkapkan 8 temuan yang memuat 10 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern.

B. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah, BUMD, BLUD

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD terkait dengan tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara, (2) Pembangunan Kewilayahan, dan (3) Penanggulangan Bencana.

Pada Pemkot Makassar terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp643,97 miliar yang terdiri atas pendapatan pajak daerah beserta dendanya, seluruhnya sebesar Rp604,88 miliar, dan pembagian laba bersih PDAM sebesar Rp39,09 miliar.

Pada Pemkot Semarang, terdapat pendapatan yang belum diterima sebesar Rp3,94 miliar yang berasal dari kerja sama pmda dengan pihak ketiga dan dari pajak dan retribusi daerah, serta terdapat penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp1,47 miliar tidak disetor ke kas daerah.

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada BUMN dan badan lainnya terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan, yang dilakukan atas 35 objek pemeriksaan, menyimpulkan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 34 (97%) objek pemeriksaan dan 1 (3%) objek pemeriksaan tidak sesuai dengan kriteria.

No	Tema	TGTDA				Ketepatan Dalam Pengendalian Intern	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan	Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis		Terdapat temuan yang telah diungkap dalam pemeriksaan	
		PTT Temuan	PTT Rekomendasi	PTT Perbaikan	Nilai Temuan	PTT permasalahan	PTT perbaikan	Nilai Temuan	PTT perbaikan	Nilai Temuan	PTT perbaikan
A. Perekonomian dan Keuangan Negara											
1	Penghasilan Pendapatan	118	380	136	636.665,84	123	72	636.665,84	1	-	19.031,38
2	Penghasilan Belanja	889	1.749	1.649	326.506,84	120	889	315.354,92	36	11.343,92	49.005,48
3	Penghasilan Aset	138	488	214	9.135,86	100	110	9.135,86	4	-	7,03
4	Operasional BUKD dan BUKD	84	261	133	11.787,58	84	61	7.288,62	8	4.897,77	84,12
B. Pengembangan Kesejahteraan											
1	Penghasilan Keuangan Desa	11	19	23	1.400,77	8	14	1.627,33	1	32,84	1,91
2	Penghasilan Sektor Rakyat	49	133	23	3.788,64	41	34	2.232,19	3	554,41	81,09
C. Pemangggulangan Bersama											
1	Pemangggulangan Bersama Daerah	30	143	73	-	30	21	-	17	-	-

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 448 temuan yang memuat 766 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 362 kelemahan sistem pengendalian intern, 357 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,78 triliun, dan 47 permasalahan ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E) senilai Rp705,97 miliar.

Tabel
Rekapitulasi
Hasil
Pemeriksaan
DTT pada
Pemerintah
Daerah
Menurut Tema
Pemeriksaan
(Nilai dalam
Rp Juta)

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

Pemborosan keuangan PT Pabrik Gula Rajawali II senilai Rp330,44 miliar, terdiri atas biaya pinjaman Kredit Modal Kerja yang belum dilunasi senilai Rp192,72 miliar, biaya pemeliharaan dan pengamanan dari penjarahan lahan pada Pabrik Gula Jatitujuh senilai Rp125,77 miliar, serta ketidakhematan lainnya sebesar Rp11,95 miliar.

Pada Perum Perumnas, terdapat piutang usaha berpotensi tidak tertagih senilai Rp184,62 miliar yaitu terdiri atas piutang usaha perorangan (kekurangan uang muka, kelebihan luas tanah, dan cicilan tunai rumah dan kavling tanah matang), piutang usaha badan/instansi, piutang Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP)/Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan piutang Kerja Sama Usaha (KSU).

Kekurangan penerimaan PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp135,80 miliar, terdiri atas piutang dan bunga keterlambatan kepada mitra usaha, pendapatan pengelolaan parkir, kerja sama pengelolaan *General Aviation Terminal* (GAT) di Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta kekurangan penerimaan lainnya.

Pada PT Pertamina (Persero) diketahui terdapat realisasi dan potensi *return* kargo *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dari Kilang *Liquefied Natural Gas* (LNG) Badak kepada PT Pertamina belum diperhitungkan sebagai penambah pendapatan LNG Muara Bakau minimal sebesar Rp592,56 miliar, dan potensi kerugian atas pembelian LPG yang tidak sesuai spesifikasi kebutuhan Kilang LNG Badak mengurangi pendapatan penjualan LNG ENI Muara Bakau maksimal sebesar Rp222,65 miliar. Selain itu, pengenaan PPN atas penjualan LPG PT Pertamina untuk keperluan *inject* LNG kepada ENI Muara Bakau sebesar Rp118,34 miliar belum ditentukan statusnya.

5. Pemeriksaan Investigatif yang Dilaksanakan Tahun 2018

No	Uraian/ Keterangan/ Lokasi/ Objek Perfekt Program	TOTAL				Keterlambatan Penghapusan Utang		Ketidagunaan Nilai Pembayaran Utang		Dumenu, Aktiva dan Ekuitas		Nilai Pembayaran Utang yang tidak tergantung pada peristiwa
		2017 Saldo Awal	2017 Saldo Akhir	2017 Saldo Akhir	Nilai Tertutup	2017 Saldo Awal	2017 Saldo Akhir	2017 Saldo Awal	2017 Saldo Akhir	2017 Saldo Awal	2017 Saldo Akhir	
A. Pembiayaan dan Keuangan Negara												
1	Pendapatan, Baku, dan Investasi BUMN	376	1.006	655	1.975.385,14	312	304	1.377.267,47	38	697.917,47	--	10.027,34
2	Penerimaan dan Penghasilan Pembiayaan Pungutan Dinas/ Jasa Keuangan	4	10	9	--	7	1	--	1	--	--	--
3	Penerimaan Pembiayaan Bank pada Lembaga Keuangan Pemerintah	10	25	24	7.987,66	14	10	7.987,66	--	--	--	--
4	Penghasilan Investasi, Aset Tetap, Aset Baku, dan Serta Baku pada BNS/ Kantor	14	17	11	1.893,37	6	11	1.978,11	1	105,28	--	--
5	Penghasilan Investasi, Aset Tetap dan Baku pada BNS Monev/Keuangan	14	28	19	1.365,51	9	8	1.465,34	2	13,36	--	--
6	Saluran, Proyek, Kantor, dan Penerimaan Baku pada KKS serta Monev/ dan Baku Negara	28	82	40	3.506.233,04	14	22	2.498.324,53	4	7.918,11	--	--
Total		448	1.208	769	3.492.280,73	343	337	2.786.300,11	47	705.076,42	--	10.027,34

Nilai wajar telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

Tabel Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan (Nilai dalam Rp Juta)

Pemeriksaan investigatif dilakukan BPK untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/ daerah dan/atau unsur pidana. Pemeriksaan investigatif dapat dilakukan atas inisiatif BPK berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya atau atas permintaan dari instansi berwenang dan lembaga perwakilan. Sepanjang tahun 2018, BPK melakukan 12 pemeriksaan investigatif.

A. Pemeriksaan Investigatif pada Pemerintah Pusat

Pada semester I dan II tahun 2018, tidak terdapat kasus pada pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif oleh BPK. Namun demikian, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 18 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang

Pemeriksaan Investigasi				Nilai Kerugian (Rp miliar)		
Periode	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	BUMN	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	BUMN
Semester I	0	4	4	0	220,69	2.810
Semester II	0	1	3	0	0,071	1.140

Tabel Pemeriksaan Investigatif Tahun 2018

dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara itu, 4 di antaranya dilaksanakan pada Semester I tahun 2018 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp42,35 miliar. Sebagai tindak lanjut dari PKN ini, BPK juga telah memberikan keterangan ahli sebanyak 17 kali pada 13 kasus di lingkungan pemerintah pusat baik pada tahap penyidikan maupun pada persidangan tindak pidana korupsi.

Pada semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 14 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp177,64 miliar. Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 20 kali pada 15 kasus di tahap penyidikan serta 11 kali pada 8 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

B. Pemeriksaan Investigatif pada Pemerintah Daerah

Pada semester I tahun 2018, BPK melaksanakan 4 pemeriksaan investigatif pada pemda atas inisiatif BPK dan permintaan instansi yang berwenang. Indikasi pidana dengan nilai indikasi kerugian negara/ daerah sebesar Rp220,69 miliar. Laporan hasil pemeriksaan investigatif tersebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Pada semester II tahun 2018, BPK melaksanakan 1 pemeriksaan investigatif pada pemerintah daerah atas permintaan instansi yang berwenang. Nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp71,23 juta. Laporan investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Pada semester I dan II tahun 2018, BPK menyelesaikan dan menerbitkan 56 laporan penghitungan kerugian negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/

daerah sebesar Rp354,85. PKN ini terdiri atas 22 laporan pada semester I dengan indikasi kerugian Rp228,51 miliar, dan 34 laporan pada semester II dengan indikasi kerugian Rp126,34 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK pada semester I tahun 2018 juga telah memberikan keterangan ahli sebanyak 53 kali pada 47 kasus di lingkungan pemda dan BUMD baik pada tahap penyidikan maupun pada persidangan tindak pidana korupsi. Pada Semester II tahun 2018, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemda dan BUMD sebanyak 52 kali pada 40 kasus di tahap penyidikan serta 47 kali pada 34 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

C. Pemeriksaan Investigatif pada BUMN

Pada tahun 2018, BPK melaksanakan 7 pemeriksaan investigatif pada BUMN. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada semester I sebanyak 4 LHP yang mengandung indikasi pidana dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp2,81 triliun. Pemeriksaan investigatif pada BUMN atas permintaan dari instansi yang berwenang dan DPR.

Pada semester II tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada BUMN atas permintaan DPR dan inisiatif BPK. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 3 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp1,14 triliun. Laporan hasil pemeriksaan investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Pada Semester I tahun 2018, BPK juga telah menyelesaikan dan menerbitkan 5 laporan penghitungan kerugian negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp2,63 triliun. Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK memberikan keterangan ahli sebanyak 10 kali pada 8 kasus di lingkungan BUMN baik pada tahap penyidikan maupun pada persidangan tindak pidana korupsi.

Sementara pada semester II tahun 2018, BPK menyelesaikan

dan menerbitkan 6 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp323,71 miliar. Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK memberikan keterangan ahli di lingkungan BUMN sebanyak 13 kali pada 10 kasus di tahap penyidikan serta 5 kali pada 4 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

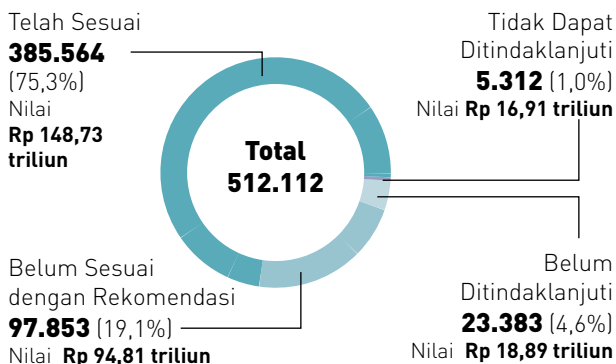
6. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

BPK melakukan pemantauan terhadap rekomendasi atas hasil pemeriksaan yang diberikan kepada pemangku kepentingan BPK. Hasil pemantauan BPK ini terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah, dan pemantauan penanganan temuan pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada instansi berwenang.

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2018 atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan periode 2005-2018. Pada periode ini, BPK telah menyampaikan 512.112 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa senilai Rp280,34 triliun.

Dalam IHPS I Tahun 2018, dimuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2005-30 Juni 2018 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan senilai Rp2,68 triliun. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2018 berupa angsuran senilai Rp223,11 miliar (8%), pelunasan senilai Rp785,93 miliar (29%), dan penghapusan senilai Rp77,03 miliar (3%). Sisa kerugian senilai Rp1,59 triliun (60%).

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2018 senilai Rp2,80 triliun. Tingkat penyelesaian sampai 31 Desember 2018 berupa angsuran senilai Rp231,23 miliar (8%), pelunasan senilai Rp872,18 miliar (31%), dan penghapusan



Grafik Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-2018

senilai Rp77,05 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp1,62 triliun (58%).

Pada periode 2017-2018, BPK menyampaikan 15 laporan hasil Pemeriksaan Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,32 triliun dan 166 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp10,18 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah memberikan keterangan ahli dalam 117 kasus pada tahap persidangan.

Pemeriksaan Investigatif (PI)

PI yang telah disampaikan



PI yang dimanfaatkan dalam proses penyelidikan

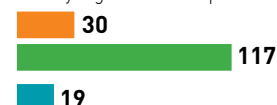


PI yang dimanfaatkan dalam proses penyidikan

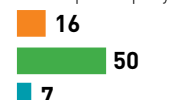


Penghitungan Kerugian Negara (PKN)

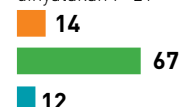
PKN yang telah disampaikan



PKN yang dimanfaatkan dalam proses penyelidikan

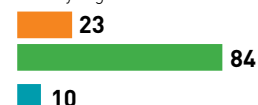


Kasus PKN yang sudah dinyatakan P-21

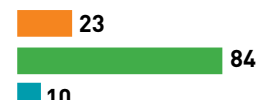


Pemberian Keterangan Ahli (PKA)

PKA yang telah dilaksanakan



PKA yang telah digunakan dalam tuntutan oleh JPU



■ Pemerintah Pusat
■ Pemerintah Daerah dan BUMD
■ BUMN

Grafik Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-2018 oleh Instansi yang Berwenang per 31 Desember 2018



BAB 2 **AKSES TERHADAP** **KETERBUKAAN** **INFORMASI PUBLIK**

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di BPK

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan ini diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, yang hasilnya diserahkan kepada DPR, DPRD, DPD dan Presiden.

Selain itu, BPK yang juga berfungsi sebagai lembaga publik, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut ke masyarakat. Sebagaimana diketahui, BPK berdasarkan kategori lembaga publik yang dibuat Komisi Informasi Publik, termasuk dalam Badan Publik Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNLPNK). Badan Publik lainnya adalah Badan Publik Kementerian, Badan Publik Lembaga Non Struktural (LNS), Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Badan Publik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Publik Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan Badan Publik Partai Politik (Parpol).

BPK telah menjalankan fungsinya sebagai badan publik dalam hal keterbukaan informasi publik. Seluruh hasil pemeriksaan secara terbuka diumumkan ke masyarakat





melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II yang disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah setiap tahunnya.

Hasil pemeriksaan berupa temuan-temuan, yang diduga merugikan keuangan negara maupun kemajuan lembaga yang diperiksa dalam hal tata kelola keuangan, juga disiarkan ke masyarakat melalui media pers, media sosial maupun *website* resmi BPK.

Upaya BPK dalam mengelola keterbukaan informasi publik ini tidak sia-sia. Pada bulan November 2018, BPK memperoleh kualifikasi sebagai Badan Publik Menuju Informatif untuk Kategori Badan Publik Lembaga Negara pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik (KIP).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua KIP, Gede Narayana kepada Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Anugerah ini diberikan kepada Badan-badan Publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi melalui badan publik masing-masing.

Penganugerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada BPK oleh Komisi Informasi Publik diserahkan langsung oleh Ketua KIP, Gede Narayana.

Piagam penghargaan dari Komisi Informasi Publik



90-100
Informatif



80-89,9
Menuju
Informatif

60-79,9
Cukup
Informatif

40-59,9
Kurang
Informatif

39,9
Tidak
Informatif

Penilaian KIP terhadap badan publik dibagi atas lima kategori yaitu Informatif (dengan nilai 90-100), Menuju Informatif (80-89,9), Cukup Informatif (60-79,9), Kurang Informatif (40-59,9) dan Tidak Informatif (kurang dari 39,9). Ini artinya selangkah lagi BPK mencapai posisi teratas sebagai Badan Publik yang Informatif.

Ini bukan penghargaan pertama yang diterima BPK dalam hal keterbukaan informasi publik. Pada 2015, BPK memperoleh peringkat ke-8 untuk Kategori Badan Publik Lembaga Negara pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. Anugerah ini diberikan Komisi Informasi Pusat (KIP) kepada Badan-badan Publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi.

2. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi bukan hal baru bagi BPK. Bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK telah melaksanakan keterbukaan informasi hasil pemeriksaan sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi makin mendorong BPK semakin terbuka dalam pengelolaan informasi, dalam hal ini Hasil Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah dan lembaga negara. Apalagi BPK menyadari bahwa Hasil Pemeriksaan sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

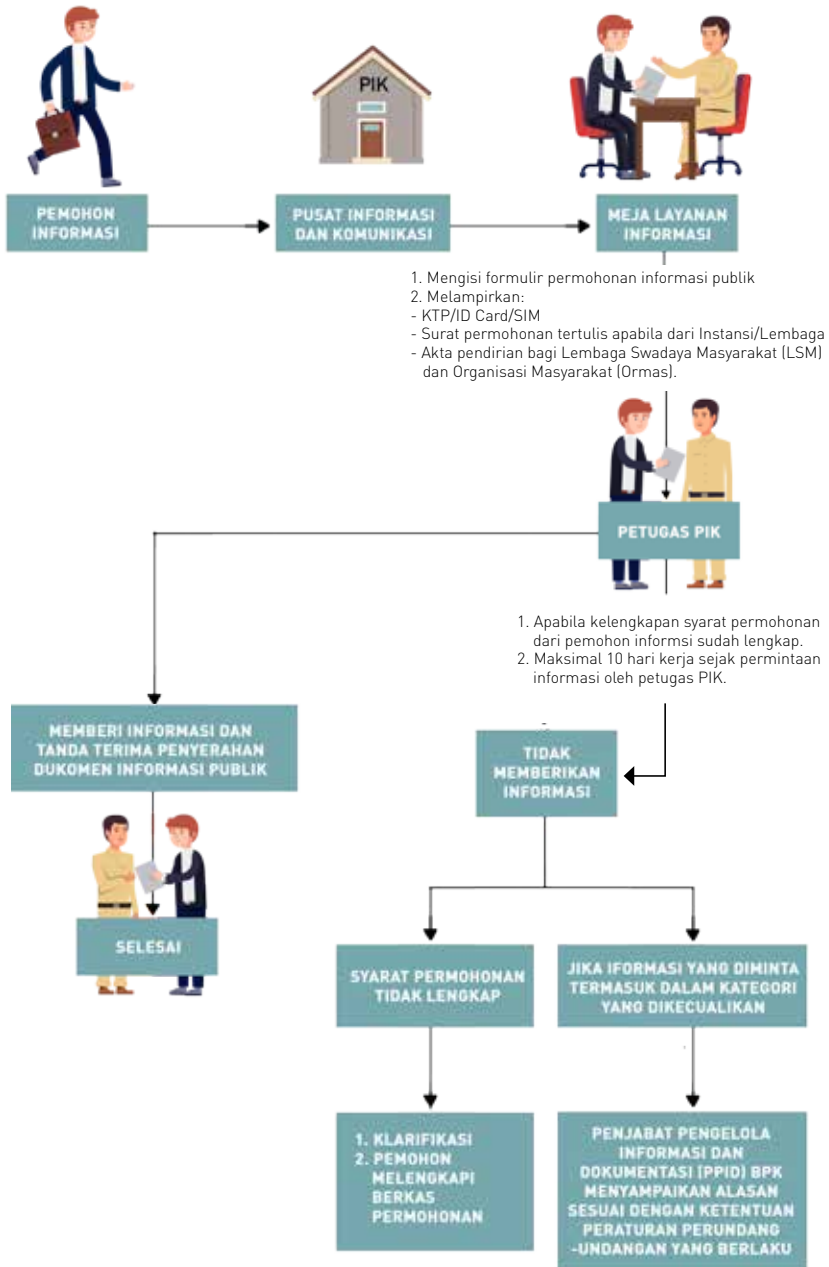
Informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan di era media sosial saat ini. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar agar tidak terjebak dalam lingkaran kabar hoaks yang sangat mudah menyebar. Apalagi keterbukaan informasi juga berdampak positif bagi BPK karena akan menguatkan Independensi, Integritas dan Profesionalisme para pemeriksa. Informasi yang mudah diakses ini pada akhirnya juga ikut mempercepat terbentuknya *good governance* di kalangan pengelola keuangan negara.

Pelayanan informasi untuk masyarakat ini menjadi tanggung jawab Pusat Informasi dan Komunikasi, yang berada di bawah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan bisa diakses masyarakat melalui *website* resmi BPK <http://bpk.go.id> sepanjang waktu. Selain LHP, data lain yang bisa diakses adalah semua informasi tentang BPK mulai dari informasi umum seperti nama-nama anggota BPK, visi, misi, sejarah sampai dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Masyarakat cukup mengakses

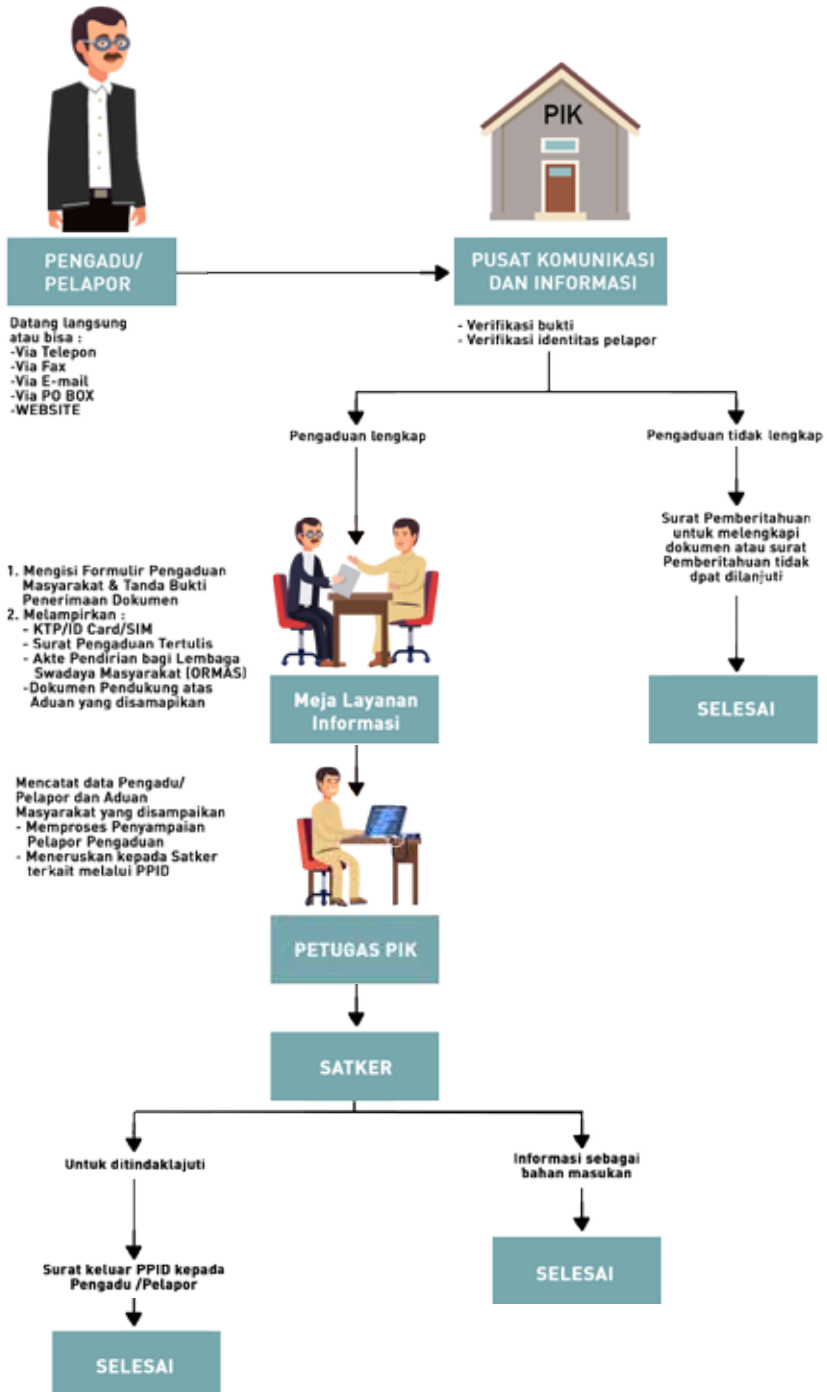
Berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan bisa diakses masyarakat melalui *website* resmi BPK <http://bpk.go.id>



ALUR PERMINTAAN INFORMASI



ALUR PENGADUAN MASYARAKAT



situs resmi BPK, tanpa harus datang ke Kantor Pusat BPK. Namun jika informasi yang diperlukan tidak tersedia di *website* BPK, masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi ke PIK, baik secara *offline* maupun *online*.

PPID BPK melaksanakan 3 (tiga) fungsi pelayanan informasi publik, yaitu pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan keberatan atas informasi. Secara *online*, masyarakat bisa mengajukan permohonan, pengaduan, dan keberatan melalui email ***eppid@bpk.go.id***, atau melalui aplikasi SIPADU dan e-PPID.

Meski begitu, BPK juga menyiapkan layanan permintaan informasi secara *offline*. Pemohon bisa datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) di kantor pusat BPK di Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210. PIK BPK melayani masyarakat pada hari kerja pukul 09.00-15.00. Masyarakat juga bisa menghubungi PIK melalui telepon 021-2554900 ext 3912, faksimili 021-57950288, mengirim surat melalui PO Box 4300 Jkt 10043, atau email ***eppid@bpk.go.id***.

3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan informasi publik di BPK dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). PIK BPK menjalankan tugas teknis PPID dalam melayani permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat.

Dalam perkembangan pelayanan publik di BPK, saat ini telah terdapat pelayanan *online* melalui e-PPID dan SIPADU (Sistem Pemantauan Aplikasi Pengaduan) yang mempermudah publik mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduannya.

Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan BPK mendapat sambutan dari masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah permintaan informasi maupun pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK.

Pada tahun 2018, permintaan informasi dan pengaduan mencapai 1.380, yang terdiri atas 1.115 permintaan informasi, 265 pengaduan masyarakat, dan 1 keberatan atas informasi. Rata-rata pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi antara 1 sampai 2 hari kerja.

Permintaan atas informasi berkala		878	78,7%	
4	0,4%	Permintaan atas informasi setiap saat		
8	0,7%	Permintaan atas informasi dikecualikan		
0%		Permintaan atas informasi dikecualikan		
225		20,2%	Permintaan atas informasi lainnya	

Dari seluruh permohonan informasi sepanjang 2018, terbanyak terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yaitu sebanyak 878 (78,7%). Sebanyak 8 permintaan informasi terkait informasi yang dikecualikan (0,7%), 4 tentang informasi setiap saat, dan 225 permintaan atas informasi lain-lain di luar kategori topik permintaan informasi yang ada (20%).

Jenis
permintaan
informasi

Adapun dari 265 pengaduan yang masuk, sebanyak 169 (64%) terkait entitas pemeriksaan BPK. Sebanyak 8 (3%) terkait non-pemeriksaan, dan 88 (33%) terkait lain-lain.

169		64%	Pemeriksaan
8	3%	Non Pemeriksaan	
0%		Dikecualikan	
88		33%	Lain-lain

Sebagian besar pengaduan masyarakat, yaitu 193 (73%), tidak dapat ditindaklanjuti. Hal ini karena pengaduan tidak memenuhi kriteria tanggapan atas pengaduan masyarakat yang telah ditetapkan oleh PPID BPK Pusat. Terdapat

Jenis
pengaduan
masyarakat

sebanyak 38 (14%) pengaduan yang digunakan sebagai informasi bagi satker terkait di BPK, dan sebanyak 34 (13%) pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti oleh PPID BPK Pusat.

38	14%	Sebagai Informasi Satker
Tidak dapat ditindaklanjuti	197	73%
34	13%	Untuk ditindaklanjuti Satker

Tanggapan
Pengaduan
Masyarakat

Pada tahun 2018, terdapat setidaknya 3 (tiga) topik pengaduan masyarakat yang paling sering disampaikan kepada PPID BPK Pusat. Topik-topik pengaduan tersebut beserta jumlahnya sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Pengaduan terkait dugaan penyimpangan paket pekerjaan pada pemerintah Pusat/Daerah

35	44%
Dugaan penyimpangan anggaran pada Satker Pusat/Daerah	
28	36%

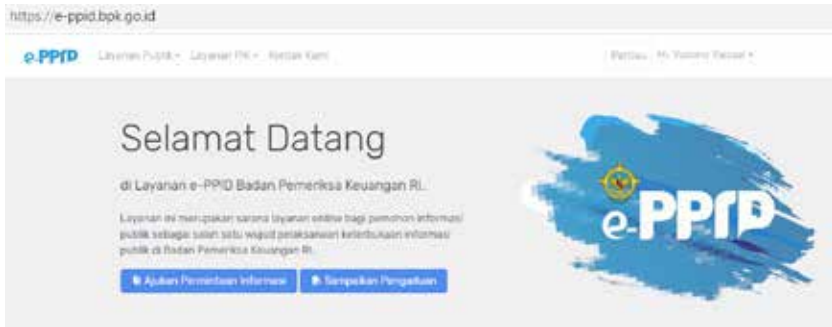
Pengaduan Masyarakat yang paling sering muncul

16	20%
-----------	------------

Topik
pengaduan
masyarakat
yang paling
sering muncul

Sedangkan 1 keberatan yang masuk berkaitan dengan permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Pusat Olahraga Hambalang Tahun Anggaran 2012-2017, yang tidak bisa diberikan BPK. Keberatan pemohon karena Komisi Informasi Pusat sebelumnya menyatakan audit Hambalang adalah informasi terbuka.

Dalam jawabannya, BPK menyatakan LHP Investigasi Hambalang bukan merupakan informasi terbuka karena keputusan KIP tersebut dinyatakan batal oleh PTUN.



4. E-PPID dan SIPADU

Pengelolaan informasi publik di BPK dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). PIK BPK menjalankan tugas teknis PPID dalam melayani permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat.

Pada awal tahun 2018, BPK melakukan terobosan baru untuk semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik dari BPK dengan prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. BPK membuat media pelayanan pengaduan masyarakat berupa aplikasi *mobile* berbasis android bernama SIPADU (Sistem Pemantauan Aplikasi Pengaduan). Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan leluasa menyampaikan pengaduannya kepada BPK hanya dengan mengunduh aplikasi SIPADU di Play Store dan registrasi.

Selain itu, BPK juga membuat media penyampaian permintaan informasi publik, pengaduan masyarakat, dan penyampaian keberatan atas informasi secara *online* melalui *website* <https://e-ppid.bpk.go.id>. Melalui kedua media ini, BPK berharap agar antusiasme masyarakat untuk bertanya kepada BPK dapat difasilitasi dengan baik. Peminta informasi publik dan pengadu dapat memperoleh informasi publik yang dikehendaki maupun menyampaikan pengaduannya dengan mudah dan bebas biaya.

Terobosan ini mendapat sambutan dari masyarakat. Pada tahun 2018, dari 265 pengaduan yang masuk, sebagian

Media penyampaian permintaan informasi publik, pengaduan masyarakat, dan penyampaian keberatan atas informasi secara *online* melalui *website* <https://e-ppid.bpk.go.id>.

13	5%	Surat
77	29%	E-mail
91	34%	Website/e-PPID
62	24%	Sipadu
22	8%	PIK

Media yang dipakai masyarakat mengajukan pengaduan

besar masyarakat (58 %) memanfaatkan *website* e-PPID dan aplikasi SIPADU. Pengaduan lainnya diajukan melalui *e-Mail*, surat konvensional dan datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi.

Begitu juga dengan pemohon informasi. Masyarakat yang datang langsung ke PIK masih menempati posisi teratas, namun pemohon informasi yang memanfaatkan e-PPID cukup banyak yakni mencapai 21,2 % dari 1.115 permintaan informasi.

466	41,8%	Datang langsung ke PIK
401	35%	Melalui E-mail
236	21,2%	Melalui e-PPID
10	0,9%	Melalui Surat/Fax/PO BOX
2	0,2%	Melalui Website

5. Pengelolaan Website dan Media Sosial

Media yang dipakai pemohon informasi

BPK RI menyebarkan hampir semua hasil pemeriksaan melalui *website* <http://bpk.go.id> yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja sama Internasional. Meski situs web ini sangat komunikatif, cepat dan akurat dalam memberikan informasi tentang BPK dan hasil kerjanya, namun di era media sosial ini BPK tidak bisa lagi hanya mengandalkan situs web untuk menjangkau masyarakat terutama kaum milenial. Itu sebabnya, BPK juga aktif

memasyarakatkan hasil pemeriksaan melalui media sosial. Selain memberikan informasi, media sosial BPK juga aktif berinteraksi dengan para *follower*, termasuk menjawab banyak pertanyaan seputar hasil pemeriksaan.

BPK mempunyai akun di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, serta YouTube. Tidak seperti di *website* atau pelayanan *offline* melalui PIK yang menggunakan bahasa formal, pengelola media sosial BPK tampil lebih “gaul” dengan menggunakan bahasa yang lebih informal. Meski begitu, informasi yang disampaikan tetap akurat, penting dan terpercaya.

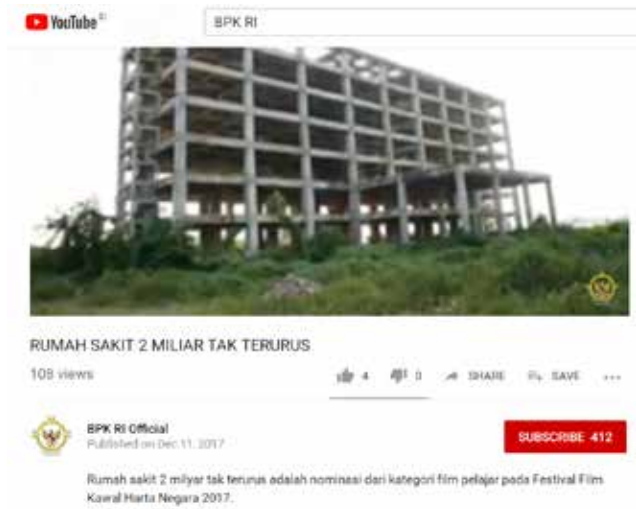
Di akun Twitter @ **bpkri**, BPK menginformasikan berbagai kegiatan dengan bahasa yang ringkas dan informatif. Sejak bergabung pada 2010, akun milik BPK ini telah *men-tweet* tidak kurang dari 13 ribu kali. *Follower*-nya kini sudah mencapai hampir 86 ribu.

6. Instagram BPK RI



Akun Instagram BPK, @**bpkriofficial**, juga aktif menjalin komunikasi dengan publik. Sejak bergabung di Instagram dua tahun lalu, pengikut BPK sudah 12.500 lebih. Angka-angka hasil pemeriksaan yang bisa membuat kening

Akun Youtube
milik BPK RI



mengerut, disajikan dalam infografis segar namun tetap informatif dan interaktif.

Akun Facebook BPK, Badan Pemeriksa Keuangan RI, juga aktif mengabarkan berbagai kegiatan melalui berita foto dan

video. Akun Youtube BPK, BPK RI, aktif mengunggah video kegiatan yang banyak menarik minat kaum muda.

7. Penyebarluasan Informasi

Badan Pemeriksa Keuangan dalam perannya sebagai lembaga publik, aktif menyebarkan informasi ke masyarakat menyangkut berbagai tugas dan kewenangannya sebagai pemeriksa keuangan negara. Publikasi kegiatan ini dilakukan melalui berbagai media komunikasi, baik secara digital maupun cetak, serta dalam bentuk acara tatap muka.

Penyebaran informasi secara digital dilakukan BPK melalui *website* resmi <http://bpk.go.id>, yang bisa diakses oleh masyarakat. Di situs resmi ini, selain profil BPK, juga disajikan semua kegiatan dan hasil pemeriksaan seperti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Tahunan, sampai Pendapat BPK.

Untuk penerbitan media cetak, BPK mempunyai Majalah Warta Pemeriksa. Majalah bulanan ini memuat isu-isu terkini terkait pemeriksaan BPK, kegiatan-kegiatan BPK, baik yang terkait pemeriksaan maupun aktivitas lain seperti bakti masyarakat. Majalah ini juga dibuat dalam edisi *online* dan dimuat di situs resmi BPK. BPK juga menerbitkan seri buku panduan populer berisi informasi mengenai BPK dan kegiatannya. Salah satu buku seri ini adalah Mengenal Lebih Dekat BPK, yang dibuat dalam ukuran saku dengan bahasa populer sehingga mudah dipahami masyarakat awam.

BPK bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, yang memuat berbagai topik sekitar pemeriksaan. Tujuan publikasi jurnal ini adalah untuk mendukung pelaksanaan mandat dan tujuan strategis BPK melalui makalah ilmiah, menambah sumber referensi tentang tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara, dan mendorong penelitian di bidang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Jurnal ini ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris.

BPK secara rutin juga menerbitkan Buku Laporan Tahunan berisi kegiatan dan pencapaian BPK dalam satu tahun, termasuk ringkasan laporan hasil pemeriksaan. Semua terbitan BPK ini disebarkan ke masyarakat secara gratis dan bisa dinikmati di perpustakaan BPK, atau perpustakaan



Buku Laporan Tahunan BPK 2017 dan Majalah Warta Pemeriksa dalam bentuk PDF yang bisa diunduh di laman bpk.go.id

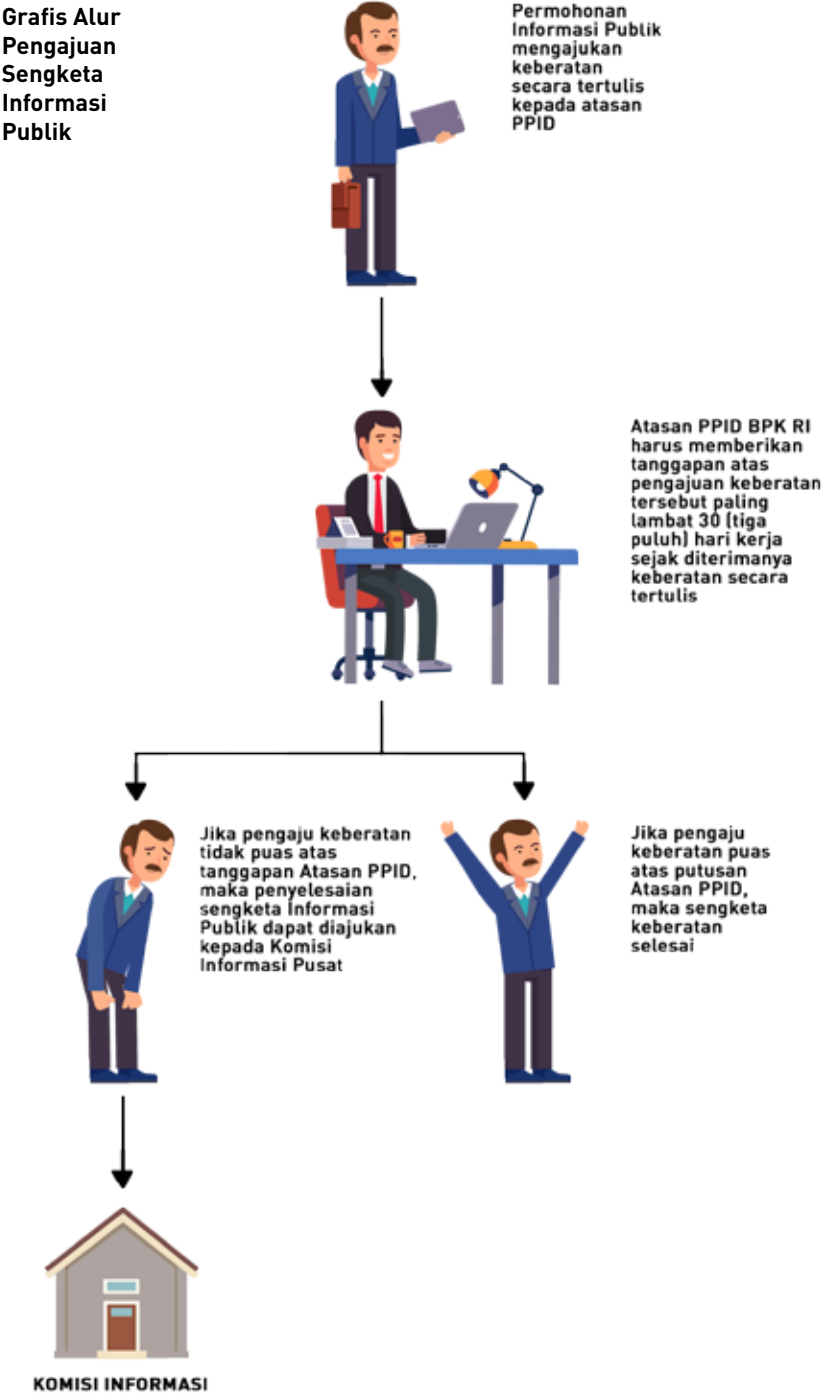


umum dan sekolah. Untuk memperluas jangkauan, buku dan majalah ini dimuat dalam versi *online* di situs web BPK.

Di samping itu, BPK juga aktif melakukan berbagai *event* untuk menyebarkan informasi. Salah satunya adalah pembuatan festival film pendek bertema Kawal Harta Negara. Bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID)-CEGAH, BPK mengadakan festival ini dengan melibatkan pelajar, mahasiswa, dan para pembuat film muda. Sejumlah *roadshow* digelar ke kampus-kampus untuk memperkenalkan *event*, yang sekaligus bisa mendekatkan BPK ke kaum muda.

Kegiatan untuk menyebarkan informasi mengenai BPK juga dilakukan dengan cara menggelar acara BPK Goes to Campus dan Goes to School. Kegiatan yang menyasar mahasiswa dan murid sekolah menengah atas ini dilakukan dengan mendatangi kampus dan sekolah. Salah satu acara BPK Goes to School ini dilaksanakan di Pesantren Persatuan Islam (PPI) 3 Pameungpeuk, Jawa Barat, pada 7 Maret 2018. Tema yang diusung adalah “Sinergi BPK, DPR dan Akademisi dalam Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara”.

**Grafis Alur
Pengajuan
Sengketa
Informasi
Publik**





BAB 3 **PENGUATAN** **ORGANISASI** **DAN KELEMBAGAAN**

1. Majelis Kehormatan Kode Etik BPK

Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) adalah alat kelengkapan BPK yang bertugas untuk menegakkan Kode Etik. MKKE, yang dibentuk sebagai amanat dari Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini, merupakan organ utama dalam menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

Peran utama MKKE dalam penegakan nilai-nilai dasar merupakan modal dalam pencapaian visi dan misi BPK, dengan tetap menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK.

Anggota MKKE terdiri dari dua Anggota BPK, satu unsur profesi, dan dua akademisi adalah:

Anggota
MKKE Berfoto
bersama
pimpinan
BPK setelah
pelantikan
Rabu, 10 April.



Ketua merangkap anggota: Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., C.A. (Anggota BPK)

Anggota:

1. Ir. Isma Yatun, M.T.(Anggota BPK)
2. Dr. Jusuf Halim, S.E., Ak., M.H, C.A (Profesi)
3. Prof. Dr. Rusmin , M.B.A. (Akademisi)
4. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. (Akademisi)

Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang MKKE mengacu pada Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Pembentukan MKKE ini untuk mengawal tiga nilai dasar BPK, yang menjadi dasar kode etik di BPK yaitu integritas, independen dan profesional. Kode etik BPK bertujuan untuk mewujudkan Anggota BPK dan pemeriksa yang berintegritas, independen dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

Masa jabatan anggota MKKE adalah 2 tahun 6 bulan, dan dalam menjalankan tugasnya anggota MKKE dibantu oleh panitera dan Tim Kode Etik. Anggota MKKE dipilih dalam sidang BPK.

MKKE mempunyai fungsi untuk menegakkan kode etik dan tugasnya adalah untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik. MKKE menjalankan tugasnya secara independen.

MKKE mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, Anggota BPK, dan pemeriksa. MKKE menggelar sidang jika ada pelaporan dugaan pelanggaran kode etik atau telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik. Sumber laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik bisa berasal dari masyarakat, internal BPK atau dari aparat penegak hukum.



2. Inspektorat Utama BPK

Inspektorat Utama (Itama) adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BPK melalui Wakil Ketua BPK. Itama mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur Pelaksana BPK.

Itama terdiri atas:

- a. Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- b. Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan; dan
- c. Inspektorat Penegakan Integritas.

Meski merupakan bagian dari BPK, Itama dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Fungsi pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Utama sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan non-pemeriksaan, sehingga BPK dapat berjalan lebih efisien, efektif dan taat kepada peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan profesionalisme, staf di Itama menduduki jabatan fungsional pemeriksa, sehingga mempunyai kedudukan sejajar dengan pemeriksa BPK. Seperti dikatakan Ketua BPK, **Moermahadi Soerja Djanegara**, bahwa para pemeriksa Itama harus tetap memiliki skeptisme profesional, independen dan tidak bias. Di sisi lain pemeriksa Itama tidak boleh bersikap sewenang-wenang.

A. Pemeriksaan Inspektorat PKMP

1. Sosialisasi atas Kegiatan Pengawasan dan Reviu Itama

Sepanjang tahun 2018, Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP) melakukan sosialisasi di 3 satuan kerja perwakilan BPK sebagai bagian dari fungsi konsultasi Itama. Kegiatan ini bertujuan sebagai sistem pendeteksi dini sekaligus meningkatkan *awareness* bagi pemeriksa dalam upaya menghasilkan LHP yang sesuai




Standar Pemeriksaan Keuangan Negara		
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
95 orang	70 orang	176 orang

2. Penilaian Kualitas Hasil Pemeriksaan

Inspektorat PKMP juga mengadakan penilaian kualitas Hasil Pemeriksaan untuk mengetahui mutu pemeriksaan secara *bottom-up*, yaitu satker mengusulkan LHP yang dinilai paling baik *output* dan prosesnya. Langkah ini sejalan dengan tugas dan fungsi Itama sebagai *quality assurance* atas hasil pemeriksaan BPK.

Dari 100 LHP yang masuk, Inspektorat PKMP dibantu ahli bahasa dan ahli auditing melakukan penilaian tiga tahap dan menentukan 3 karya terbaik katagori Pusat dan Perwakilan untuk masing-masing jenis pemeriksaan.

Tabel
Sosialisasi
di 3 Satker
Perwakilan
BPK

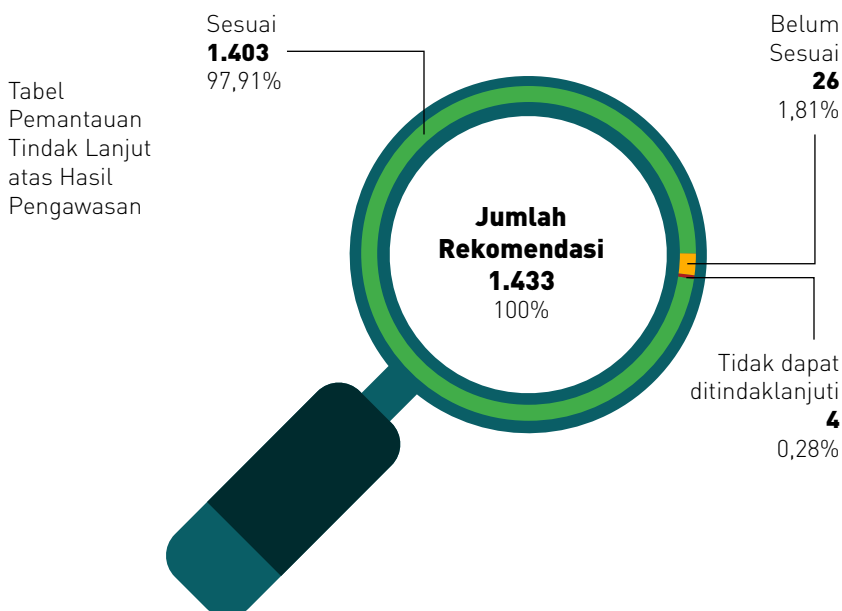


Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP yang Masuk	Jumlah LHP yang Lolos Seleksi Administrasi
Keuangan	41	40
Kinerja	26	26
PDTT	33	33
Jumlah	100	99

Tabel Penilaian Kualitas Hasil Pemeriksaan

3. Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan

Untuk menjalankan fungsi Inspektorat PKMP dalam pemerolehan keyakinan mutu kinerja pemeriksaan, khususnya tahap tindak lanjut, maka dilakukan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan. Kegiatan ini untuk memantau penyelesaian rekomendasi atas hasil pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Kinerja Pemeriksaan di satuan kerja berdasarkan reviu PKMP. Hasil pemantauan adalah 97,91 persen rekomendasi telah ditindaklanjuti.

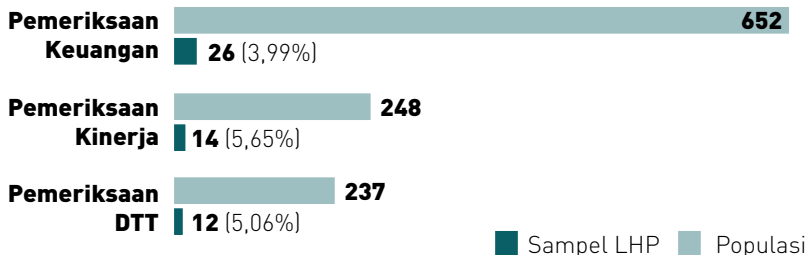
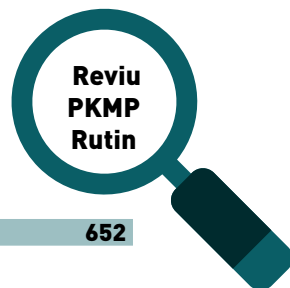


4. Reviu atas Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Untuk mendapatkan keyakinan mutu atas hasil kinerja pemeriksaan di lingkungan BPK, dilakukan Reviu PKMP dengan pendekatan *top-down*, yaitu Itama sebagai penentu satker pemeriksaan dan LHP. Reviu berdasarkan analisis berbasis risiko ini bertujuan memperoleh keyakinan apakah kegiatan pemeriksaan dan LHP telah sesuai standar dan pedoman BPK, serta memiliki mutu yang baik.

a. Reviu PKMP Rutin

Selama tahun 2018, Inspektorat PKMP melakukan reviu pada enam satker dan tujuh auditama keuangan negara, dengan hasil sebagai berikut:



b. Reviu Terintegrasi

Kegiatan *intergrated review* bertujuan memberikan keyakinan terbatas apakah pengendalian mutu kelembagaan, penugasan pemeriksaan dan nilai-nilai dasar telah diimplementasikan sesuai standar dan pedoman serta mengidentifikasi area perbaikan untuk peningkatan kualitas pemeriksaan.

Reviu ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan personel Inspektorat PKMP, Inspektorat PIMK, dan Inspektorat PI. Objek reviu adalah Pemeriksaan Fokus 6 Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Kesehatan Nasional, baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun JKN dan Non-PBI. Pemeriksaan ini dikoordinasi oleh Auditama Keuangan Negara VI.

Reviu terintegrasi tahun 2018 mencakup uji petik atas empat pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Program JKN di RSUP Sanglah tahun 2015 sampai dengan Semester I 2016
2. Pemeriksaan Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di RSUP Cipto Mangunkusumo dan instansi terkait lain.

3. Pemeriksaan Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan instansi terkait lain.
4. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan JKN tahun 2016 dan Semester I 2017 di Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lain.

c. Reviu PKMP On-Call

Reviu PKMP *on call* dilaksanakan atas permintaan pemangku kepentingan BPK. Pada tahun 2018, reviu *on-call* adalah:

1. Reviu atas Pemeriksaan LKPD Provinsi DKI Tahun Anggaran 2017. Reviu ini atas permintaan Anggota V.
2. Reviu atas Pemeriksaan LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017. Reviu ini atas permintaan Anggota V.

5. Layanan Konsultasi

Kegiatan ini untuk memberikan advis kepada pemeriksa mengenai penyusunan KKP yang baik terkait proses *Quality Control* dan *Quality Assurance* pemeriksaan, penyusunan KKP, penyelesaian tindak lanjut serta penyempurnaan standar dan pedoman pemeriksaan.

Selama tahun 2018, Inspektorat PKMP memberikan layanan konsultasi antara lain:

- a. Memberikan kajian terkait laporan pengaduan atas perhitungan kerugian negara dalam pelaksanaan *Master of Settlement and Acquisituion Agreement* Bank Dagang Negara Indonesia. Kajian ini atas adanya surat kepada Ketua BPK dan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) dari kuasa hukum tersangka dalam kasus tersebut.
- b. Memberikan masukan kepada Kaditama Revbang terkait penerapan perangkat lunak pada Auditorat Keuangan Negara untuk perbaikan dan pemutakhiran perangkat lunak tersebut.
- c. Memberikan masukan kepada Kepala Pusat Standarisasi dan Evaluasi PKN terkait informasi dalam rangka identifikasi kebutuhan diklat tahun 2019 terkait dengan informasi permasalahan pengelolaan ke-

BPK-an berdasarkan hasil revidir pemeriksaan berikut rekomendasinya yang dapat ditindaklanjuti dengan pendidikan dan pelatihan.

6. Kerja Sama Luar Negeri

Pada tahun 2018, Inspektorat PKMP melakukan kerja sama luar negeri di bidang pemerolehan keyakinan mutu dengan *Australian National Audit Office (ANAO)*, *The Association of Southeast Asian Nations Supreme Audit Institution (ASEANSAI)*, *State Audit Organization of Lao People's Democratic Republic (SAO Lao PDR)*, dan *The Board of Audit of Inspection Korea (BAI Korea)*.

B. Pemeriksaan Inspektorat PIMK

1. Revidir Konsep Laporan Keuangan BPK RI

Inspektorat PIMK pada tahun 2018 mengadakan revidir atas Konsep Laporan Keuangan (LK) BPK RI Tahun 2017 untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan BPK dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil revidir atas Laporan Keuangan BPK RI TA 2017 menunjukkan terjadinya kenaikan nilai koreksi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya nilai koreksi Rp4,64 miliar menjadi Rp62,9 miliar. Nilai koreksi atas saldo akun Laporan Keuangan TA 2017 merupakan koreksi atas: (1) Reklasifikasi akun; (2) Kesalahan pencatatan; dan (3) Kesalahan kapitalisasi atas belanja barang ke dalam aset tetap ataupun sebaliknya yang seharusnya merupakan belanja barang namun dikapitalisasi. Seluruh usulan jurnal koreksi tersebut telah disetujui dan Laporan Keuangan BPK RI TA 2017 telah diperbaiki.

PENILAIAN		Nilai PMPRB Tahun 2017	Hasil Evaluasi Kemenpan Tahun 2017	Nilai PMPRB Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) PMPRB	Nilai Maksimal	%
A. KOMPONEN PENGUNGKIT (60)							
I.	Manajemen Perubahan	5,00	4,76	5,00	0,00	5,00	100,00
II.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	4,38	5,00	0,00	5,00	100,00
III.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00
IV.	Penataan Tataaksana	5,00	4,75	5,00	0,00	5,00	100,00
V.	Penataan Sistem Manajemen SDM	13,11	11,93	13,37	0,26	15,00	89,13
VI.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,74	6,00	0,00	6,00	100,00
VII.	Penguatan Pengawasan	10,96	10,19	11,39	0,43	12,00	94,92
VIII.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,89	5,25	6,00	0,11	6,00	100,00
Total Komponen Pengungkit		56,96	53,00	57,75	0,79	60,00	96,25

PENILAIAN		Nilai PMPRB Tahun 2017	Hasil Evaluasi Kemenpan Tahun 2017	Nilai PMPRB Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) PMPRB	Nilai Maksimal	%
B. KOMPONEN HASIL (40)							
I.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	16,35	16,25	16,19	(0,16)	20,00	80,95
	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja	11,39	11,39	11,40	0,01	14,00	81,43
	b. Nilai Kapasitas Organisasi	4,96	4,86	4,79	(0,17)	6,00	79,83
II.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	9,67	9,37	8,62	(1,05)	10,00	86,20
	a. Survey Eksternal Persepsi Korupsi	6,67	6,37	5,62	(1,05)	7,00	80,29
	b. Opini BPK	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00
III.	Kualitas Pelayanan Publik	9,23	8,48	8,02	(1,21)	10,00	80,20
TOTAL KOMPONEN HASIL		35,24	34,10	32,83	(2,41)	40,00	82,08
NILAI PMPRB		92,20	87,10	90,58	(1,62)	100,00	90,58

2. Reviu Reformasi Birokrasi

Hasil Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:

Nilai PMPRB pada komponen Pengungkit mengalami peningkatan karena pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 (per Maret 2018), telah dilakukan:

1. Komponen Penataan Sistem Manajemen SDM, yaitu:
 - a) Sub Komponen tentang Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, yang dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi seluruh pegawai, menyusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi, dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi.
 - b) Sub Komponen Penetapan Kinerja Individu, BPK telah menggunakan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar dalam pengembangan karir individu.
2. Komponen Penguatan Pengawasan, yaitu:
 - a) Sub Komponen Gratifikasi, yang dilakukan BPK dengan menjalankan aplikasi pelaporan dan penanganan gratifikasi sehingga penyampaian gratifikasi dan tindak lanjut penanganannya lebih efisien.
 - b) Sub Komponen Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) berupa seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada klien dan audit berbasis risiko.
3. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pada Sub Komponen Pemanfaatan Teknologi Informasi, yaitu seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanannya berupa pembuatan aplikasi monitoring pengaduan masyarakat yang lebih baik dan aplikasi pengaduan berbasis android (SIPADU).

Secara keseluruhan, capaian nilai hasil PMPRB Tahun 2018 sebesar 90,58, atau turun 1,62 poin dibandingkan hasil PMPRB Tahun 2017. Penurunan nilai ini sebagai akibat turunnya Komponen Hasil berupa survei internal atas

indeks mutu organisasi (IMO) dan survei eksternal persepsi korupsi yang dilakukan oleh PT Wahana Duta Utama. Komponen Hasil ini turun sebesar 2,41 poin dibandingkan Tahun 2017.

3. Pemeriksaan Internal dan Reviu SPM BPK

Salah satu tugas Inspektorat PIMK adalah melaksanakan pemeriksaan internal dan reviu atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK. Di akhir Semester II Tahun 2018, Inspektorat PIMK telah melaksanakan pemeriksaan internal dan reviu SPM sebagai berikut:

1. Reviu atas Konsep LAKIN BPK;
2. Reviu atas Pengelolaan Anggaran BPK Triwulan IV Tahun 2017;
3. Reviu atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPK Tahun 2017;
4. Reviu Pemerolehan Keyakinan Mutu Terintegrasi atas Pemeriksaan Fokus 6 Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
5. Reviu atas Laporan Keuangan BPK Semester I Tahun 2017;
6. Reviu atas RKA BPK Tahun 2019;
7. Reviu atas RKBMN BPK Tahun 2020;
8. Reviu atas Integrasi Pilar SPM BPK;
9. Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Provinsi Papua;
10. Pemeriksaan Internal atas Efektivitas Penggunaan Pakaian Kerja Pegawai;
11. Pemeriksaan Kinerja atas Manajemen Komunikasi pada Biro Humas dan KSI;
12. Pemeriksaan atas Pelaksanaan Tusi Kesekretariatan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Pemeriksaan internal atas Manajemen KAP;
14. Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPK TA 2017 menunjukkan laporan telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Sosialisasi Kegiatan Pengawasan

Sosialisasi Kegiatan Pengawasan dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi para pemeriksa mengenai peran dan kegiatan Itama sebagai fungsi *quality assurance* dalam mendukung BPK menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan sosialisasi selama periode Semester I Tahun 2018 adalah Sosialisasi Kegiatan Pengawasan Itama pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada 17 – 20 Februari 2018, serta Professional Auditor Forum yang diselenggarakan di Ruang Auditorium BPK pada 22 Februari 2018.

Berdasarkan pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Pengawasan menunjukkan bahwa sosialisasi Pilar Mutu Kelembagaan dan Sistem Pengendalian Intern perlu dilakukan secara berkesinambungan sebagai langkah preventif untuk mendorong peningkatan kualitas hasil pemeriksaan dan peningkatan kualitas tata kelola intern BPK yang pada akhirnya mendorong peningkatan manfaat BPK bagi tata kelola pemerintahan.

5. Pengembangan Kapasitas

Pada Tahun 2018, pengembangan kapasitas yang telah dilakukan berupa sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) untuk tingkat Lanjutan yang diikuti oleh delapan peserta. Selain melalui kegiatan sertifikasi, pengembangan kapasitas pelaksana di Inspektorat PIMK juga dilakukan melalui kegiatan workshop dan seminar nasional terkait internal audit.

Rincian kegiatan pengembangan kapasitas yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Audit Intern tingkat Lanjutan I dan II, serta manajerial.
2. Workshop persiapan Reviu Konsep Laporan Keuangan BPK Tahun 2017.
3. Workshop peningkatan kapabilitas evaluator Inspektorat Utama dalam rangka persiapan Evaluasi atas

- Implementasi SAKIP BPK Tahun 2017.
4. Seminar Nasional Intenal Audit 2018.

C. Inspektorat Penegakan Integritas

Untuk meningkatkan pengawasan internal BPK, Itama pada 19 Juni 2018 meluncurkan aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) sebagai sarana untuk menampung pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran oleh pegawai di lingkungan BPK.

WBS merupakan sistem aplikasi yang disediakan oleh BPK bagi pegawai di BPK untuk melaporkan adanya dugaan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar standar, melanggar kode etik, dan melanggar kebijakan yang terjadi di lingkungan BPK. Agar dapat segera ditindaklanjuti, pengaduan yang disampaikan harus dilengkapi unsur 4W dan 1H atau *what* (apa perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran), *who* (siapa terduga pelaku), *where* (di mana perbuatan dilakukan), *when* (kapan perbuatan dilakukan), dan *how* (bagaimana perbuatan tersebut dilakukan).

WBS dan PPG ini dibangun oleh Inspektorat Utama bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi BPK dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan

Tampilan antar muka aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)





Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penghargaan kepada Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Bahtiar Arif, sebagai Lembaga yang berhasil menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di seluruh unit kerjanya, di Jakarta, pada Senin (10/12).

pelaporan. Bagi yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran, bisa mengakses melalui situs web <https://wbs.bpk.go.id>.

Pelapor dipastikan jati dirinya tidak akan bocor, karena pengaduan bisa dilakukan secara anonim. Fokus sistem WBS adalah materi informasi yang dilaporkan. Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) adalah bagian dari Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan BPK. Upaya ini mendapat perhatian dari pihak luar.

Upaya ini membuahkan hasil berupa pengakuan. Pada peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia, 10 Desember 2018, Wakil Presiden **Jusuf Kalla** dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), **Syafruddin** memberikan penghargaan kepada BPK karena berhasil menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerjanya, di Jakarta.

D. Persiapan Peer Review 2019

Pada tahun 2017 dan 2018, Itama sedang mempersiapkan berbagai keperluan menjelang Peer Review 2019, dengan melakukan serangkaian kegiatan yang menjadi tahapan pelaksanaan *peer review*. Salah satunya adalah peningkatan pemahaman terkait ISSAI 5600 tentang *peer review* dan penerapannya di BPK, serta pengembangan kapabilitas

Supreme Audit Institution (SAI) melalui *SAI Performance Measurement Framework (PMF)*, yang dikembangkan oleh *International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI)* sebagai salah satu alat untuk menilai kinerja BPK secara holistik.

Peer Review adalah pemeriksaan internal yang dilakukan lembaga pemeriksa negara lain. Pada tahun 2019, BPK akan diperiksa oleh lembaga pemeriksa dari Polandia, Estonia dan Norwegia. Ini bukan pertama kalinya BPK diperiksa oleh lembaga pemeriksa keuangan negara lain. Pada 2014, BPK di-review oleh NIK Polandia, setelah pemeriksaan oleh Audit New Zealand tahun 2004 dan Netherlands Court of Audit (ARK) tahun 2009.

3. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Tahun 2018 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Selain itu, Evaluasi LAKIN ini merupakan wujud dan kinerja dalam mencapai visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam Renstra BPK 2016-2020.

Dalam mencapai visi tersebut, BPK mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk itu, BPK telah menetapkan dua misi, yaitu:

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri,
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pencapaian visi dan misi tersebut, dilakukan dengan menetapkan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan hasil dan kualitas pemeriksaan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara mencapai tujuan negara. Untuk mencapai tujuan strategis itu, disusun Peta Strategi BPK yang menetapkan dua sasaran strategis periode 2016-2020, yaitu:

1. Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan,
2. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dan strategi tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja (IKU/IK). Nilai Kinerja BPK Tahun 2018 mencapai 100,02. Capaian kinerja ini antara lain didukung oleh capaian 28 IKU/IK yang telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2018.

Realisasi IKU pada Tahun 2018 meningkat sebesar 0,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dihasilkan dari pengukuran atas variabel (1) Pemanfaatan LHP; (2) Pemanfaatan IHPS; dan (3) Pemanfaatan Produk BPK Lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada Tahun 2018 pemangku kepentingan cukup banyak memanfaatkan produk BPK lainnya dalam mengelola keuangan negara dibandingkan dengan “Pemanfaatan LHP” maupun “Pemanfaatan IHPS”. Selain itu, adanya perubahan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2016-2020 menyebabkan capaian IKU Tahun 2018 menurun dari tahun 2017.

Tabel - Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2016 — 2018

1.1 Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	4,00	3,70	3,50	
Realisasi	4,17	4,06	4,59	+0,11
Capaian	104,25%	109,73%	131,14%	

Tabel - Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
1.1 Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan	3,5	3,7	3,9	4,0	4,2	4,17	99,29%

**SKOR KINERJA BPK
TAHUN 2018**

PERSPEKTIF, SS DAN IKU		Target	Realisasi	Skor IKU	SKOR SS	SKOR KINERJA
SKOR KINERJA BPK						100,02
PERSPEKTIF PEMENUHAN KEDUTUHAN DAN HAUAPAN PEMILIK KEPENTINGAN						
55.1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan						100,93
1.1	Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan	4	4,17	104,25		
1.2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	65,00%	63,44%	97,60		
55.2 Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Muta						99,10
2.1	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100,00%	100,00%	100,00		
2.2	Indeks Kepuasan Audit atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,16	101,46		
2.3	Indeks Pengendalian Muta BPK	3,80	3,93	103,42		
2.4	Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi	AA	A	90,00		
2.5	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	100,00		
PERSPEKTIF PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS						
Strategi 1.1 Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan						101,09
1.1.1	Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK	100,00%	100,00%	100,00		
1.1.2	Pandapat BPK yang Diberikan	3,00	4,00	105,00		
1.1.3	Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,90	3,76	96,41		
Strategi 1.2 Meningkatkan Pengetahuan Strategi Pemeriksaan						103,33
1.2.1	Persentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00		
1.2.2	Tingkat Konsistensi antara Implementasi Strategi Pemeriksaan dan Rastre BPK	90,00%	100,00%	105,00		
1.2.3	Persentase Pemeriksaan Kinerja	20,00%	21,16%	105,00		
1.2.4	Tingkat Evaluasi atas LHP	80,00%	100,00%	105,00		
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan						100,80
2.1.1	Pemenuhan Quality Assurance dan Quality Control	100,00%	98,26%	98,26		
2.1.2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Revisi/Itama atas Sistem Pengendalian Muta (SPM) BPK	90,00%	97,91%	105,00		
Strategi 2.2 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan						92,65
2.2.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Peer Review	100,00%	80,24%	80,24		
2.2.2	Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang Terkait Tugas dan Wewenang BPK	100,00%	100,00%	100,00		
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI						
Strategi 3.1 Meningkatkan Kompetensi Pegawai melalui Pembentukan Talent Pool						92,56
3.1.1	Persentase Pemenuhan Talent Pool	100,00%	93,70%	93,70		
3.1.2	Indeks Kepuasan Pegawai	3,70	3,55	95,95		
3.1.3	Persentase Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai	100,00%	88,03%	88,03		
Strategi 3.2 Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi						101,74
3.2.1	Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi	57,00%	67,35%	105,00		
3.2.2	Indeks Kepuasan Pegawai atas Pemanfaatan TI dan Sarpras	3,80	3,66	96,32		
Strategi 3.3 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional						90,71
3.3.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,23	84,60		
3.3.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,58	91,60		
3.3.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100,00%	99,41%	99,41		
Strategi 3.4 Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik (Best Practice Sharing)						105,00
3.4.1	Persentase Penerapan Best Practice	50,00%	81,66%	105,00		
PERSPEKTIF KEUANGAN						
Strategi 3.5 Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran						105,00
3.5.1	Tingkat Kinerja Anggaran	85,00%	92,09%	105,00		



4. Rapat Koordinasi BPK Tahun 2018

Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, tidak sekadar memberikan catatan baik atau buruk. Yang lebih utama adalah bagaimana rekomendasi yang diberikan BPK dilaksanakan oleh pemangku kepentingan agar pengelolaan anggaran negara bisa lebih baik lagi.

BPK dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya, mempunyai visi mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Itu sebabnya, BPK sangat berkepentingan dengan pengelolaan keuangan yang baik.

Demi visi ikut mendorong pengelolaan keuangan negara yang berkualitas itu lah, BPK banyak menggelar rapat koordinasi (rakor) dan konsultasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemeriksa dan hasil pemeriksaan. Rakor eksternal dilakukan dengan para pemangku kepentingan untuk membahas apa dan bagaimana tata kelola keuangan yang baik sesuai standar pemeriksaan dan perundang-undangan.

Rapat Koordinasi Umum 2018 dengan mengusung tema “Kerja Bersama Tingkatkan Prestasi”. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor Pusat BPK tersebut dilaksanakan selama 3 hari pada 4 - 6 September 2018.

Rakor ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif agar pengelolaan keuangan negara bisa berjalan sesuai ketentuan. Konsultasi juga tetap dilaksanakan setelah pemeriksaan dalam bentuk pemberian rekomendasi untuk perbaikan. Sebagai auditor eksternal, BPK memiliki peran strategis dalam mendorong pemerintah untuk memformulasikan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.

Di sisi lain, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara memerlukan dukungan penyelenggaraan sistem pengendalian intern (SPI) yang efektif dan efisien pada seluruh kegiatan di instansi pengelola keuangan negara. Perlunya koordinasi ini karena BPK banyak mendapatkan temuan berindikasi kuat akibat kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa dilihat dalam IHPs Semester I Tahun 2018, BPK menemukan 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan, meliputi 7.539 (48%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.030 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun, serta 204 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,49 triliun.

Rapat koordinasi internal antara lain dilaksanakan sebagai pembekalan bagi para pemeriksa dengan tajuk **Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan LKPD, Dana Desa dan Bantuan Partai Politik TA 2017** di Balikpapan, Kalimantan Timur, 25 Januari 2018. Sosialisasi tentang tata kelola Dana Desa ini juga dilakukan BPK langsung ke daerah-daerah seperti dilakukan di Buleleng, Bali, 27 April 2018.

Beberapa rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah lainnya juga digelar untuk membahas pengelolaan anggaran seperti dalam Sosialisasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) di Kantor Pusat BPK, pada 4 Juli 2018. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan

permasalahan yang menjadi kendala penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Koordinasi baik secara internal maupun eksternal ini penting untuk menegakkan nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme dalam menyusun laporan keuangan dan pemeriksaannya. Hal ini menjadi harapan BPK sejalan dengan posisi dan kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa dan Pemerintah sebagai entitas yang diperiksa. Upaya-upaya ini mulai membuahkan hasil. Kualitas LKPP maupun LK Pemerintah Daerah Tahun 2017 mengalami perbaikan signifikan yang ditandai dengan peningkatan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran, komitmen, dan kerja keras Pemerintah dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar.

5. Produk Hukum BPK Tahun 2018

Badan Pemeriksa Keuangan terikat dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan undang-undang itu, BPK membuat sejumlah produk hukum seperti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan. Berbagai perkembangan mengharuskan BPK untuk terus menyesuaikan produk hukum agar tetap sejalan dengan undang-undang dan kondisi.



Website jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPK

Pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi dari suatu produk hukum tidak terbatas hanya pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum di BPK saja namun pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi perlu juga dilakukan terhadap produk hukum BPK yang sudah terbentuk. Hal tersebut perlu dilakukan karena adanya dinamika hukum atas dibentuk dan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Diundangkannya peraturan perundang-undangan itu menyebabkan beberapa produk hukum BPK menjadi tidak harmonis dan tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut.

Dari sisi internal BPK terdapat beberapa perubahan peraturan di antaranya mengenai perubahan organisasi dan tata kerja BPK. Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, sebelum perubahan organisasi, sebelum perubahan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara tentunya akan membawa dampak dalam mempertanggungjawabkan hasil tugas dan pemeriksaan BPK.

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Binbangkum) yang menjadi ujung tombak BPK dalam menggodok dan melahirkan produk hukum baru, menyadari tuntutan tersebut. Itu sebabnya, Binbangkum aktif melakukan harmonisasi dan sinkronisasi tidak hanya saat pembentukan suatu produk hukum namun pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi perlu juga dilakukan terhadap produk hukum BPK yang sudah terbentuk. Dikeluarkannya berbagai peraturan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, akan membawa dampak dalam mempertanggungjawabkan hasil tugas dan pemeriksaan BPK. Sepanjang 2018, BPK mengeluarkan produk hukum baru yaitu:

1. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan
2. Peraturan BPK No. 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan

3. Peraturan BPK No. 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
4. Peraturan BPK No. 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

6. Sosialisasi Peraturan terkait Pemeriksaan

Masih banyaknya permasalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan oleh pengelola keuangan negara tidak selalu identik dengan sebuah kesengajaan, tapi seringkali karena ketidaktahuan para pengelola keuangan negara. Hal itu antara lain terlihat dari IHPS Semester I 2018, di mana BPK menemukan 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan, meliputi 7.539 (48%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.030 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun, serta 204 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,49 triliun.

Itu sebabnya, Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemeriksa pengelolaan keuangan negara aktif melakukan sosialisasi peraturan kepada pemangku kepentingan, baik para pengelola keuangan negara maupun publik yang diharapkan bisa membantu melakukan kontrol atas pengelolaan keuangan negara.

BPK juga aktif melakukan sosialisasi di daerah pada para pemangku kepentingan seperti dilakukan untuk memberikan pemahaman pada tata kelola Dana Desa. Kegiatan ini antara lain dilakukan di Kabupaten Klungkung, Bali, pada 9 November 2018 di depan aparat desa dan kabupaten. Sosialisasi ini dilaksanakan agar dana desa dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai.

Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk seminar, seperti seminar nasional bertema Ketersediaan Pangan : Swasembada Versus Impor (Hasil Audit BPK RI) di Jakarta, 21 Mei 2018 yang membedah permasalahan data konsumsi nasional. Sejumlah seminar dengan berbagai topik lainnya, juga banyak digelar BPK termasuk “Sinergitas Pelaksanaan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Menuju Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah yang Berkualitas” di Tangerang, Banten, pada 11 Desember 2018.

Pemasyarakatan peran BPK juga dilakukan pada kaum milenial dengan acara *Goes to Campus*, *Goes to School*, dan penyelenggaraan Festival Film Kawal Harta Negara. Acara sosialisai di sekolah antara lain dilaksanakan pada 8 Februari 2018 di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta dengan tema “Peran BPK dalam Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara”. Wakil Ketua BPK, **Bahrullah Akbar** langsung turun sendiri dalam acara berbentuk dialog terbuka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelajar serta para pengajar mengenai tugas dan wewenang BPK serta memahami kedudukan BPK dalam ketatanegaraan.

Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) yang merupakan kerja sama BPK dengan USAID menjadi ajang sosialisasi pada kaum muda dan mahasiswa. Selain pemilihan film terbaik, acara ini juga dilaksanakan dengan *road show* ke Banda Aceh, Surabaya, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Ambon untuk mengenalkan BPK dan menggugah mahasiswa dan kaum muda ikut mengawal harta negara. Acara ini antara lain dilakukan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada 12 Mei 2019 dan di Museum Sri Baduga, Bandung.

7. Sinergi dengan Stakeholder

Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemeriksa keuangan negara, banyak melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Secara umum sinergi bisa dibagi tiga berdasarkan tujuannya, yaitu untuk pencegahan, penindakan, dan sosialisasi.

Sinergi untuk pencegahan kesalahan administratif, ketidaktransparanan, atau kurang akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pengelola keuangan negara. Sinergi untuk kepentingan penindakan dilakukan dengan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti



temuan yang berindikasi dugaan pelanggaran pidana. Sedangkan sinergi dengan media untuk kepentingan sosialisasi program dan hasil kerja BPK agar lebih menyebar ke masyarakat secara obyektif dan akurat.

Untuk mencapai sinergi yang baik dengan pemangku kepentingan, dilakukan dalam berbagai cara, di antaranya melalui sosialisasi, diskusi atau membentuk forum *group discussion*. Sinergitas ini dilakukan dalam bentuk diskusi bertema “Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara” di Palembang, pada 14 September 2018.

Salah satu pemangku kepentingan adalah wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD. BPK juga aktif menjalin sinergi dengan parlemen, baik dalam bentuk pelaporan hasil pemeriksaan maupun koordinasi, pemeriksaan investigatif dan konsultasi. BPK antara lain diminta DPR Pusat melakukan pemeriksaan investigatif Kerja Sama Operasional (KSO) Terminal Peti Kemas Koja dan Pembiayaan Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I Pada PT Pelindo II. Hasil Pemeriksaan Investigatif PT JICT dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja diserahkan ke DPR pada 31 Januari 2018.

BPK juga melakukan sinergi dengan penegak hukum, antara lain dilakukan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan hasil Pemeriksaan Investigatif PT JICT dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja diserahkan ke DPR pada 31 Januari 2018.

Kerugian Negara atas Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank Mandiri CBC Bandung 1 kepada PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Company Tahun 2008 s.d. 2015 kepada Kejaksaan Agung pada 21 Mei 2018. Selain dengan Kejaksaan Agung, BPK juga aktif memberikan hasil pemeriksaan yang terindikasi tindak pidana kepada Kepolisian dan KPK.

Tak kalah penting adalah sinergi dengan media untuk memasyarakatkan hasil pemeriksaan BPK di tengah maraknya berita hoaks di media sosial. BPK antara lain memberikan pelatihan kepada awak media tentang pemeriksaan, sehingga berita yang disiarkan lebih akurat. Sinergi juga dibangun dengan cara memberikan akses terhadap hasil pemeriksaan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Baik Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK maupun bagian Humas siap memberikan keterangan yang diperlukan media.

8. Tantangan Masa Depan

Komitmen BPK untuk menegakkan nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh penyelenggara negara bukan merupakan tugas ringan. Banyak tantangan dihadapi oleh BPK secara internal dan eksternal. Secara internal, tantangan itu adalah upaya peningkatan kualitas pemeriksa dan penyiapan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan.

Secara eksternal, sejumlah hambatan menghadang upaya BPK ini, antara lain ketidakpahaman atau kekurangpedulian pelaksana keuangan negara dalam menyusun laporan keuangan negara. Di samping itu, kesadaran masyarakat untuk ikut menjadi pengawas keuangan negara belum terlalu tinggi.

Masalah lain yang perlu menjadi perhatian adalah perkembangan cepat teknologi informasi. Hal ini juga mengharuskan BPK bergerak cepat melakukan penyesuaian. Karena, kemajuan teknologi informasi seperti mata uang, satu hal membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan, namun di sisi lain bisa dijadikan alat kejahatan baik dalam bentuk manipulasi



maupun serangan peretasan untuk mengacaukan laporan hasil pemeriksaan.

Hal ini lah antara lain yang menjadi tantangan BPK ke depan. BPK sudah melakukan berbagai upaya untuk menaklukkan tantangan ini. Untuk meningkatkan kualitas pemeriksa, BPK banyak memberikan pelatihan baik dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Pemeriksaan Keuangan Negara secara *inhouse training* maupun mengirim pemeriksa mengikuti pelatihan di luar Badan, bahkan menyekolahkan mereka ke jenjang S2 dan S3 di dalam dan luar negeri.

Pelatihan dan sosialisasi pada pelaksana anggaran negara juga terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Sosialisasi juga terus dilakukan pada masyarakat, baik kalangan pelajar, mahasiswa, pemuda maupun umum dengan serangkaian kegiatan kemasyarakatan.

Di bidang informasi dan teknologi, BPK telah memulai dengan mengembangkan beberapa aplikasi untuk mendukung kegiatan pemeriksaan maupun mendukung otomasi perkantoran (*office automation*). Aplikasi untuk mendukung kegiatan pemeriksaan antara lain adalah e-Audit, Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Data Entitas Pemeriksaan (DEP), Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP), dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL). Sedangkan aplikasi mendukung otomasi perkantoran antara lain adalah Sistem Sumber Daya Manusia (SISDM) dan Sistem Kearsipan (SEKAR).

BPK telah menyiapkan diri dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. ditandai dengan pengembangan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) yang berhubungan dengan pemeriksaan dan kelembagaan serta pengamanan terhadap *big data* yang dimiliki BPK.

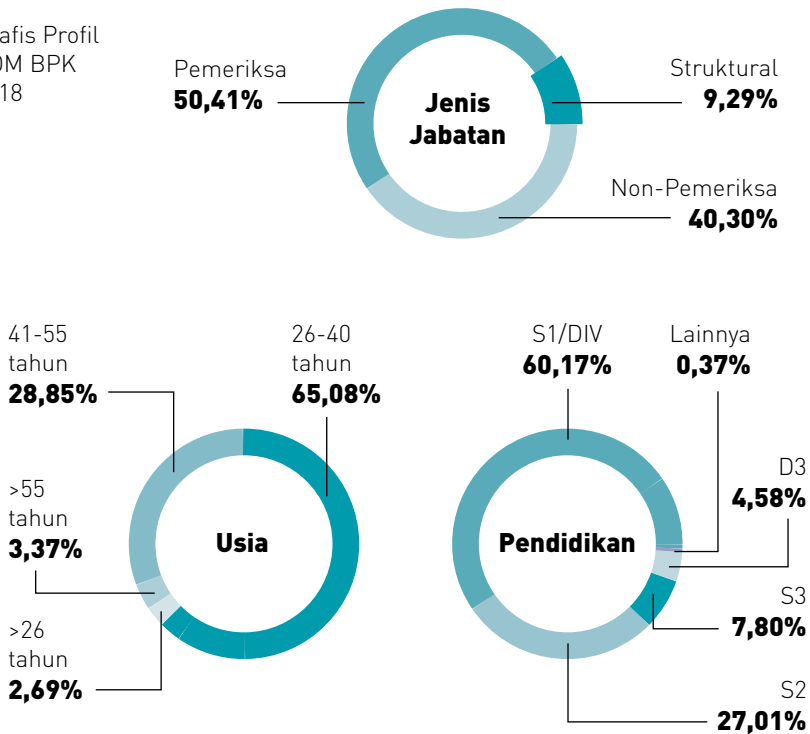


BAB 4 **MANAJEMEN SDM, SARANA DAN PRASARANA, & TEKNOLOGI INFORMASI DI BPK**

1. Profil SDM BPK

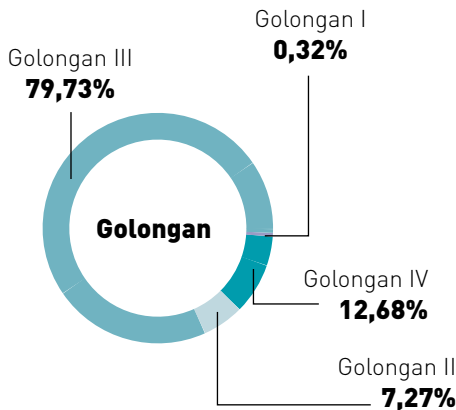
Sebagai badan yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan harus memiliki sumber daya manusia yang kuat di bidang pemeriksaan. Pada tahun 2018, dari jumlah SDM sebanyak 6.467, 50,41 persen (3.260 orang) merupakan tenaga pemeriksa. Sedangkan non-pemeriksa sebanyak 2.606 orang (40,30 persen), dan 601 orang (9,29 persen) adalah pejabat struktural.

Grafis Profil
SDM BPK
2018



Pegawai BPK, sebagian besar merupakan lulusan S1/D4 (60,17 persen), diikuti S2 (27,01 %), S3 (7,8 %), dan DIII (4,58 %). Berdasarkan usia, mayoritas pegawai BPK berumur 26-40 tahun (65,08 %), diikuti kelompok usia 41-55 tahun (28,85%), di bawah 26 tahun (2,69%) dan di atas 55 tahun sebanyak 3,37%. Jumlah karyawan laki-laki 59,18% dan perempuan 40,82%. Dari golongan kepegawaian, karyawan BPK terbanyak bergolongan III (79,73%), diikuti golongan IV (12,68%), Golongan II (7,27%), dan Golongan I sebanyak 0,32%.


Para pemeriksa ini sebagian besar adalah akuntan dengan berbagai sertifikat. Sebanyak 899 pegawai BPK saat ini merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dari jumlah itu, 731 orang sudah meneruskan pendidikan ke jenjang D4/S1, S2, S3 di dalam dan luar negeri.



Selama tahun 2018, BPK telah mendanai perolehan lima sertifikasi profesi: *Certified Legal Auditor (CLA)*, *Certified Forensic Auditor (CFrA)*, *Certified Information System Auditor (CISA)*, *Qualified Internal Auditor (QIA)*, dan *Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS)*. Selain itu, untuk pemeliharaan kompetensi dan keahlian para pegawai, BPK juga mendanai pemeliharaan sertifikasi profesi kepada para pemegang sertifikat profesi dan sistem *reimburse*. Pada tahun 2018, BPK telah mendanai pemeliharaan 130 pegawai pemegang sertifikasi.

Karyawan BPK direkrut melalui ikatan dinas Politeknik Keuangan Negara STAN dan proses rekrutmen CPNS, yang dilakukan secara terbuka, bersih dan akuntabel. Baik Lulusan STAN maupun perguruan tinggi umum, mendapat hak dan peluang yang sama untuk mengembangkan kariernya, tanpa melihat latar belakang agama atau suku dan jenis kelamin

Tabel Sertifikat
Akuntan
Pemeriksa
BPK



Jenis Sertifikat	Jumlah
Akuntan Register	1.651
CPSAK	44
CIA	17
CISA	16
CFE	133
CFrA	81
CPA	26
Total	1.968

2. Pengembangan SDM

Siap belajar dan mengembangkan diri merupakan kata kunci meniti karier di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perkembangan yang terus menerus dalam ilmu dan teknologi, termasuk di bidang administrasi keuangan, menuntut insan BPK untuk terus beradaptasi. Caranya adalah mengembangkan diri melalui pelatihan atau pendidikan formal.

Masalah pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia ini rutin dilakukan oleh BPK, bahkan ketika pegawai baru di awal bekerja. Sebelum mulai menjalankan tugas, CPNS baru di BPK harus menjalani pendidikan dan latihan di Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) selama enam bulan. Pelatihan khusus ini untuk menanamkan nilai-nilai dan kode etik BPK kepada calon pegawai baru sehingga mereka bisa ikut menjaga citra BPK dan kepercayaan publik pada BPK.

Setelah menjadi karyawan, berbagai pelatihan dan kursus

terus diberikan baik untuk yang bertugas sebagai pemeriksa atau bekerja di non-pemeriksaan. Tidak kurang dari 240 program peningkatan keterampilan, wawasan, dan pengetahuan digelar Badiklat PKN setiap tahunnya, baik di Jakarta maupun di Balai Pendidikan dan Latihan di daerah. Kesempatan belajar juga diberikan dalam bentuk kursus di sejumlah lembaga pendidikan seperti Diklat *Managing Conflict & Difficult People* yang diadakan Thomas Internasional atau Pelatihan Pemberian Umpan Balik oleh LPT UI.

Selain menjalani pelatihan *inhouse training* di Badan Pendidikan dan Latihan, para pegawai BPK mendapat kesempatan luas untuk melanjutkan studi baik S1, S2 maupun S3 di dalam dan luar negeri dengan bea siswa. Pada tahun 2018, terdapat 47 pegawai yang menjadi Karyasiswa memanfaatkan berbagai beasiswa dari BPK (19 Karyasiswa S2 di dalam negeri), Kementerian Komunikasi dan Informasi (11 Karyasiswa S2 di dalam negeri), Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan atau LPDP (1 Karyasiswa S3 di dalam negeri, 5 Karyasiswa S2 di dalam negeri, dan 2 Karyasiswa S2 di luar negeri), Politeknik Keuangan Negara STAN (1 Karyasiswa), Australia Award (2 Karyasiswa S3 dan 4 Karyasiswa S2), dan beasiswa lainnya (2 Karyasiswa S2 di dalam dan luar negeri). Selain itu, terdapat 28 calon Karyasiswa Kelas Kerja Sama BPK dengan Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada yang telah lolos seleksi dan siap untuk mulai perkuliahan pada semester Gasal 2019, serta 14 calon Karyasiswa yang telah diterima pada beasiswa LPDP untuk *intake* tahun 2019.

Para pegawai BPK juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi dalam berbagai jenjang pendidikan melalui Izin Belajar dengan biaya sendiri. Pada tahun 2018, terdapat 185 pegawai yang melaksanakan pendidikan dengan biaya sendiri, yang terdiri atas 7 pegawai melanjutkan pendidikan jenjang S3, 141 pegawai jenjang S2, 36 pegawai jenjang S1, dan satu pegawai jenjang D-III.

Untuk pegawai yang akan menempati jabatan struktural, diadakan pelatihan yang disebut Diklat Kepemimpinan (Diklatpim). Diklatpim terdiri atas Diklatpim Tingkat I

sampai IV. Diklatpim I dan II dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), sedangkan Diklatpim III dan IV dilaksanakan oleh Badiklat PKN BPK. Pada tahun 2018, terdapat 1 pejabat mengikuti Diklatpim I, 10 pejabat mengikuti Diklatpim II, 28 pejabat mengikuti Diklatpim III, dan 9 pejabat mengikuti Diklatpim IV.

Peningkatan kapasitas pemeriksa BPK juga dilakukan dengan cara menyertakan pegawai dalam pelatihan, magang, dan kursus yang dilakukan asosiasi badan pemeriksa keuangan internasional atau regional, misalnya program *secondment* atau magang ke Australian National Audit Office (ANAO) di Canberra, maupun ke Audit Office of New South Wales (AO NSW) di Sydney. Proses belajar juga dilaksanakan dalam *Workshop on Fraud Audit Investigation yang diadakan BPK bekerja sama dengan* Asosiasi Lembaga Pemeriksa Negara-negara ASEAN (ASEANSAI) di Jakarta, Agustus 2018. Kerja sama bilateral dan saling berbagi pengetahuan juga bisa menjadi ajang pemeriksa untuk belajar, seperti dilakukan BPK dengan Jabatan Audit Negara Malaysia, dan juga sejumlah negara lain.

3. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM)

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDM adalah aplikasi berbasis web, yang memuat seluruh data kepegawaian Badan Pemeriksa Keuangan. Sistem satu pintu database karyawan ini mulai dikembangkan Biro SDM BPK sejak tahun 2012.

Aplikasi web ini memuat single database, rekam/**update** data berdasarkan dokumen, dan integrasi dengan presensi, peningkatan keamanan data pegawai dan akses terbuka, yang bisa dilakukan seluruh karyawan dari mana saja. Dengan SISDM, pegawai bisa mendapatkan pelayanan terkait SDM seperti cuti dan presensi, DUPAK (Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit) otomatis, KP4 (Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan PNS), dan medis.

Untuk menjawab kebutuhan pegawai, dikembangkan

SISDM Versi 2.0 yang mulai dibuat pada tahun 2017 dan dioperasikan pada tahun 2018. SISDM Versi 2.0 ini memuat 11 modul baru, yang telah dikembangkan dan siap digunakan, yaitu :



Fitur-fitur baru dalam SISDM Versi 2.0 ini dirancang lebih mobile friendly, sehingga pegawai bisa dengan mudah membuka SISDM dari gadget.





Website penerimaan CPNS bisa diakses dialamat ini <https://cpns.bpk.go.id>

4. Rekrutmen CPNS BPK

Untuk memperkuat Sumber Daya Manusia, BPK pada tahun 2018 membuka lowongan dengan formasi yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2017, BPK merekrut 300 CPNS, tahun 2018 jumlah calon pegawai yang direkrut sebanyak 502

Pengumuman penerimaan CPNS ini dilakukan secara terbuka melalui website <https://cpns.bpk.go.id> pada bulan Oktober 2018. Sebanyak 17.897 orang mendaftar dan yang lolos seleksi administrasi sebanyak 13.778. Untuk memudahkan calon pendaftar, tes tertulis berupa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan di beberapa kota selain Jakarta, yaitu Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, Makassar, dan Jayapura.

Setelah melewati tahap penyaringan SKD dan SKB, maka terjaring lah 502 CPNS baru BPK. Mereka terdiri atas 463 Pemeriksa, 5 Asesor SDM, 2 Pengelola Kepegawaian, 4 Juru Informasi dan Komunikasi, 4 Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor, 17 Pengelola Teknologi Informasi, dan 7 Pranata Kearsipan.

BPK pada jangka panjang, mengusulkan kepada Kemenpan-

RB perekrutan 2.655 pegawai baru sampai dengan tahun 2022, dengan rincian pemeriksa 2.358 pegawai dan jabatan pelaksana 297 pegawai. Penambahan karyawan baru ini sekaligus untuk menggantikan pegawai yang pensiun, masing-masing 247 pemeriksa dan 112 jabatan pelaksana pada kurun 2018-2022.

No.	JABATAN	PENDIDIKAN	JENIS FORMASI				JUMLAH FORMASI
			Umum	Cumlaude	Disabilitas	Putra/ Putri Papua/ Papua Barat	
1	Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama	S1 Psikologi	5				5
2	Pemeriksa Ahli Pertama	S1 Akuntansi	135	51	4	4	194
		S1 Hukum	44		3	3	50
		S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan	41		2	2	45
		S1 Komunikasi	10				10
		S1 Manajemen	46		2	2	50
		S1 Sastra	10				10
		S1 Teknik Informatika/ Sistem Informatika	48				48
		S1 Teknik Lingkungan	10				10
		S1 Teknik Sipil	46				46
3	Pengelola Kepegawaian	D-III Administrasi Perkantoran/ Manajemen Perkantoran	2				2
4	Juru Informasi dan Komunikasi	D-III Komunikasi/ Public Relation/Jurnalistik	4				4
5	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	D-III Mesin/ Elektro/ Otomotif/ Bangunan	4				4
6	Pengelola Teknologi Informasi	D-III Teknologi Informasi	17				17
7	Pranata Kearsipan	D-III Kearsipan/ manajemen Sistem Informasi	7				7
JUMLAH			429	51	11	11	502

Tabel Formasi Penerimaan CPNS BPK Tahun 2018

5. Asesmen Kompetensi Individu Pejabat BPK

Pada tahun 2018, Biro SDM BPK melakukan penyusunan alat ukur *assessment center* sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 / 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Dalam penyusunan alat ukur *assessment center* ini, Biro SDM didampingi oleh pihak ketiga. Alat ukur yang disusun adalah simulasi *in tray*, *problem analysis* dan *assigned leaderless group discussion* dengan mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan ASN. Alat ukur tersebut disusun selama empat bulan sejak tanggal 8 Februari sampai dengan 8 Juni 2018. Sebelumnya, Biro SDM setiap tahun melakukan penilaian kompetensi perilaku pada sedikitnya 600 orang pegawai, khususnya pejabat fungsional pemeriksa, sebagai bagian dari penerapan Mekanisme Sertifikasi Peran Pemeriksa.

Assessment Center adalah metode penilaian kompetensi yang bertujuan untuk mendapatkan penilaian objektif mengenai keterampilan, pengetahuan, potensi, serta minat dan kepribadian individu, sebagai dasar untuk melaksanakan pengelolaan SDM yang tepat guna. *Assessment Center* diharapkan dapat mewujudkan prinsip penempatan seseorang sesuai dengan keahliannya pada waktu yang tepat (*the right Man at the right place at the right time*). Hasil *Assessment Center* berupa rekomendasi untuk mengidentifikasi pegawai-pegawai yang akan menduduki jabatan tertentu di BPK dan juga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan pegawai. Selain diberlakukan kepada pegawai BPK pada jenjang struktural, *assessment center* ini juga digunakan pada Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP).

Hasil dari penilaian kompetensi Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan Surat Tanda Sertifikasi Peran (STSP) untuk kenaikan pangkat/golongan PFP dan sebagai bahan pertimbangan tim penilai kinerja PNS dalam penetapan peran pemeriksa.

Pegawai yang mengikuti *assessment center* pada tahun 2018

sebanyak 346 orang, yang terdiri atas 224 peserta peran pemeriksa, 69 peserta pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), 35 peserta *assessment* Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) Pratama, 4 peserta *assessment* pemeriksa utama, satu peserta *assessment* analisis anggaran, dan 13 peserta *assessment* lolos butuh.

Tabel Jadwal Pelaksanaan Assessment Center, 2018

Bulan	Jan	Mar	Mei	Juni	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Jenis AC	Diklat JFP	LB	ATY	ATY KTY	JPT	KTY	ATY KTY Analisis Anggaran	Pemeriksa Utama	Diklat JFP
Jumlah	48	13	67	52	35	31	75	4	21

Keterangan:

- LB – Lolos Butuh
- JPT- Jabatan Pimpinan Tertinggi
- ATY - Anggota Tim Yuniior
- KTY - Ketua Tim Yuniior

6. Sarana dan Prasarana Baru di BPK 2018

A. Perpustakaan Riset BPK

Tuntutan terhadap meningkatnya kualitas pemeriksaan, membuat Badan Pemeriksa Keuangan terus melakukan langkah-langkah untuk menaikkan mutu SDM. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan sekaligus pemeriksanya adalah dengan memperkuat data pendukung pemeriksaan.

Upaya ini diwujudkan BPK dengan membangun Perpustakaan Riset BPK di Kantor Pusat BPK. Ini tentu bukan sekadar ruang tempat penyimpanan buku, karena di sini lah disiapkan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik.

Perpustakaan ini menyediakan 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku. Tentu tempat riset ini menyediakan *e-books*, dan *e-journal* sebagaimana sebuah

Perpustakaan Riset BPK menyediakan 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku.



perpustakaan modern.

Perpustakaan BPK ini tidak hanya untuk para pemeriksa BPK. Publik juga bisa mengakses Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai bahan riset di sini. Bahkan peran masyarakat dalam melakukan riset mengenai tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Hasil riset tersebut akan berguna untuk menambah literasi publik dalam memahami tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.

Untuk tujuan itu lah BPK membangun dan menyediakan perpustakaan dengan koleksi buku-buku maupun jurnal mengenai tata kelola keuangan negara.

B. Ruang Publik di BPK Perwakilan Sumbar

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang mempunyai ruang publik, yang berfungsi sebagai tempat untuk melayani masyarakat yang memerlukan pelayanan dari BPK. Ruang yang diberi nama “Balai Basuo” berlokasi di lantai dasar dan terhubung dengan perpustakaan BPK Perwakilan Sumbar.

Ruangan yang dikenal sebagai Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) ini berfungsi sebagai tempat untuk pelayanan publik atau masyarakat umum yang membutuhkan informasi mengenai BPK.

Balai Basuo ini diharapkan dapat menjadi wajah BPK yang dapat memberikan penjelasan dan informasi yang memuaskan masyarakat. Selain Balai Basuo, Kantor BPK

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga memiliki masjid baru, yang bisa digunakan untuk masyarakat umum menjalankan ibadahnya.

C. Kantor Sekretariat ASEANSAI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih sebagai Sekretariat ASEANSAI periode 2018 – 2023 pada ASEANSAI Summit ke-4 yang berlangsung di Laos pada November 2017. Sebagai wujud komitmen menjalankan amanat tersebut BPK RI membangun Kantor Sekretariat ASEANSAI yang berlokasi di Lantai 1 Kantor Pusat BPK RI, Jalan Gatot Subroto Kavling 31, Jakarta.

BPK akan memfasilitasi pelaksanaan semua kegiatan ASEAN Supreme Audit Institution (ASEANSAI) beserta para pemangku kepentingan dan lembaga donor. BPK juga ikut mendukung negara-negara ASEAN dalam meningkatkan peran perangkat pemerintahan untuk mewujudkan kemakmuran rakyatnya.

Kepercayaan yang kembali diterima BPK sebagai sekretariat ASEANSAI adalah merupakan suatu kehormatan bagi BPK. BPK menghargai tantangan ini dan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan para anggota ASEANSAI. Kantor Sekretariat ASEANSAI adalah simbol rasa saling menghormati dari masing-masing Supreme Audit Institution (SAI), dan sebagai pemimpin di setiap negara, terus bergerak untuk mendukung berbagai tujuan pembangunan dengan berbagai keadaan berbeda yang dihadapi setiap negara.



Ketua BPK RI meresmikan Kantor Sekretariat ASEANSAI yang berlokasi di Lantai 1 Kantor Pusat BPK RI, Jalan Gatot Subroto Kavling 31, Jakarta.

D. Pemancangan Tiang Pertama Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltara

Pekerjaan pembangunan gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dimulai ditandai dengan dilakukannya pemancangan tiang pertama atau *goundbreaking* di Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin, 8 Oktober 2018.

Kantor baru yang dibangun di atas tanah seluas 13.729 m2 ini cukup representatif dan strategis, karena berada di jalan utama yaitu Jl. Mulawarman Kota Tarakan dan dekat dengan bandar udara.

Direncanakan gedung dengan total luas lantai 5.030 m2 dan dibangun secara multiyears ini akan terdiri atas 4 lantai untuk gedung kantor serta 2 lantai untuk gedung penunjang (ruang auditorium dan ruang arsip).

7. Pengembangan Teknologi Informasi 2018

A. Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP)

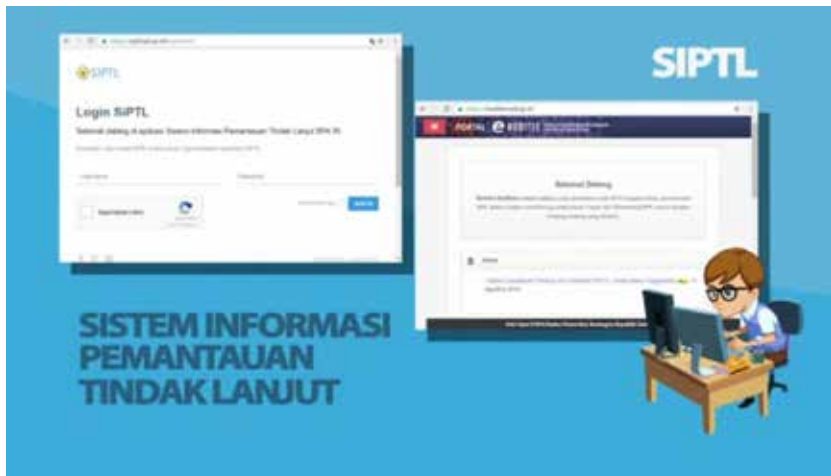
SiAP merupakan *core system* pada arsitektur Teknologi Informasi BPK, yang digunakan Tim Pemeriksa BPK. SiAP berinteraksi dengan sistem-sistem lain di BPK dan tidak dapat berdiri sendiri. SiAP digunakan oleh Tim pemeriksa untuk mengelola kertas kerja pemeriksaan (KKP). SiAP juga telah dilengkapi dengan metodologi pemeriksaan BPK, yang berisi prosedur, langkah dan *template* KKP sehingga diharapkan memudahkan pekerjaan Tim Pemeriksa.

Aplikasi SiAP digunakan oleh Tim pemeriksa untuk mengelola kertas kerja pemeriksaan (KKP).



Sampai dengan Semester II 2018, implementasi SiAP digunakan 84 tim pemeriksa LKKL/LKBUN dan 316 tim pemeriksa LKPD. Sistem pemeriksaan ini terus dikembangkan, termasuk SiAP web dengan sejumlah fitur baru.

B. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL)



Untuk memudahkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Biro TI BPK mengembangkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) yang dapat mempercepat proses review dan persetujuan proses tindak lanjut.

Pada tahun 2018, Biro TI melakukan pembaruan dengan memperkenalkan SIPTL versi 2. Sampai Desember, sistem ini sudah diuji coba di kalangan terbatas untuk menyempurnakan sejumlah fitur.

SIPTL versi 2 ini akan membuat BPK secara kelembagaan mampu menerapkan *fast response operations*, lincah (*agile*), memiliki keselarasan (*alignment*), dan dapat beradaptasi terhadap perubahan baik internal maupun eksternal serta menerapkan ketatalaksanaan yang lebih efektif, efisien dan fleksibel.

SIPTL yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Pemeriksaan yang dapat mempercepat proses review dan persetujuan proses tindak lanjut.

C. Aplikasi Konsolidasi Dana Desa

Aplikasi Konsolidasi Dana Desa adalah aplikasi pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Aplikasi ini berbasis website untuk mengkonsolidasi hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yang dilakukan tim BPK.

Konsolidasi Dana Desa merupakan bagian dari Portal eAudit yang diperluas fungsinya. Aplikasi ini mulai digunakan pada bulan November 2018.

D. Aplikasi *Dashboard* Tema dan Fokus Pemeriksaan

Aplikasi ini mulai dibangun pada September 2018 dan saat ini masih dalam tahap uji coba.

Aplikasi *Dashboard* Tema dan Fokus Pemeriksaan dibutuhkan untuk:

1. menyediakan informasi bagi pimpinan
2. mempermudah pengambilan simpulan/penilaian mendalam
3. pemantauan pelaksanaan tema dan fokus pemeriksaan
4. Penarikan kesimpulan atas pemeriksaan tema dan fokus sesuai renstra
5. Untuk membuat Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahun (IHPL)



BAB 5 **PENDIDIKAN DAN** **PELATIHAN PEMERIKSAAN** **KEUANGAN NEGARA**

Pendidikan dan Pelatihan di Badan Pemeriksa Keuangan ditangani oleh Badan Pendidikan dan Latihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN). Badiklat PKN merupakan Unit Pelaksana BPK yang sebelumnya bernama Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat).

Badiklat PKN mempunyai tugas untuk merancang, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan pembimbingan bagi pelaksana BPK dan diklat bagi pihak di luar BPK. Tidak kurang dari 242 program pendidikan dan pelatihan (Prodik) diselenggarakan untuk tahun 2018.

	PENYELENGGARA				
JENIS DIKLAT	Badiklat	Balai Diklat Medan	Balai Diklat Yogyakarta	Balai Diklat Gowa	JUMLAH
Teknis Pemeriksaan	25	2	15	10	52
Teknis Kelembagaan	55	6	24	8	93
Latsar/ Prajabatan	8	4	2	6	20
Fungsional	7	8	5	5	25
Kepemimpinan 3	2				2
Kepemimpinan 4			1		1
Eksternal	20	4	18	6	48
Workshop	1				1
JUMLAH	118	24	65	35	242

Tabel Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018

Jumlah peserta yang mengikuti diklat sebanyak 7.014 orang dengan 6.772 peserta berhak memperoleh sertifikat kelulusan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Diklat pada Badiklat PKN diikuti 4.325 peserta dengan jumlah peserta yang lulus 4.233 orang
2. Diklat pada Balai Diklat PKN Medan diikuti 1.103 peserta dengan jumlah peserta yang lulus 962 orang
3. Diklat pada Balai Diklat PKN Yogyakarta diikuti 641 peserta dengan jumlah peserta yang lulus 632 orang

4. Diklat pada Balai Diklat Gowa diikuti 945 peserta dengan jumlah peserta yang lulus 945 orang.

Sebanyak 26 diklat dibatalkan atau dtunda disebabkan adanya permintaan penundaan pelaksanaan dari satker maupun alasan tidak terpenuhinya kuota jumlah peserta diklat.

Selain itu, Badiklat PKN juga bertugas menyelenggarakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, serta akreditasi unit penyelenggara diklat di bidang pemeriksaan keuangan negara.

Sebagai pusat pendidikan, Badiklat harus selalu bisa melahirkan pemeriksa-pemeriksa tangguh dan kompeten. Apalagi pemeriksa selama ini menjadi ujung tombak BPK dalam menjalankan wewenang sebagai pemeriksa penggunaan keuangan negara. Pembentukan Badiklat juga sejalan dengan meningkatnya permintaan pihak luar baik dari pihak pemerintahan maupun swasta terhadap penyediaan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan.

Kiprah Badiklat PKN ini sudah mendapat pengakuan internasional, terbukti datangnya sejumlah perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan negara lain melakukan studi banding, seperti dilakukan *Mongolian National Audit Office* (MNAO). Tim MNAO mempelajari program dan strategi keberlangsungan pendidikan dan pelatihan profesional yang dimiliki oleh BPK pada 10 Desember 2018.

1. Perkembangan Sarana dan Prasarana Pusdiklat

Badan Pendidikan dan Latihan Pemeriksaan Keuangan Negara berkantor di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Badiklat PKN ini dibangun di atas tanah seluas 27.790 m², yang terdiri atas bangunan utama 17 lantai dilengkapi sejumlah sarana dan prasarana lengkap untuk menggelar pelatihan.

Di Ruang Pembelajaran, terdapat satu auditorium, satu aula dan 8 ruang belajar. Di Wisma, terdapat 3 ruang pertemuan, 2 laboratorium komputer, dan satu ruang

laboratorium praktik penyusunan dan pemeriksaan, ruang simulasi pengadilan, perpustakaan dan masjid. Di sini juga ada ruang bioskop untuk sarana pembelajaran multi media. Untuk peserta pelatihan yang menginap, Wisma Badiklat dengan bangunan tujuh lantai dilengkapi 75 kamar (30 kamar standar, 37 kamar *deluxe*, 6 kamar eksekutif, dan 2 kamar VIP), 3 ruang pertemuan dan 2 ruang makan.

Sarana dan prasarana ini memungkinkan Badiklat menggelar dua atau tiga kelas berbeda secara bersamaan. Lokasi Badiklat di Jakarta Selatan termasuk mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum seperti kereta komuter.

Selain di Jakarta, Badiklat juga mempunyai Balai Pendidikan dan Latihan di Gowa, Medan, dan Yogyakarta. Balai Diklat di Gowa, Sulawesi Selatan, yang diresmikan tahun 2017, semula berada di Kota Makassar. Pengembangan balai diklat ini didorong oleh semakin besarnya kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pelaksana BPK di wilayah Indonesia Timur termasuk para pengelola keuangan Inspektorat di wilayah Indonesia Timur. Balai Diklat BPK di Gowa ini dikembangkan sesuai dengan tema pembelajaran yakni sebagai diklat infrastruktur.

Gedung Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa ini dibangun di atas tanah seluas 20.313 m2 berlokasi di Jalan HM. Yasin Limpo, Kabupaten Gowa. Balai Diklat ini dibangun dengan tiga gedung utama yaitu Gedung

Gedung
Balai Diklat
Pemeriksaan
Keuangan
Negara
di Gowa,
Sulawesi
Selatan.



Perkantoran dan Diklat, Gedung Sarana Asrama dan Wisma, serta gedung sarana ibadah.

Di Medan, Balai Diklat memiliki dua bangunan. Satu bangunan 2 lantai dengan enam ruang kelas masing-masing seluas 67 m², ruang komputer, ruang tunggu instruktur, dan perpustakaan. Bangunan lainnya untuk auditorium seluas 1.368 m². Di bawahnya untuk ruang makan dan poliklinik. Balai Diklat Medan juga dilengkapi gedung 3 lantai seluas 2.285 m² dengan 72 kamar, serta sarana olahraga.

Balai Diklat Yogyakarta mempunyai fasilitas 3 ruang kelas berkapasitas masing-masing 40 orang dan 2 laboratorium komputer dengan kapasitas masing-masing 20 orang. Balai juga dilengkapi wisma dengan 40 kamar tidur untuk tempat menginap peserta. Pelatihan di Balai Diklat DIY juga bisa memanfaatkan fasilitas di Kantor BPK Perwakilan DIY, yaitu auditorium, perpustakaan, poliklinik dan lahan parkir.

2. Program Diklat Pemeriksaan

Sepanjang tahun 2018, Badan Pendidikan dan Latihan Pemeriksaan Keuangan Negara menggelar 298 pelatihan baik untuk kepentingan internal BPK atau profesional di luar BPK. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan di Badiklat PKN Jakarta dan juga di Badiklat PKN Yogyakarta, Medan dan Gowa.

Pelatihan di bidang pemeriksaan mendominasi program diklat (prodik) di Badiklat PKN. Sejumlah pelatihan pemeriksaan di antaranya tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah bagi CPNS sampai Pemeriksaan Bank Syariah. Setidaknya ada 60 jenis Prodik Pemeriksaan digelar pada tahun 2018. Beberapa di antaranya harus dilakukan dalam beberapa angkatan karena banyaknya jumlah peserta, seperti Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa, Diklat Anggota Tim Yuniior dan Diklat Ketua Tim Yuniior yang masing-masing dilakukan tiga angkatan.

Badiklat juga beberapa kali menggelar pelatihan atas permintaan pihak tertentu, misalnya pemerintah daerah seperti Pemeriksaan Kinerja untuk staf Inspektorat Kabupaten Kediri, yang diselenggarakan di Badiklat

Yogyakarta pada 29 Oktober 2018-1 November 2018. Masih banyak pelatihan lain untuk staf pemerintah daerah seperti Audit Aset Tetap untuk staf Pemerintah Kota Pasuruan atau Pemeriksaan Investigatif pada staf Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Tabel Jenis Program Pendidikan dan Pelatihan Badiklat PKN tahun 2018 bidang Pemeriksaan

No.	Jenis Prodik Pemeriksaan
1	Penulisan Laporan Pemeriksaan Keuangan
2	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah-Pengantar
3	Penulisan Laporan Pemeriksaan Kinerja
4	Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan
5	Pemeriksaan Aset dan Investasi
6	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pembangunan Bendungan
7	Pemeriksaan Perbankan Syariah
8	Penentuan Area Kunci Pemeriksaan Kinerja
9	Penetapan Kriteria Pemeriksaan Kinerja
10	Pengantar Pemeriksaan Kinerja
11	Persiapan Reviu Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaa
12	Reevaluasi Barang Milik Negara
13	Teknik Pengumpulan dan Analisis Bukti Pemeriksaan Kinerja
14	Analisis Kebutuhan Harapan Pemangku Kepentingan
15	Pemeriksaan Hal Khusus
16	Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa
17	Penghitungan dan Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
18	Persiapan Tim Pemeriksaan pada International Atomic Energy Agency (IAEA) Keuangan
19	Teknik Pemahaman Entitas dan Penentuan Area Potensial
20	Teknik Pengumpulan dan Analisis Bukti Pemeriksaan Investigatif
21	Pemeriksaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
22	Pemeriksaan Investigatif_Pengantar
23	Penjaminan Mutu Pemeriksaan
24	Penulisan Laporan Pemeriksaan Investigatif
25	Coaching For Auditor BD PKN
26	Pemeriksaan Investigatif - Pengantar - Penunjang BD PKN

27	Aplikasi Ti Bidang Pemeriksa (ATY Ak)Kls 37 BD PKN
28	Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan
29	Pemeriksaan LK Pemerintah
30	Aplikasi Ti Bidang Pemeriksa
31	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
32	Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan
33	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrua
34	Penentuan Area Kunci
35	Penulisan Laporan Pemeriksaan Kinerja
36	Fraud Control System
37	Pemeriksaan Pendapatan Daerah
38	Penulisan Laporan Pemeriksaan Investigatif
39	Pemeriksaan Infrastruktur Sumber Daya Air
40	Pemeriksaan Belanja Daerah
41	Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa
42	Pemeriksaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
43	Analytical Thinking For Auditor
44	Penyelesaian TLHP
45	Pemeriksaan Kinerja Inspektorat Kab.Probolinggo
46	Pemeriksaan Kinerja
47	Pemeriksaan LK Pemerintah (CPNS-Akuntansi)
48	Pemeriksaan Investigatif
49	Aplikasi TI Bidang Pemeriksaan (CPNS-Akuntansi)
50	Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa
51	Diklat Anggota Tim Yunior
52	Diklat Ketua Tim Yunior
53	Diklat Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan
54	Diklat Teknis E-Audit
55	Pemeriksaan Investigatif (Kab.Situbondo)
56	Pemeriksaan Investigatif (Kab.Blitar)
57	Pemeriksaan Kinerja (Kab.Kediri, Kab. Probolinggo)
58	Pemeriksaan Keuangan Negara (Kab.Kediri)
59	Reevaluasi Barang Milik Negara
60	Audit Aset Tetap (Kota Pasuruan)

3. Program Diklat Non-Pemeriksaan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara juga banyak memberikan materi pelatihan yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan. Sepanjang tahun 2018. Berbagai pelatihan digelar, sebagian atas permintaan satuan kerja di BPK, seperti pelatihan fotografi, kehumasan sampai master of ceremony.

Tabel Jenis Program Pendidikan dan Pelatihan Badiklat PKN tahun 2018 bidang Non-Pemeriksaan

Lebih dari 50 program diklat non-pemeriksaan dilakukan Badiklat PKN, termasuk menyelenggarakan Pra-Jabatan untuk Calon Aparatur Sipil Negara yang diterima BPK. Sebagian besar pelatihan ini adalah permintaan Satuan Kerja di BPK untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai di unit masing-masing. Beberapa pelatihan mengundang profesional di bidangnya dari luar BPK.

No.	Jenis Prodik Non-Pemeriksaan
1	Media Handling
2	Legal Drafting
3	Sistem aplikasi di bidang keuangan
4	Penyusunan Analisis Beban Kerja
5	Pengadaan Infrastruktur
6	Sistem Aplikasi di Bidang Keuangan
7	Pengelolaan Aset Negara (BMN)
8	Penulisan Kajian, Pendapat, Pedoman dan Ikhtisar
9	Manajemen perawatan dan pemeliharaan gedung/bangunan
10	Penganggaran Berbasis Kinerja
11	Coaching and mentoring
12	Microsoft Sharepoint dan Desain Web
13	Penulisan Pendapat Hukum
14	Training of Trainers
15	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
16	Kesekretariatan Tim Penilai Angka Kredit JFP
17	Komunikasi Kepemimpinan
18	Change Management
19	Pelayanan Prima
20	Diklat Peran Pengendali Mutu
21	Knowledge Management
22	Teknik Membaca Cepat

23	Penulisan Populer dan Infografis
24	Teknik Membaca Cepat
25	Diklat Pengendali Teknis
26	Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
27	Coacing For Latsar BD PKN
28	Manajemen Resiko
29	Brain Power For Productivity
30	Data Governance
31	Event Management
32	Perumusan Pendapat
33	Orientasi Ke-BPK-an CPNS Non Akun
34	Dasar-dasar Manajemen & Administrasi SD
35	Orientasi Ke-BPK-an CPNS Akun
36	Kearsipan dan Kesekretariatan
37	Achievment Motivation
38	Master of Ceremony
39	Manajemen Kinerja
40	Pengelolaan Jaringan
41	Budaya Organisasi
42	Keprotokolan
43	Perencanaan Pengadaan
44	Manajemen Perkantoran
45	Manajemen Kompetensi
46	Event Management
47	Fotografi dan Dokumentasi Kehumasan
48	Pengelolaan Informasi Publik
49	Penyusunan Naskah Pidato
50	Teknik Pemahaman Entitas dan Pengidentifikasian Masalah
51	Coaching and Mentoring
52	Konseling
53	Manajemen Perpustakaan
54	Effective Leadership
55	Prajabatan CPNS Golongan III Non- Akuntansi
56	Kearsipan dan Kesekretariatan
57	Korespondensi, Tata Naskah Kedinasan dan Aplikasi Persuratan
58	Dasar-dasar Manajemen & Administrasi SDM
59	Dasar-dasar Kehumasan

4. Kegiatan Diklat Tahun 2018

Badan Pendidikan dan Latihan Pemeriksa Keuangan Negara sepanjang tahun 2018 melakukan sejumlah kegiatan pelatihan dan non-pelatihan. Di bidang pelatihan, Badiklat menyelenggarakan 242 pelatihan di bidang pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, baik diikuti peserta internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kepuasan peserta diklat atas pelatihan selama tahun 2018 menunjukkan tingkat “puas” atau lebih tepatnya menunjukkan nilai 4,01 dari skala 5.

Badiklat juga melakukan peningkatan manajemen pelatihan dengan membagi penugasan bagi widyaiswara dan fasilitator setiap 3 bulan sekali.

Sehubungan dengan upaya memfasilitasi salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengikuti proses pengadaan KAP untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, Badiklat PKN melaksanakan diklat sertifikasi KAP setiap tahunnya.

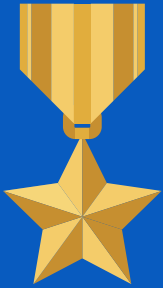
Pemberitahuan penyelenggaraan pendidikan profesi berkelanjutan ini selain dilakukan melalui pengumuman pada *web* Badiklat PKN juga dengan mengirimkan pemberitahuan melalui surat ke Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) serta Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Diklat sertifikasi diikuti oleh partner maupun auditor KAP pada bulan Juli 2018.

Karena banyaknya peminat, Diklat Sertifikasi KAP ini dibagi dalam 3 gelombang (16-17 Juli 2018, 19-20 Juli 2018 dan 23-24 Juli 2018) dengan peserta 87 orang sedangkan peserta diklat sertifikasi KAP tingkat pemeriksa terbagi dalam 2 *batch* (16-20 Juli 2018 dan 23-27 Juli 2018) dengan peserta 183 orang.

Selain Diklat Sertifikasi KAP, pelatihan dengan peserta eskternal BPK juga banyak dilakukan Badiklat PKN atas permintaan berbagai pihak. Ada 26 pelatihan yang diselenggarakan dengan jumlah peserta 824 orang.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan yang Digelar Badiklat PKN atas Permintaan Pihak Eskternal BPK

No.	Program Pendidikan dan Pelatihan
1	Pemeriksaan Barang dan Jasa Pada Inspektorat Pemerintah Kota Pasuruan
2	Perhitungan Kerugian Negara pada Inspektorat Pemkot Malang
3	Pra Penugasan KAP Tingkat Partner dan Pemeriksa
4	Pra Penugasan KAP LKPP
5	Pra Penugasan KAP Tingkat Partner dan Pemeriksa
6	Pemeriksaan Belanja Daerah bagi Pegawai Inspektorat Manado
7	Pemeriksaan Barang dan Jasa Inspektorat Kabupaten Magetan
8	Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Inspektorat Balikpapan
9	Standar Akuntansi Pemerintahan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
10	Pemeriksaan Kinerja bagi Pegawai Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pasuruan
11	Pemeriksa Kinerja bagi Pegawai Inspektorat Pemerintah Kota Balikpapan
12	Pemeriksaan Belanja Daerah bagi Pegawai Inspektorat Pemerintah Kota Manado Tahap II
13	Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual bagi Pegawai di lingkungan Kab. Lany Jaya
14	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Nganjuk dan Pemkab Jombang
15	Sertifikasi KAP (partner)
16	Sertifikasi KAP (Pemeriksa)
17	Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah bagi Pegawai Pemprov Sumbar
18	Pemeriksaan Kinerja Batch 1 bagi pegawai PT.PLN
19	Pemeriksaan Keuangan bagi pegawai Inspektorat Badan Pusat Statistik
20	Pemeriksaan Kinerja bagi pegawai Inspektorat Pemkab Probolinggo
21	Pemeriksaan Kinerja bagi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Kediri
22	Pemeriksaan Investigatif bagi pegawai Inspektorat Kab.Blitar dan Inspektorat Kab.Kediri
23	Pemeriksaan investigatif bagi Pegawai Inspektorat Kab.Situbondo
24	Pemeriksaan kinerja bagi pegawai inspektorat Pemkab Blitar
25	Pengelolaan Aset (BMD) bagi pegawai Pemkab Nias
26	SPKN terkait pemeriksaan BUMN bagi partner di E/Y Global Limited



BAB 6 **PENCAPAIAN** **INSTITUSI**



1. BPK Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya itu dilakukan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk kedua kalinya BPK pada tahun 2018 memperoleh penghargaan tersebut, setelah tahun sebelumnya BPK juga memperoleh penghargaan yang sama dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Anugerah itu diberikan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Se-Dunia pada 10 Desember 2018.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen mempercepat implementasi reformasi birokrasi. Pembangunan Zona Integritas sendiri merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi. Dimana Reformasi Birokrasi memiliki tujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengibaratkan penghargaan WBK sebagai emas dengan bintang empat dan WBBM sebagai platinum atau bintang lima dalam reformasi birokrasi. Untuk itu, ia mendorong seluruh instansi berlomba-lomba menjaga instansi bersih dari praktik korupsi dan gratifikasi, juga memberikan pelayanan terbaik terhadap warga.

Predikat itu diberikan setelah Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Zona Integritas di suatu unit kerja. Evaluasi dilakukan atas sejumlah indikator yang meliputi manajemen perubahan, penataan



tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Untuk penilaian WBBM selain indikator tersebut, ditambahkan dengan indikator penguatan kualitas pelayanan publik.

BPK dalam hal ini dinilai berhasil menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerjanya. Untuk mempertahankan predikat tersebut, BPK RI telah melakukan sejumlah langkah signifikan antara lain melakukan otomasi proses bisnis dengan pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SIAP) dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM). Sedangkan untuk pelayanan kepada pihak eksternal BPK telah menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SISPTL) dan Sistem Aplikasi Informasi Pengaduan (SIPADU).

Penghargaan pembangunan zona integritas diterima BPK pada kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia 10 Desember 2018.

2. BPK Perwakilan Terima Penghargaan pada HAKORDIA 2018

Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) diperingati setiap tahun pada tanggal 9 Desember. Berbagai kegiatan diselenggarakan sebagai tekad bersama memerangi korupsi oleh lembaga penegak hukum dan pemerintah.

Pada tahun 2018 Kementerian PANRB kembali memberikan penghargaan kepada unit kerja yang berhasil menjadi percontohan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebanyak 910 unit kerja diajukan sebagai peserta untuk dinilai. Namun setelah melalui proses evaluasi, hanya 200 unit kerja yang dinilai layak memperoleh predikat WBK dan lima unit kerja berpredikat WBBM. Tiga di antaranya berasal dari BPK RI.

Tiga Unit Kerja BPK yang memperoleh predikat sebagai unit kerja percontohan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berhasil memperoleh predikat sebagai unit kerja percontohan WBK karena beberapa inovasi yang dilakukukannya. Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo menyebut sejumlah langkah yang dilakukan jajarannya. Pertama, dengan memperbaiki *internal service orientation*, terutama dalam mengelola area kebutuhan para pegawai seperti layanan tempat penitipan anak, melestarikan makan *bajamba*, menyediakan fasilitas kebugaran, kegiatan BPK Sumbar GOWES, dan lainnya.

Makan *bajamba* atau juga disebut makan *barapak* adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau

Makan
Bajamba
di BPK
Perwakilan
Sumbar



dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Secara harfiah makan *bajamba* mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial.

Kedua, penguatan proses bisnis dengan mewujudkan komitmen membangun suasana kerja yang tidak seenaknya, dengan menghidupkan kembali channel perangkat TI untuk memenuhi IKU. Ketiga, memperbaiki *Public Service Orientation* diawali dengan penataan *lay out* kantor dengan redefinisi public service area dan menghidupkan berbagai aktifitas *sharing knowledge* untuk kepentingan internal maupun publik. Pencanangan Zona Integritas itu sendiri telah dicanangkan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2016 namun baru berhasil menyabet penghargaan setelah tiga tahun kemudian.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. Hermanto, M.Si. mengatakan, penghargaan itu diperoleh karena BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mampu menjalankan pembangunan Zona Integritas dengan melakukan peningkatan Ketatalaksanaan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur. Sebagai langkah berikutnya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mentargetkan menjadi Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

3. BPK Terima Penghargaan Terbaik JDIH 2018

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sejak tahun 2014 secara rutin memberikan penghargaan kepada pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik. JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

Penghargaan diberikan untuk sejumlah kategori, yakni

BPK menerima penghargaan sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik untuk kategori instansi kementerian/ lembaga pada tahun 2017.

BPK kembali memenangi penghargaan sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik untuk kategori instansi pusat.



instansi pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Pada tahun 2018, BPK kembali memenangi penghargaan sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik untuk kategori instansi pusat. Lembaga lain yang mendapat penghargaan untuk kategori yang sama adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Tenaga Kerja. Penghargaan yang sama sebelumnya diterima BPK pada tahun 2017. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas usaha BPK memberikan perhatian, dukungan, pengelolaan dan kemajuan JDIH di institusinya.

Tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM memberikan piagam penghargaan kepada 12 (dua belas) anggota JDIH terbaik untuk berbagai kategori. Tujuan pemberian penghargaan ini untuk memacu semangat anggota JDIH agar terus berlomba memajukan dan berinovasi dalam mengelola JDIH. Serta berlomba mempercepat optimalisasi JDIH sebagai “portal” pencarian dokumen hukum dan basis data dokumen hukum yang mudah diakses, lengkap, akurat dan terpercaya.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Nasional berdasarkan hasil evaluasi yang mereka lakukan. Penilaian didasari atas sejumlah aspek seperti aspek pengelolaan JDIH, evaluasi website sesuai 7 kriteria website yang baik, serta penilaian

atas upaya membangun kerja sama yang berkesinambungan dengan Pusat JDIH.

Semua hasil pemeriksaan dan produk hukum BPK bisa diperoleh publik dengan mudah di website BPK <http://bpk.go.id/> atau melalui Pusat Informasi dan Komunikasi BPK.

4. Penghargaan dari Media

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dinilai sebagai Lembaga Negara Terpopuler sepanjang tahun 2017. Penganugerahan itu diberikan pada ajang PR Indonesia Award (PRIA) 2018. Penghargaan itu diserahkan langsung CEO dan Founder PR Indonesia Asmono Wikan pada acara Malam Penghargaan PRIA 2018 di Surabaya, 30 Maret 2018.

PRIA adalah kompetisi yang rutin diadakan PR Indonesia sejak 2016. Kompetisi di bidang media ini dilakukan di antara korporasi dan organisasi, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Anugerah PRIA merupakan apresiasi PR Indonesia terhadap kinerja humas/public relation (PR) yang unggul dari korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tahun 2018, kompetisi ini diikuti 463 peserta, meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya diikuti oleh 237 peserta.



BPK meraih penghargaan sebagai Lembaga Negara Terpopuler di Media pada ajang PR Indonesia Award 2018. Penghargaan ini diterima oleh Gunarwanto, Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan BPK di Surabaya.

Untuk tahun ini PRIA dibagi menjadi 9 kategori, yakni: Owned Media, Kanal Digital, Program PR, Program CSR, Penanganan Krisis, Manual (pedoman) Tata Kelola Kehumasan, Departemen PR, hingga Laporan Tahunan. Penghargaan ini bagi BPK menjadi inspirasi dan dorongan untuk memajukan korporasi dari sisi Public Relation (PR)

Selain penghargaan ini, di tahun yang sama BPK juga memperoleh penghargaan di bidang *best article* yang dimuat dalam ASOSAI Journal. Artikel berjudul ***The role of SAIs to achieve more transparent, accountable and sustainable REDD+ scheme: the case of Indonesia***, dinilai sebagai artikel terbaik yang dimuat di ASOSAI Jurnal periode 2015-2018. ASOSAI atau Asian Organization of Supreme Audit Institutions adalah asosiasi yang mewadahi lembaga pemeriksa keuangan negara-negara Asia.

Artikel yang ditulis oleh Tri Darwata, pemeriksa AKN I, memperoleh skor 259 dari nilai maksimal 300 dan mengalahkannya 30 artikel lainnya yang dipublikasikan di ASOSAI Journal pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Penghargaan itu diumumkan penyelenggara saat kegiatan The 14th ASOSAI Assembly meeting di Hanoi, Vietnam, 19 September 2018.



BAB 7 **PERAN SERTA BPK** **DALAM KANCAH** **INTERNASIONAL**

Sepanjang tahun 2018 BPK terus meningkatkan perannya dalam kancah Internasional. Baik di tataran multinasional, Asean maupun bilateral. Peran aktif itu terlihat dari kembalinya BPK dipercaya sebagai *external auditor* IAEA (International Atomic Energy Agency) setelah yang pertama tahun 2015.

Di tingkat regional Asia, BPK RI kembali terpilih sebagai anggota ASOSAI Governing Board untuk 3 tahun ke depan, mengirimkan sejumlah *trainer* dalam beberapa pelatihan atau seminar internasional selama tahun 2018.

1. Hubungan Multinasional

BPK terus menunjukkan kiprahnya dalam kancah kerjasama internasional. Sebagai anggota Organisasi Lembaga Audit International INTOSAI (*International Organization of Supreme Audit Institutions*), BPK mengambil peran aktif. Di antaranya dengan mengikuti berbagai pertemuan multinasional. Antara lain, pertemuan Tahunan ke-27 INTOSAI Working Group on IT Audit (WGITA) yang diselenggarakan di Sydney, Australia pada 17-19 April 2018.

Agenda pertemuan kali ini melaporkan perkembangan proyek WGITA di bawah Work Plan 2017-2019, sekaligus sebagai forum bertukar informasi dan pengalaman terkait pelaksanaan IT Audit di antara anggota WGITA. BPK selaku Leader Project 3: Data Analytics (Area: IT Audit Techniques) punya kewajiban melaporkan progres pelaksanaan proyek. Pada kesempatan itu BPK juga sempat membagikan pengalamannya dalam mengembangkan kapasitas pemeriksaan berbasis teknologi informasi.

Semenjak BPK RI ditunjuk sebagai *external auditor* IAEA (*International Atomic Energy Agency*) pada sidang umum ke-59 IAEA 2015 lalu di Wina, Austria. BPK telah merampungkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan kinerja IAEA yang menjadi tugasnya, termasuk laporan keuangan IAEA tahun 2017.

Kini BPK kembali ditunjuk sebagai *external auditor* IAEA untuk tahun buku 2018-2019 pada *General Conference* IAEA, pada 21 September 2017 lalu. BPK juga telah



Ketua BPK RI, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., C.P.A membahas peningkatan perbaikan kinerja pengelolaan sektor publik bersama dengan Auditor General ANAO, Mr. Grant Hehir, Senior Advisor ANAO, Mr. Andrew Pope dan Mr. Kristian Gage tanggal 17 Juli 2018 di Bandung.



melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan IAEA tahun buku 2018 pada bulan Oktober – November 2018.

Sebagai anggota *External Auditor* IAEA, BPK juga menjadi anggota *UN Panel of External Auditor*. Panel *External Auditor* PBB adalah forum bagi lembaga pemeriksa yang bertugas sebagai *External Auditor* badan-badan dalam komunitas PBB. Dimana mereka juga bertugas memberikan masukan kepada Sekjen PBB dalam memperbaiki tata kelola keuangan di komunitas PBB.

Tanggal 3 – 4 Desember 2018, Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara menghadiri sidang tahunan Panel *External Auditor* ke-58 di New York, Amerika Serikat. Pada kesempatan itu BPK menyampaikan komitmennya untuk mendukung semua rekomendasi yang disampaikan panel

Wakil Ketua BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A menerima kunjungan Executive Director ANAO, Mr. Kristian Gage, dan Audit Manager ANAO, Mr. Rahul Tejani dalam rangka peningkatan strategi pemeriksaan melalui pelaksanaan Workshop on Establishing Robust Contracting Audit to Public Accounting Firm tanggal 23 – 24 Juli 2018



kepada Sekretariat Jenderal PBB untuk tata kelola badan-badan PBB.

Selain menjadi anggota External Auditor IAEA, BPK RI juga dipercaya sebagai *Auditor External Independent Internasional Anti-Corruption Academy (IACA)*. Auditor BPK, Thomas Gatot Hendarto secara resmi ditunjuk sebagai salah satu anggota. Ia akan bertugas selama masa 3 tahun, bersama 2 auditor lainnya dari Rusia dan Thailand. Mereka akan melakukan audit atas laporan keuangan IACA untuk tahun buku 2018 yang pemeriksaannya dilakukan awal 2019.

Saat ini BPK RI juga mengemban amanat sebagai Ketua, sekaligus Sekretariat INTOSAI WGEA (*Working Group on Environmental Audit*) untuk periode 2017-2019. Dimana BPK memiliki tugas *me-manage* dan memantau perkembangan project-project WGEA dan bekerjasama dengan INTOSAI *bodies* terkait *exposure project* tersebut

agar memperoleh *endorsement* di INCOSAI XXIII Rusia.

INTOSAI WGEA merupakan kelompok kerja pemeriksaan lingkungan BPK se-dunia. Dimana tujuan kelompok kerja ini mendorong badan pemeriksa keuangan mempergunakan mandatnya dalam proses kebijakan perlindungan lingkungan. Sebagai Ketua WGEA, BPK telah menyusun audit guidance on forestry audit, menyelenggarakan dan memberikan *training forestry audit* kepada anggota Asosiasi Badan Pemeriksa Keuangan Sedunia /INTOSAI. Kegiatan itu telah dilakukan pada September 2018.

Pada 17 hingga 19 Juli 2018, BPK berkesempatan menjadi tuan rumah pertemuan WGEA bagi anggota INTOSAI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut hadir badan pemeriksa keuangan dari 41 negara anggota INTOSAI WGEA. Pertemuan kali ini mengusung 3 tema besar, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan, pengelolaan lahan berkelanjutan, serta pemeriksaan lingkungan dan masyarakat.



Ketua BPK RI, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C.A., C.P.A., didampingi Duta Besar RI untuk Polandia, Peter Frans Gontha melakukan kunjungan ke Kantor Presiden Supreme Audit Office of Poland (NIK), Mr. Krzysztof Kwiatkowski dalam rangka seminar bilateral terkait Hubungan SAI dan Parlemen, Peran SAI dalam mencapai SDGs, dan Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, di Warsawa, Polandia



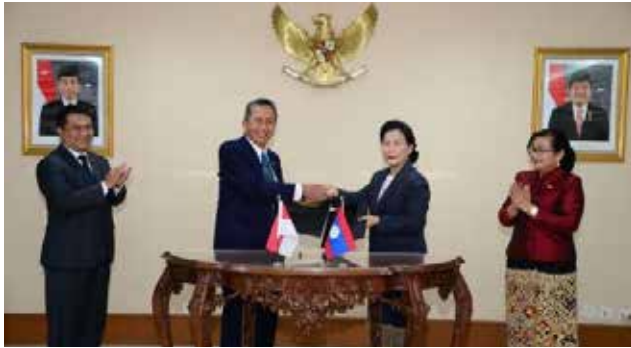
Ketua BPK RI, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., C.P.A. mempekuat hubungan kerja sama dalam rangka meningkatkan kapasitas pemeriksaan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding dengan Auditor General of the State Audit Office of the Republic of Latvia (SAO Latvia), Elite Krumina tanggal 26 November 2018 di Bali.



Pada Oktober delegasi BPK RI yang dipimpin Ketua BPK RI, menghadiri pertemuan Steering Committee INTOSAI WGEA ke-16 di Praha, Republik Ceko. BPK RI sebagai Ketua INTOSAI WGEA memimpin jalannya pertemuan yang dihadiri 38 delegasi dari 14 SAI. Agenda kegiatan tersebut mengesahkan proyek-proyek WGEA periode rencana kerja 2017 – 2019 serta mendiskusikan rencana kerja WGEA periode 2020 – 2022 dan proses pemilihan ketua baru WGEA periode 2020 - 2022.

Selain menjalankan peran-peran tersebut, menyambung kontribusi BPK sebagai salah satu penyusun IDI INTOSAI KSC *audit guidance on SDGs Preparedness*. Serta sejalan dengan peran BPK sebagai Ketua INTOSAI WGEA, pengetahuan dan pengalaman BPK dalam mengaudit *SDGs preparedness* menjadi rujukan komunitas badan audit internasional. Menjadikan BPK banyak diundang menjadi pembicara di konferensi internasional, salah satunya di *Asia Pasific Forum for Sustainable Development Forum* yang diselenggarakan oleh UN ESCAP di Bangkok.

Selain kontribusi aktif dan berbagi pengetahuan, BPK juga telah mengirimkan sejumlah *trainer*-nya dalam beberapa pelatihan atau seminar internasional selama tahun 2018. Antara lain pada acara INTOSAI WGEA *International training on environmental audit* di Jaipur, India; IDI INTOSAI KSC *programme on auditing SDGs preparedness*, IDI ASOSAI *Blended learning Specialist Certification Programme*.



Ketua BPK RI, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C.A., C.P.A., didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif, Kaditama Revbang, Slamet Kurniawan, serta Inspektur Utama, Ida Sundari, menerima kunjungan dari President of The State Audit Organization of Lao People's Democratic Republic, Dr. Mrs. Viengthong Siphandone, yang didampingi oleh Ambassador of Lao PDR to Indonesia, Mrs. Pavanh Nuanthasing, dan delegasi lainnya tanggal 4 April 2018 di Jakarta.

BPK juga memberikan pelatihan kepada beberapa SAI mitra kerjasama bilateral seperti *Training on Performance Audit* untuk Auditor SAO Laos di Vientiane, pelaksanaan *program secondment* terkait hubungan internasional bagi pejabat SAO Laos, dan *program secondment* terkait pemeriksaan kinerja bagi Auditor Level Ketua Tim dari SAV Vietnam di Jakarta.

Sepanjang 2018, BPK juga mendapatkan kepercayaan untuk menyelenggarakan sejumlah seminar internasional. Baik dalam kerangka program kerja komunitas audit internasional maupun program kerjasama bilateral seperti the 18th INTOSAI WGEA *Assembly Meeting*, ASEANSI *Seminar on SDGs*, the 9th FIPP *Meeting*, *High Level meeting* dengan SAI Pakistan, Laos, Latvia dan Polandia.

BPK juga sempat mengikuti pertemuan *Peer Review Conference 2018* di Bratislava, Slovakia. *Peer Review Conference* merupakan ajang pertemuan lebih dari 50 SAI anggota INTOSAI. Konferensi ini digelar sebagai sarana berbagi pengalaman, sekaligus menjadikan *Peer Review* (telaah sejawat) dan sebagai INTOSAI *tools* dalam penilaian SAI.

Pada bulan Juli 2018 BPK RI juga diundang untuk menghadiri acara *SAI Leadership and Stakeholder Meeting “SAI Contributions to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals* yang diselenggarakan oleh United Nations Department of Social and Economic Affairs (UNDESA) bekerjasama dengan INTOSAI Development Initiative (IDI), di markas besar PBB, New York.

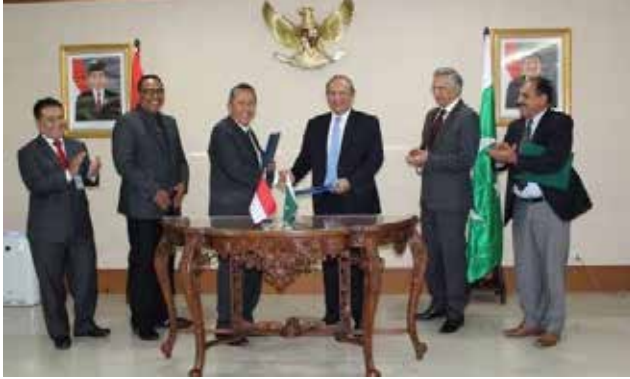
Dalam rangkaian kegiatan itu, delegasi BPK RI sempat menghadiri pertemuan *INTOSAI Side Event United Nations High Level Political Forum on Sustainable Development (UN HLPF)*. Pertemuan itu membahas dan mendiskusikan kontribusi SAI untuk memantau pelaksanaan SDG di tingkat global, nasional dan regional. Aktifnya BPK dalam audit terkait SDGs, diharapkan dapat menjadi *role model* dalam komunitas internasional untuk mendorong pencapaian Agenda 2030 melalui audit yang dilakukan.

2. Kerjasama Lingkup Asia / ASEAN

Kerjasama BPK di lingkup regional Asia pada 2018 diawali dari kegiatan *The 7th Seminar on Environmental Auditing and 6th Working Meeting of ASOSAI WGEA* yang diselenggarakan di Khao Yai, Thailand, Januari 2018. Sebagai Ketua INTOSAI WGEA, Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara membuka kegiatan bertema *the use of IT application in environmental auditing*.

Acara yang dihadiri perwakilan dari 22 SAI anggota ASOSAI WGEA dan perwakilan dari Afrika dan Eropa itu bertujuan mendiskusikan perkembangan terbaru aplikasi *Big Data* dalam pemeriksaan lingkungan.

Pada September 2018 ASOSAI menyelenggarakan *The 14th ASOSAI Assembly meeting* di Hanoi, Vietnam. Acara tiga tahunan ini dihadiri 190 peserta dari 41 SAI anggota ASOSAI dan pengamat dari INTOSAI, dan perwakilan dari lembaga donor. *ASOSAI Assembly meeting* memiliki agenda melaporkan kegiatan ASOSAI selama 3 tahun, pengesahan Ketua ASOSAI yang baru dan pemilihan anggota ASOSAI *Governing Board* untuk periode 3 tahun yang akan datang. Termasuk transfer kesekretariatan ASOSAI dari SAI Korea ke SAI China.



Ketua BPK RI,
Prof. Dr.
Moermahadi
Soerja Djanegara,
CA., C.P.A
melaksanakan
penandatanganan
Memorandum of
Understanding
Kerja Sama
Bilateral dengan
Auditor General
Supreme Audit
Institution of
Pakistan, Mr. Javaid
Jehangir disaksikan
oleh Wakil Ketua
BPK, Prof. Dr.
Bahrullah Akbar,
M.B.A tanggal
26 Maret 2018
di Jakarta.

Dalam proses pemilihan anggota *ASOSAI Governing Board* dan *audit committee* untuk periode 2018 – 2021. BPK RI kembali terpilih sebagai anggota *ASOSAI Governing Board* untuk 3 tahun ke depan.

Di lingkup komunitas *ASEAN Supreme Audit Institutions* (ASEANSAI) kegiatan yang dilakukan BPK sepanjang 2018, antara lain menggelar Seminar on Sustainable Development Goals (SDGs) di Jakarta. Seminar diadakan sekaligus dalam rangka peresmian Kantor Sekretriat ASEANSAI, yang bertempat di Gedung BPK Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Pembentukan Kantor Sekretariat ASEANSAI menyusul penunjukan BPK RI sebagai Sekretariat ASEANSAI untuk periode 2018-2023 melalui ASEANSAI Summit ke-4 di Laos, November 2017 lalu.

BPK juga berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan *ASEANSAI Workshop on Fraud Audit Investigation* pada Agustus 2018 di Jakarta. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kapasitas anggota ASEANSAI

Anggota V BPK, Ir. Isma Yatun, M.T didampingi oleh Tortama KN V, Bambang Pamungkas, serta Kepala Auditorat V.A, Ayub Amali, dan delegasi lainnya melakukan peninjauan peluang kerja sama dengan Arab Republic of Egypt Accountability State Authority (ASA Mesir) di Kantor Deputy Chairman of ASA Mesir, Ms. Mona Salahudin Tawheed tanggal 27 Juni 2018.



dalam bidang *Fraud/* Investigasi, terutama untuk menilai risiko potensi kecurangan, menyusun prediksi, melakukan prosedur alternatif dan merekomendasikan kepada *auditee* (pihak yang diperiksa) untuk mencegah terjadinya kecurangan. Workshop yang berlangsung selama 5 hari ini diikuti 29 peserta dari 9 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand termasuk Indonesia.

Sedang pada Desember 2018 BPK menjadi tuan rumah kegiatan *ASEANSAI Annual Meeting on Monitoring and Evaluation* di Jakarta. Kegiatan yang diadakan selama empat hari itu untuk mengevaluasi kegiatan ASEANSAI pada tahun 2018. Hasil evaluasinya akan digunakan untuk menyusun arah kegiatan ASEANSAI pada tahun berikutnya. Kegiatan ini diikuti oleh SAI Vietnam (Ketua *Strategic Plan*), SAI Filipina (Ketua Komite Pelatihan), SAI Laos (Komite Eksekutif), dan SAI Malaysia (Ketua *Knowledge Sharing Committee*), serta BPK selaku Sekretariat ASEANSAI).

3. Kerjasama Bilateral

Mengiringi kerjasama multinasional, selama 2018 BPK RI juga terus menjalin kerjasama bilateral dengan badan audit dari sejumlah negara. Pada Februari 2018 BPK RI melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Contraloria General de la Republica de Colombia (CGR) di Bogota. Kerjasama itu bertujuan untuk



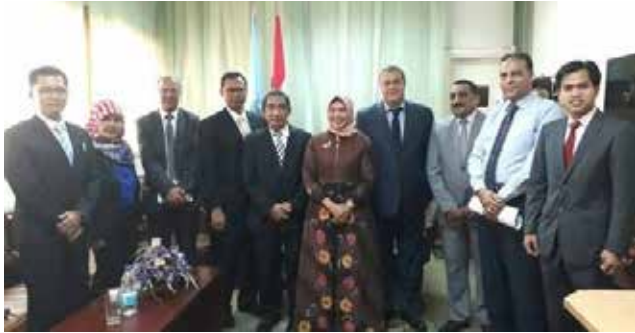
Penandatanganan Memorandum of Understanding Kerja Sama Bilateral antara Ketua BPK RI, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., C.P.A dan Comptroller General Contraloria General de la Republica de Colombia (CGR), Mr. Edgardo Jose Maya Villazon disaksikan oleh Anggota V BPP, Ir. Isma Yatun, M.T tanggal 22 Februari 2018 di Bogota, Kolombia.

memfasilitasi pertukaran informasi yang berkaitan dengan kompetensi teknis, metodologi audit sektor publik, serta pelatihan antar dua negara. Tentunya di luar kerjasama yang terjalin sebagai sesama anggota International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI).

Melalui kerjasama ini kedua belah pihak berharap dapat saling mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pengelolaan sumber daya publik yang efektif untuk kepentingan masyarakat kedua negara.

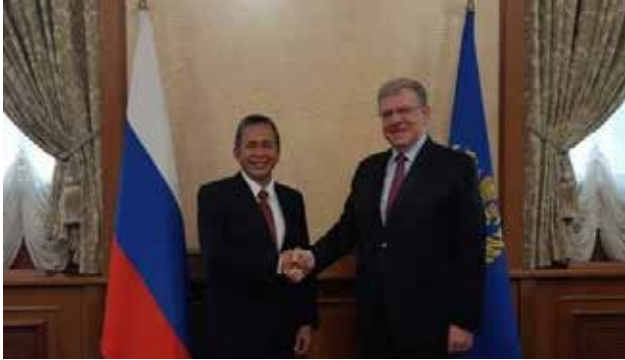
BPK juga menandatangani kesepakatan kerjasama dengan State Audit Office of the Republic of Latvia (SAO Latvia). Pelaksanaan penandatanganan MoU antara BPK dan SAO Latvia dilakukan di sela-sela pertemuan Forum for INTOSAI Professional Pronouncements (FIPP), November 2018, di Bali.

Anggota V BPK,
Ir. Isma Yatun, M.T
dan Wakil
Presiden Republik
Islam Iran Urusan
Hukum, Ms. Laya
Joneydi Bahas
Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
oleh Penegak
Hukum disela-
sela seminar
bersama ke-enam
antara BPK RI dan
Supreme Audit
Court (SAC) Iran
tanggal 25 Juli
2018 di Tehran.



Kesepakatan kerjasama kedua lembaga pemeriksa itu meliputi pengembangan metodologi pemeriksaan, penyebaran informasi, keahlian, kebijakan pemeriksaan, teknologi, serta praktik-praktik terbaik di bidang pemeriksaan sektor publik. Pada tahap awal mereka akan mengadakan seminar terkait *cross-sectoral performance and forensic audits*, serta *co-operation with law-enforcement agencies*.

Penandatanganan kerja sama bilateral juga dilakukan BPK dengan Supreme of Audit Institution of Pakistan. Kerjasama ditekankan pada upaya meningkatkan kapasitas pemeriksaan di sektor publik. Topik kerjasama meliputi *peer review* (telaah sejawat), seminar bilateral tentang *performance measurement framework*, pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan atas manajemen



Ketua Accounts Chamber of the Russian Federation (ACH Russia), Mr. Alexey Kudrin menyambut hangat kunjungan Ketua BPK RI, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA, Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif dan Deputy Chief of Mission Kedutaan Republik Indonesia, Lasro Simbolon dalam rangka penguatan kapasitas pemeriksaan di Kantor ACH Rusia tanggal 11 Juli 2018.

bencana, pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan paralel terkait lingkungan, seperti manajemen limbah medis dan pengelolaan sampah. Dalam kesempatan itu BPK juga menyatakan kesediaannya untuk asistensi SAI Pakistan dalam mengembangkan audit kesiapan implementasi SDGs.

Kesepakatan serupa juga dilakukan BPK dengan The State Audit Organization of Lao People's Democratic Republic pada 4 April 2018. Keduanya menyepakati rencana aksi yang meliputi *secondment* bagi para ketua tim audit SAO Laos di BPK, dan *training of performance audit and development of technical guidance on audit risk assessment* pada tahun 2019.

Menindaklanjuti kesepakatan yang terjalin dengan sejumlah negara, BPK melakukan berbagai kegiatan, antara lain melakukan kunjungan bilateral ke Supreme Audit Office of Poland (NIK), Warsawa, Polandia. Kunjungan ini dalam rangka mempererat kerjasama yang telah terjalin sejak 2008. Dimana keduanya telah mengimplementasikan berbagai kegiatan, seperti pelaksanaan enam seminar bilateral sejak 2009 dan pelaksanaan *Peer Review* BPK pada 2014.

Pada Juli 2018, BPK juga melakukan kunjungan ke *Accounts Chamber of the Russian Federation* (ACH Russia). Tujuan kunjungan bilateral ini untuk memperkuat komitmen yang telah terjalin dalam meningkatkan kapasitas audit, terutama di sektor publik. Kegiatan itu diwujudkan dalam bentuk seminar bilateral dengan tema Peran BPK dan ACH Russia dalam melakukan pengawasan terhadap negara atas sistem

President Supreme Audit Court (SAC) Iran, Prof. Adel Azar menerima kunjungan Anggota V BPK, Ir. Isma Yatun, M.T. dan delegasi lainnya dalam rangka Penguatan Kapasitas Pemeriksaan melalui pelaksanaan Seminar Bersama ke-Enam, tanggal 22 s.d 25 Juli 2018 di Teheran, Iran.



perbankan dan pasar keuangan serta Pemeriksaan atas investasi Pemerintah terkait minyak, gas bumi dan energi.

BPK dan ACH Russia telah menyepakati Kerjasama Bilateral itu pada tahun 2007. Berbagai kegiatan kerjasama bilateral juga telah dilaksanakan, antara lain menggelar seminar bilateral tentang komunikasi, pemeriksaan industri migas dan pemeriksaan atas utang negara.

Dalam rangka mendorong penguatan peran lembaga audit dan parlemen di bidang pemberantasan korupsi dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, BPK dan Supreme Audit Office of Czech Republic (SAO Ceko) menyelenggarakan seminar bersama di Pilsen, Republik Ceko. Kehadiran BPK ke Ceko selain memperkuat hubungan kedua lembaga, juga sebagai bentuk kunjungan balasan setelah sebelumnya pada 2017 SAO Ceko dan parlemen Ceko mengunjungi BPK.

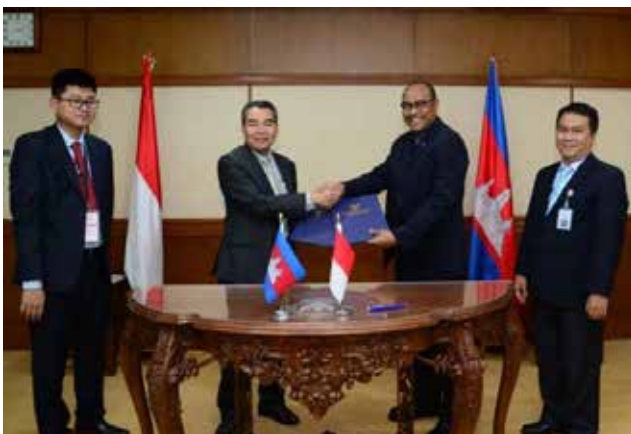
Seminar bersama juga digelar BPK dengan Supreme Audit Court (SAC) Iran, di Teheran Juli 2018. Tema seminar yang dibawakan kali ini terkait dengan upaya penegakan hukum



Hanoi 03 Agustus 2018, Wakil Ketua BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, mengadakan pertemuan dengan Deputy Auditor General State Audit Office Vietnam (SAV) Mr. Dang The Vinh di Hanoi untuk membahas hasil kerja tim pendampingan teknis BPK untuk pemeriksaan lingkungan yang dilaksanakan SAV selama periode April s.d. Agustus 2018.

dalam memerangi korupsi. Ada perbedaan penegakan hukum dalam menindaklanjuti hasil audit. Jika di Indonesia, Hasil Pemeriksaan BPK yang mengandung unsur *fraud* atau kecurangan disampaikan kepada Instansi Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti.

Sedang SAC Iran justru memiliki pengadilan sendiri untuk memutuskan kasus-kasus korupsi dari temuan audit. Putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum, sebagaimana pengadilan lainnya. Meski berbeda, keduanya sepakat bahwa peningkatan peran dan kapasitas lembaga audit merupakan salah satu kunci keberhasilan negara dalam memerangi korupsi. Selain soal penegakan hukum, keduanya juga membahas isu-isu seputar Pemeriksaan atas Bank Syari'ah, Pemeriksaan atas *E-Procurement* Pemerintah serta Pemeriksaan atas Perguruan Tinggi Islam.



Wakil Ketua BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar melakukan penandatanganan action plan kerja sama bilateral tahun 2018 – 2019 dengan Deputy Auditor General NAA Cambodia, Dr. Ouk Saravudh tanggal 6 September 2018 di Jakarta.

Auditor General CNAO, Madam Hu Zejun menyambut kunjungan bilateral Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, didampingi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Tornado Syaifullah, Kepala Sub. Auditorat VI.A.1, Arief Fadillah, dan Kepala Sub. Auditorat VI.A.2, Dodik Achmad Akbar dalam rangka seminar audit tanggal 10 s.d 13 Desember 2018 di Tianjing, Beijing



Selain kegiatan seminar bersama. Kerjasama bilateral juga diwujudkan BPK dalam bentuk kegiatan pendampingan. Seperti pendampingan BPK kepada SAV Vietnam dalam Field Audit Pemeriksaan Atas Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Industri Di Provinsi Bac Ninh, Vietnam. Kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan capacity building di bidang pemeriksaan kinerja pengelolaan lingkungan.

BPK juga menggelar workshop untuk memberikan pelatihan kepada beberapa SAI. Seperti workshop untuk delegasi National Audit Authority (NAA) The Kingdom of Cambodia. Workshop yang mengangkat tema pemeriksaan kinerja itu menindaklanjuti implementasi MoU BPK dan NAA pada 23 November 2010 di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam kesepakatan itu kedua belah pihak menyepakati empat area kerja sama yaitu (1) *Performance Audit Workshop/Training*, (2) *Knowledge Sharing on the mechanism of the follow up audit recommendation and its guideline development*, (3) *Education and Training*, dan (4) *Implementation of Supreme Audit Institution – Performance Measurement Framework (PMF)*.

Sementara dengan Board of Audit and Inspection of Republic Korea (BAI) BPK menggelar *Single Country Training* bersama di Seoul, Korea Selatan. Training ini diikuti 15 pegawai BPK dengan tema Penjaminan Mutu Pemeriksaan. Program yang telah berjalan 3 tahun ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi BPK dalam pengembangan *Audit Quality Assurance*.



Anggota II BPK, Agus Joko Pramono dan President Audit and Inspection Training Institute (AITI), Mr. Namgung Ki-Jeong menghadiri pembukaan pelaksanaan pelaksanaan Single Country Training on Public Audit Capacity Building Program yang diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan tanggal 16 Oktober 2018 bekerja sama dengan KOICA dan BAI Korea.

Kegiatan diakhir 2018 adalah kunjungan BPK RI ke National Audit Office of the People's Republic of China (CNAO). Kegiatan ini adalah rangka pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam rangka mengembangkan kemampuan auditor kedua negara. Terutama soal pemeriksaan pendidikan di Indonesia dan di Tiongkok.



Wakil Presiden Supreme Audit Office of Czech Republic (SAO Ceko), Zdeňka Hornikova, dan dua orang Anggota SAO Ceko, Petr Neuvirt dan Pavel Hrnčíř menyambut kunjungan Anggota V BPK RI, Ir. Isma Yatun, M.T didampingi delegasi lainnya beserta Duta Besar RI untuk Republik Ceko, Aulia A. Rahman dalam rangka sharing knowledge terkait peran lembaga audit dan parlemen dalam pemberantasan korupsi tanggal 9 s.d 12 Juli 2018.



BAB 8

PENINGKATAN PEMAHAMAN PUBLIK TENTANG BPK

1. Festival Film Kawal Harta Negara

Untuk kedua kalinya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID)-CEGAH kembali menggelar Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) tahun 2018, setelah sukses event serupa sebelumnya pada tahun 2017.

Festival Film Kawal Harta Negara bertujuan mendorong partisipasi publik, terutama kaum muda, untuk lebih dekat mengenal BPK sebagai pengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang negara. FFKHN menyasar publik, khususnya pelajar, mahasiswa, pembuat film, dan komunitas kreatif di Indonesia untuk mengirimkan film yang bercerita tentang *output*, pencapaian, peran, dan fungsi BPK. “Kami mengharapkan, dari film-film yang dikreasikan oleh para *film maker*, nantinya akan meningkatkan kesadaran publik terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK,” ujar Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara saat peluncuran FFKHN 2018 di gedung Perpustakaan Nasional RI, April 2018.

Untuk FFKHN 2018, kategori yang dikompertisikan antara lain film fiksi, film dokumenter, dan video jurnalisme warga (*citizen journalism*). Seluruh kategori ini terbuka untuk pelajar dan umum/mahasiswa. Pengiriman karya peserta dimulai pada 24 April 2018 dan ditutup pada 31 Juli 2018.

Selain kompetisi film, FFKHN 2018 juga menggelar kompetisi ide cerita film dari kategori yang ada. Peserta yang terpilih mendapatkan apresiasi dalam bentuk dukungan produksi dan pendampingan proses produksi oleh praktisi perfilman, hasil karyanya juga diikutsertakan sebagai peserta Festival Film Kawal Harta Negara 2018.

Setelah *launching* di Jakarta, BPK juga menggelar *Roadshow* FFKHN 2018 di enam kota, yakni Aceh, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Ambon. Kegiatan *roadshow* diisi dengan workshop tentang proses pembuatan film pendek, serta pembuatan video *citizen journalism*. Sejumlah *film maker* dan praktisi televisi menjadi narasumber pada



kegiatan *roadshow* tersebut, di antaranya Ismail Basbeth, Danial Rifki, Naya Anindita, Thomas Herda, Dewi Laila Sari dan Jati Savitri.

Setelah melalui serangkaian kegiatan *roadshow* ke 6 kota, pada Oktober 2018 BPK berhasil menjangkit 208 karya film pendek yang ikut berkompetisi. Setelah melalui proses seleksi tersaring 34 karya yang menjadi nominator. Sedangkan untuk ide cerita, proposal masuk mencapai 468 cerita dan setelah disaring 89 ide cerita masuk nominasi untuk mengikuti proses *Pitching Forum* dan terpilihlah 11 cerita (7 fiksi dan 4 dokumenter)

Dari proses penjurian melibatkan sutradara Slamet Rahardjo Djarot dan sutradara Ismail Basbeth. BPK memberikan penghargaan kepada 8 pemenang pembuatan film untuk berbagai kategori. Delapan karya film yang menjadi pemenang yakni, Film Pitching Forum Kategori Dokumenter berjudul *Kereta Api Perintis*, Film Pitching Forum Kategori Fiksi berjudul *Sepeda Tua*.

Untuk Film Pendek Dokumenter Kategori Pelajar, pemenangnya berjudul *Kihung*, Video Citizen Journalism Kategori Pelajar berjudul *Pelatihan untuk Desa*, Video Citizen Journalism Kategori Umum/Mahasiswa berjudul *Miris, Taman Kota di Sidrap Penuh Sampah*.

Badan Pemeriksa Keuangan RI mengumumkan karya terbaik dalam Malam Penghargaan Festival Film Kawal Harta Negara 2018. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI), Jakarta, pada hari ini (16/10).

Pemenang Film Pendek Fiksi Kategori Pelajar berjudul *Tulak Balak*, Penghargaan Khusus Film Pendek Fiksi Kategori Umum/Mahasiswa berjudul *Paga Nagari*, dan Penghargaan Khusus Film Pendek Dokumenter Kategori Umum/Mahasiswa berjudul *Berburu Rente Kebondalem*.

2. Kuliah Umum dan Talkshow tentang BPK

Untuk lebih memperkenalkan peran, fungsi dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan ke masyarakat BPK selama tahun 2018 menggelar sejumlah kegiatan kuliah umum dan *talkshow* kepada sejumlah kalangan masyarakat. Antara lain kuliah umum di Universitas Antakusuma, di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah, awal Januari 2018.

Kuliah umum yang diselenggarakan dalam rangkaian HUT BPK ke-71 ini mengambil tema “Peran BPK dalam Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara”. Kegiatan ini diharapkan dapat menjalin dialog yang positif antara BPK dan civitas akademisi sebagai langkah awal bersama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Kuliah umum lainnya dilakukan BPK saat acara Kursus Kader Pimpinan (SUSKAPIN) Resimen Mahasiswa

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar menyampaikan kuliah umum kepada Resimen Mahasiswa di Sekolah Staf dan Komando TNI AL (SESKOAL) Cipulir, Jakarta pada Rabu (28/2/18).



Indonesia Angkatan XXXVI Tahun 2018, di Sekolah Staf dan Komando TNI AL (SESKOAL) Cipulir, Jakarta. Kuliah umum juga dilakukan BPK di hadapan 300 orang Resimen Mahasiswa dari perguruan tinggi se-Sulawesi Utara, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Minahasa Sulawesi Utara.

Kursus kader ini bertujuan untuk menghimpun dan mengembangkan sinergitas kekuatan dan potensi bela negara terutama di kalangan siswa, mahasiswa dan anggota organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara.

Kuliah umum yang disampaikan BPK masih mengusung tema, Peran BPK dalam Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara. Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dalam kesempatan itu memaparkan mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang BPK dalam sistem pengawasan keuangan Negara.

3. BPK Goes To School/ Campus

Untuk memperkenalkan peran dan fungsi BPK secara lebih luas kepada masyarakat akademis, BPK juga memiliki program **BPK Goes to School/Campus**. Selama tahun 2018 beberapa kampus sempat dikunjungi BPK, di antaranya kampus Universitas Antakusuma, di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah, 8 Januari 2018.

Misi utama kegiatan Goes to Campus untuk menjalin dialog yang positif antara BPK dan civitas akademika. Dalam kegiatan di lingkungan akademisi itu para pimpinan BPK menyampaikan Visi BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas. Diharapkan dengan pengenalan BPK ke lingkungan pendidikan itu ke depan akan muncul kader-kader bangsa khususnya para siswa dan mahasiswa yang paham pentingnya pengelolaan dan transparansi keuangan negara untuk mewujudkan pembangunan.

BPK juga menggelar acara *BPK goes to campus* di Universitas Ikopin Jatinangor. Kegiatan ini diikuti ratusan mahasiswa baik dari Ikopin maupun kampus-kampus



Kuliah umum di Universitas Antakusuma, Pangkajene, Kalimantan Tengah, awal Januari 2018 disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar.

sekitarnya. Dalam kesempatan itu dipaparkan tugas BPK, akuntabilitas BPK, dan pemeriksaan yang dilakukan BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Acara serupa juga digelar di Universitas Politeknik Banjarmasin pada Mei 2018.

Sedang acara *BPK Goes to School* 2018 dilakukan BPK di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta pada 9 Februari 2018. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk dialog terbuka itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelajar dan para pengajar mengenai tugas dan wewenang BPK serta memahami kedudukan BPK dalam ketatanegaraan.

Kunjungan ke sekolah juga dilakukan BPK di Pesantren Persatuan Islam (PPI) 3 Pameungpeuk, Jawa Barat pada 8 Maret 2018. Hadir dalam diskusi yang bertema Sinergi BPK, DPR dan Akademisi dalam Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara adalah Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar.

4. Pameran di Ruang Publik

Dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-71, Badan Pemeriksa Keuangan menggelar acara yang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni dengan menggelar pameran di Stasiun Kereta Rel Listrik di Stasiun Palmerah, Jakarta pada 10 Januari 2018. Tak hanya pameran, BPK juga menyuguhkan hiburan musik tradisional kepada penumpang KRL. Suguhan musik tradisional yang dihadirkan yakni angklung dan kolintang. Pameran di ruang publik itu menyajikan foto kilas perjalanan BPK selama 71 tahun.

Menurut Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, kegiatan itu sebagai cara BPK mendekatkan diri kepada publik, karena sesungguhnya BPK milik publik. BPK selalu berharap memiliki manfaat dan nilai untuk publik, dan menjadi bagian bagi peningkatan kualitas pembangunan. Untuk itu BPK ingin melibatkan publik menjadi bagian dari proses tersebut, baik sebagai penyedia informasi, *partner* untuk memperkuat kerja BPK, maupun sebagai pengguna.

Selain pameran di Stasiun Palmerah, BPK juga berpartisipasi di berbagai kegiatan pameran. Penyelenggaraan pameran

BPK menggelar pameran di stasiun Kereta Rel Listrik di Stasiun Palmerah, Jakarta pada 10 Januari 2018.

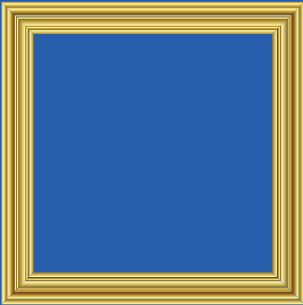
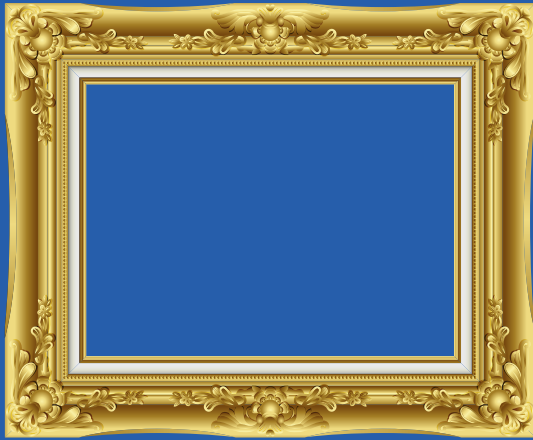
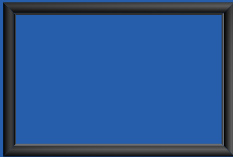


merupakan salah satu bentuk media komunikasi yang dilakukan BPK kepada stakeholders untuk menyampaikan informasi tentang tugas BPK. Dengan menggunakan pameran, masyarakat diharapkan lebih memahami peran dan tugas BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kegiatan pameran dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada publik dengan menampilkan berbagai produk cetakan yang dipublikasikan oleh BPK, antara lain IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester), Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Tahunan, buku-buku terbitan BPK, leaflet, dan media cetak lainnya yang bisa menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BPK secara lebih jelas kepada *Stakeholders*.

BPK mengadakan pameran dalam rangka Halal Bihalal Persatuan Paska Karya (PEPASKA) BPK pada 24 Juli 2018 di BADIKLAT PKN BPK, Kalibata, Jakarta. Di samping itu, BPK juga berperan aktif ikut serta dalam pameran yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada 26 Februari 2018; Pameran *Ministry Goes To PKN STAN (Journey To The Future)* yang diselenggarakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN pada 15 September 2018 di Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan; serta Pameran yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 11-13 Desember 2018 di Balai Kartini Jakarta.

Pameran juga digelar BPK saat peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) 2018, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Desember 2018. Partisipasi dalam kegiatan tersebut, menjadi wujud komitmen BPK untuk mengawal harta negara serta berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keikutsertaan BPK dalam pameran ini diharapkan BPK dapat menjelaskan mengenai visi, misi, tugas dan fungsi, tujuan strategis serta dokumentasi kegiatan BPK sebagai lembaga negara yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada masyarakat.



BAB 9

GALERI FOTO KEGIATAN



11 Januari 2019 - Ziarah makam pimpinan BPK terdahulu dalam rangka memperingati HUT BPK RI ke-72 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.



15 Januari 2019 - Syukuran HUT BPK ke 71 di Kantor Pusat BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.



25 Januari 2019 - Pembukaan Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan LKPD dan Dana Desa TA 2017 di Balikpapan.



25 Januari 2019 - Ketua BPK memukul gong sebagai tanda pembukaan Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan LKPD dan Dana Desa TA 2017 di Balikpapan..



5 Februari 2018 - Ketua BPK dan Anggota II pada penyerahan Laporan Keuangan Bank Indonesia *Unaudited* di Auditorium BPK RI.



5 Februari 2018 - Wakil Ketua BPK pada pembukaan Diklat CPNS di Badiklat PKN BPK.



6 Februari 2018 - Anggota III BPK saat menghadiri *Entry Meeting Audit Keuangan LPP TVRI Tahun 2017* di TVRI.



2 April 2018—*Launching Kantor Sekretariat ASEANSAL di Kantor Pusat BPK RI.*



5 Maret 2018—Wakil Ketua BPK dan Anggota II saat penyerahan LHP Otsus Papua ke DPR RI.



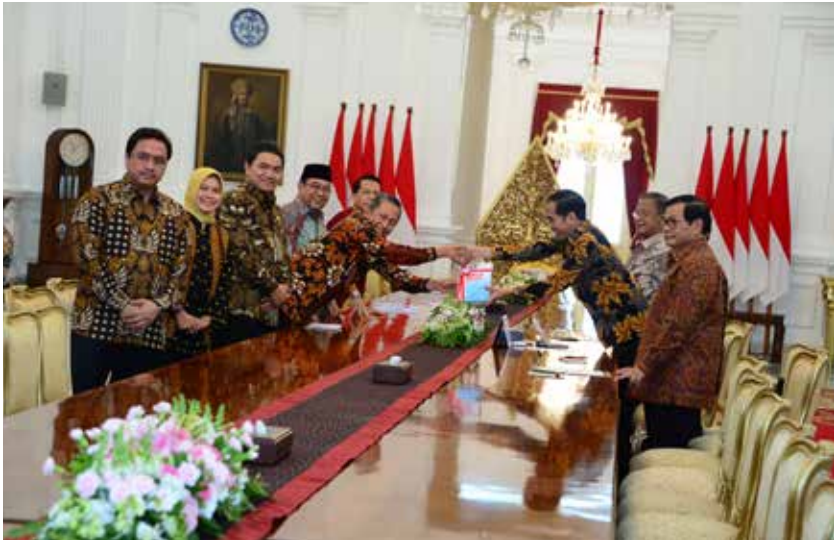
15 Maret 2018 - Kumpul Blogger BPK RI yang dibuka oleh Ketua BPK RI sekaligus Penyerahan Hadiah Lomba Nulis Blog BPK RI di Auditorium BPK RI.



19 Maret 2018 - Anggota IV BPK pada seminar Nasional Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim Untuk Kesejahteraan Nelayan.



19 Maret 2018 - Anggota IV BPK saat berbincang dengan Menko Kelautan dan Maritim serta Ketua DPR disela Seminar Nasional Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim Untuk Kesejahteraan Nelayan.



5 April 2018—Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan IHPS II tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara.



24 April 2018 - Launching Acara 2nd Festival Film Kawal Harta Negara di Perpustakaan, Jakarta.



28 April 2018 - Pembukaan Festival Film Kawal Harta Negara di Aceh oleh Anggota V BPK di Gedung Garuda, Aceh.



25 Mei 2018 - Anggota I pada acara KPU dengan Tema Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi Periode 2018 - 2023 di Hotel Borobudur.



28 Juni 2018 - Wakil Ketua BPK pada peresmian Perpustakaan Riset BPK RI.



28 Juni 2018 - Diskusi Panel Literasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Auditorium BPK RI.



11 Juli 2018 - Anggota VII BPK saat penyerahan LHP Pupuk Indonesia di Kantor BPK RI.



13 Juli 2018 - Anggota VII BPK saat penyerahan LHP Bulog di Kantor BPK RI.



9 Agustus 2018 - Ketua BPK RI menerima estafet obor Asian Games di Banten.



9 Agustus 2018 - Kirab Obor Asian Games oleh Ketua BPK RI di Banten.



14 September 2018—Anggota VI Sosialisasi Peran BPK & DPR di Palembang.



2 Oktober 2018 - Penyerahan IHPS I Tahun 2018 di DPR.



16 Oktober 2018 - Awarding Night Festival Film Kawal Harta Negara 2018 di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta,



4 Desember 2018 - ASEANSAI Annual Meeting on Monitoring and Evaluation di Jakarta